



• LEBIH •

== *dekat* ==

DENGAN

benua



kanguru

VERONICA SETYASIH HARINI, S.I.P.,M.Si

• LEBIH •

== *dekat* ==

DENGAN

benua



Kanguru

VERONICA SETYASIH HARINI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk Penggunaan Sanksi Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun disertai pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan atau huruf h untuk Penggunaan Sanksi Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun disertai pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan atau huruf g untuk Penggunaan Sanksi Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memonopoli atau berusaha memonopoli pada saat (a) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun disertai pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang menyalahgunakan tempat perlindungan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan tidak sadar memberikan persetujuan atas atau pengabdian atau hak, pelanggaran Hak Cipta dalam hak Terka di tempat perlindungan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 115 Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipidat atau oleh warisnya melakukan Penggunaan Sanksi Komersial, Penggunaan Penciptaan, Pendistribusian, atau Komunikasi atau Petrus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan iklan atau pemasaran untuk Penggunaan Sanksi Komersial hak,

• LEBIH •

== *dekat* ==

DENGAN

benua



Kanguru

VERONICA SETYASIH HARINI

LEBIH DEKAT DENGAN BENUA KANGURU
Sebuah Pengantar untuk Mendalami Australia
Copyright © Veronica Setyasth Harini

Penulis: Veronica Setyasth Harini
Editor: Aditya Kusuma Putra
Penata Letak: Yoga Ade S
Penata Sampul: Raditya Pramono
Sebagian ilustrasi diambil dari internet

CV KEKATA GROUP
Kekata Publisher
kekatapublisher@gmail.com
kekatapublisher.com
Fanspage: Kekata Publisher
"Cafehaca" Jalan Kartika, Gang Sejahtera 1 No. 3, Jebres,
Surakarta, Indonesia

Cetakan Pertama, Januari 2018
Surakarta, Kekata Publisher, 2018
xii + 207 hal, 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-602-5613-58-6

Dicetak oleh
Percetakan CV Oase Group
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Katalog Uslam Terbitan
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan rahmat-Nya untuk berbagi cakrawala pengetahuan tentang Australia. Selama ini Australia dikenal sebagai negara industri maju yang aman dan nyaman. Pemerintahnya mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan sebagai wujud dari keamanan nasional hingga keamanan insani. Maka tak heran jika negeri ini sering menjadi tujuan para pengungsi dan pencari suaka.

Sebagai pengenalan dan pengetahuan awal terhadap Australia ternyata memiliki banyak keunikan. Negara dan benua terkecil ini selain menempati posisi di selatan negara-negara Asia (terutama Indonesia) ternyata dikelilingi negara-negara berkembang yang sangat dinamis. Australia yang berpenghuni mayoritas kulit putih dan berbudaya Eropa diingkari orang-orang kulit berwarna dengan budaya Asia. Dengan kondisi geografis yang demikian menjadikan Negara Kanguru ini pintar-pintar dalam menempatkan diri.

Prinsip bertetangga baik semaksimal mungkin dijalankan agar dapat lebih mudah berhubungan dengan negara-negara tetangga. Melalui prinsip tersebut menjadi sarana untuk maju dan berkembang serta mengurangi persepsi negatif terhadap negara-negara yang terletak di sebelah utaranya. Penulis berharap tulisan ini tetap dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Surakarta, Desember 2017

Sebuah Bukti, Bahwa Perbedaan Geografis Bukanlah Penghalang

DR. Paul Thomas
Melbourne University

Sebuah gagasan tidak akan pernah berkembang jika hanya disimpan dalam kepala. Sebuah impian tidak akan tercapai jika hanya disembunyikan dalam lumbung sanubari. Itulah untalan kata yang dapat saya sampaikan setelah membaca buku ini. Untuk kali ini saya hendak menyampaikan bahwa batas negara yang disebabkan oleh perbedaan geografis bukanlah menjadi penghalang untuk saling memahami. Kesepahaman di antara dua warga yang berbeda budaya akan menjauhkan dari prasangka buruk dan saling kecurigaan. Walau sebelumnya belum sempat kenal, belum kesempatan untuk bertatap muka secara langsung namun dengan membaca buku semua itu menjadi tidak berarti. Sebuah bacaan matang yang didahului dengan riset semakin menunjukkan bahwa penulis bukanlah hendak berbasa-basi semata.

Di sini sekaligus menunjukkan bahwa Veronica Rini bukanlah orang biasa yang hanya sibuk mengurus anak. Dalam sempitnya kesempatan, waktu, dan tenaga Vero, sebuah panggilan yang mengakrabkan kami berdua menegaskan keinginannya untuk saling berbagi dan membukakan wawasan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia hendaknya lebih dekat dan lebih akrab dengan warga Australia sebagai salah satu negara tetangganya. Aneka pengalaman pahit-manis telah dilalui bersama oleh kedua negara namun belum banyak yang tahu siapa, apa dan mengapa Australia. Itulah pentingnya buku pegangan ini. Buku yang ada di tangan Anda ini kiranya dapat mempermudah untuk lebih

memahami kami, dari Benua Kanguru yang sama sekali berbeda dengan Indonesia.

Akal tidak akan tumbuh sehat jika masih terkungkung dengan emosi. Untuk meningkatkan akal agar menjadi lebih sehat, terimalah perbedaan. Kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan adalah *"Selamat Membaca, Selamat Bermimpi untuk Melihat Lebih Dekat Benua Kanguru dan Pahamiilah Perbedaan.* Sebab dengan perbedaan akan semakin memperkuat persaudaraan. Ingatlah bahwa tidak ada satu bangsa yang dapat hidup sendiri tanpa uluran tangan bangsa lain."

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I GEOGRAFI AUSTRALIA.....	1
Pengantar.....	1
Bentang Alam Australia Sebagai Benua dan Negara.....	3
<i>Australia, Misplored Continent</i>	13
BAB II PENDUDUK AUSTRALIA.....	20
Pengantar.....	20
Menenal Penduduk Asli.....	20
Isu Gender Dalam Sistem Politik Australia.....	130
Penemuan Benua Oleh Bangsa Eropa.....	22
Pulau Narapidana.....	23
Kedatangan Imigran.....	24
Proses terbentuknya struktur masyarakat Australia.....	31
Pembentukan Koloni di Australia.....	33
Pembauran Budaya.....	43
BAB III PROSES PEMBENTUKAN KONSTITUSI.....	55
Pengantar.....	55
Makna Konstitusi.....	55
Proses Pembentukan Konstitusi Australia.....	59
Isi Konstitusi Australia.....	65
Perubahan Konstitusi.....	72
Akta Australia.....	75
BAB IV MEKANISME FEDERALISME.....	79
Pengantar.....	79
Lambang Australia.....	79
Sistem Federal.....	80
Federalisme Baru.....	87
Mekanisme Federalisme.....	88
Perubahan Perimbangan Kekuasaan.....	88
BAB V MENENAL PARLEMEN.....	95
Pengantar.....	95

Parlemen Australia.....	95
Fungsi Parlemen.....	96
Perangkat Parlemen.....	98
Proses Pembuatan UU.....	100
<i>House Of Representatives</i>	101
Senat.....	104
BAB VI SISTEM PEMERINTAHAN	108
Pengantar.....	108
Sistem Pemerintahan.....	108
Gubernur Jenderal.....	109
Perdana Menteri (PM).....	112
Menteri.....	113
BAB VII SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN KEPARTAIAAN	117
Pengantar.....	117
Sistem Pemilihan Umum.....	118
Metode Pemungutan Suara.....	121
Sistem Kepartaian.....	123
Undang-undang Pemilu.....	125
Redistribusi Daerah Pemilihan Dalam Praktik Gerrymander.....	135
<i>Postscript: Pemilu 3 Oktober 1998</i>	136
BAB VIII PARTAI BURUH	138
Pengantar.....	138
Partai Buruh.....	138
Sejarah Partai Buruh.....	140
Ideologi dan Kebijakan.....	143
Struktur Organisasi.....	146
Kebijakan Partai Buruh Terhadap Isu Gender.....	148
Sumber Dukungan.....	150
BAB IX PARTAI LIBERAL-NASIONAL	153
Pengantar.....	153
Partai Liberal.....	153
Ideologi dan Kebijakan.....	157
Struktur Organisasi.....	157
Sumber Dukungan.....	158
Partai Nasional.....	158

BAB X PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI DAN HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK	161
Pengantar.....	161
Politik Luar Negeri.....	161
Kepentingan dan Tujuan Nasional.....	168
Politik Luar Negeri Partai-Partai Besar.....	169
Pembuatan Kebijakan Luar Negeri.....	171
Kebijakan Pertahanan Australia.....	173
Kebijakan Menahan Diri (<i>Containment Policy</i>).....	174
Hubungan Australia dengan Asia Pasifik.....	175
Australia dan AS.....	175
Australia dan Indonesia.....	178
Australia dan China.....	184
Australia dan Asia Pasifik.....	188
DAFTAR PUSTAKA	195
GLOSARIUM	200
PROFIL PENULIS	205

DAFTAR GAMBAR

Benua Australia.....	3
Tarian Aborigin.....	22
Situs Kingston and Arthur's Valve.....	25
Penemuan Emas dan Perusahaan Tambang.....	30
Tasmania.....	35
Australia Barat.....	36
Queensland.....	38
Victoria.....	39
Australia Selatan.....	40
Para pendatang membentuk bangsa Australia yang <i>melting pot</i>	49
Darling Harbour Sidney.....	50
Uluru-Kata Tjuta National Park.....	50
<i>Chinese in Lambing Flat riots, December 1860.</i> <i>Courtesy National Archives of Australia</i>	52
Lambing Flat Riot 1861, 'Might versus Right', S.T. Gill, c.1862 – 1863. <i>Courtesy State Library of New South Wales</i>	53
Piagam Magna Carta.....	57
Lambang Negara Australia.....	79
Komposisi Tempat Duduk Sidang House of Representative.....	101
Komposisi Tempat Duduk Sidang Senat.....	104
Sistem Pemerintahan.....	108
Mahkota dan Bunga Sebagai Simbol Gubernur Jenderal.....	109
Lambang Partai Buruh Australia.....	138
Lambang Partai Liberal Australia.....	153
Lambang Partai Nasional Australia.....	158



BAB I

GEOGRAFI AUSTRALIA

Pengantar

Australia, sebuah negara yang tidak asing dalam pendengaran banyak orang. Masyarakat pada umumnya mengenal negeri ini sebagai negara maju yang di dalamnya dihuni oleh binatang khas yakni kanguru dan koala. Sedikit orang yang mengetahui apa dan siapa Australia. Dalam bahasa Latin, Australia berarti selatan. Dalam percakapan sehari-hari, istilah Australia sering diucapkan dengan "Oz". Pengucapan ini sudah ada sejak permulaan abad ke-20. Ada lagi penyebutan terhadap benua kanguru ini dengan sebutan *Aussie* yang kerap kali diucapkan oleh orang-orang Australia sendiri dalam percakapan sehari-hari.

Legenda tentang tanah asing di selatan atau yang dikenal dengan *Terra Australis* sudah muncul sejak zaman Romawi. Menurut legenda ini, di bumi bagian selatan terdapat tempat yang bisa dihuni oleh manusia yang masyhur. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang Australia sebagai negara yang meliputi satu benua terkecil. Pembahasan ini sebagai pengantar kepada para pembaca yang belum mengenal negara sekaligus benua tersendiri di selatan garis khatulistiwa. Sebagai negara benua maka Australia termasuk sebagai negara terbesar keenam dengan budaya dan karakteristiknya yang khas. Dengan sejarah dan letak geografis yang terkesan terpencil menjadikan negara kanguru tersebut sering dijuluki sebagai *misplaced continent*.

Misplaced continent dari faktor sejarah berkaitan dengan masa lalunya yakni benua yang terletak di selatan Indonesia ini ternyata pernah menjadi tempat narapidana Tawanan-tawanan yang ditempatkan di benua terpencil Australia bukan semata-mata

sebagai tawanan politik tapi juga para kriminal lainnya yang umumnya sebagai korban dari adanya revolusi industri di Inggris. Narapidana yang dikirim ke Australia tentu saja merasa kesulitan untuk tinggal dan menetap di tempat dan lingkungan baru. Dengan budaya yang dibawa dari tanah asalnya, para narapidana juga kesulitan untuk berhadapan dengan situasi dan budaya baru yang sama sekali tidak terbayangkan.

Misplaced continent dari faktor geografis tidak terlepas dengan posisinya yang sangat strategis. Meskipun dikatakan sebagai benua terkecil dan terpencil namun Australia yang kaya akan sumber alam memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Sebagai negara besar yang mayoritas penduduknya berkulit putih namun terletak di suatu tempat yang umumnya didiami oleh orang-orang kulit berwarna (cokelat) menjadikan negara ini akan sulit menempatkan diri. Padahal jika dilihat dari budaya penduduknya akan terlihat budaya Barat (Eropa) yang sangat khas dan tertanam mendalam. Namun jika terlalu Eropa sentris, Australia juga akan sulit berkembang karena ketidakmampuannya berhadapan dengan tetangga-tetangganya yang sangat berbeda.

Bentang Alam Australia Sebagai Benua dan Negara



Benua Australia

Australia bisa dikatakan sebagai negara tapi juga sekaligus sebagai benua terkecil di dunia. Benua Australia yang membentang dari garis lintang $10^{\circ} - 41^{\circ}$ LS sampai garis lintang $43^{\circ} - 39^{\circ}$ LS dan dari garis bujur $113^{\circ} - 09^{\circ}$ BT sampai $153^{\circ} - 39^{\circ}$ BT, seperti terlihat pada gambar 1 berada di bumi bagian selatan. Benua ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di sebelah utara, Australia berbatasan dengan Benua Asia. Sebagai benua terkecil, Australia memiliki luas wilayah $7.682.300 \text{ km}^2$ sedangkan lebar wilayah tersebut kira-kira 3200 km dari pantai timur ke barat dan panjangnya 3700 km dari Tanjung York di pantai utara sampai Tanjung Tenggara di Tasmania. Namun jika dilihat dari negaranya,

Australia merupakan negara terbesar keenam di dunia dengan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan Rusia, Kanada,

China, Amerika Serikat, dan Brazil. Australia merupakan benua paling kering di dunia yang didiami manusia. Letak Benua Australia tidak cukup jauh di utara sehingga tidak secara luas dipengaruhi oleh cuaca lembab tropis. Demikian juga, benua tersebut tidak cukup jauh di selatan sehingga tidak memperoleh banyak hujan dari awan yang berasal dari samudera sebelah selatan.

Ketika kita menginjakkan kaki di Australia ada sedikit keanehan kondisi geografisnya. Apabila berkendara ratusan kilometer di Australia tidak akan menemukan adanya tanjakan. Australia adalah benua paling datar di dunia dibandingkan benua-benua lainnya. Kondisi geografi Australia pun sangat menarik. Sebagian besar wilayah Benua Australia merupakan plato rendah. Iklim Australia tergolong variatif karena dipengaruhi oleh garis lintang, arus samudra, jarak dengan pantai, keadaan suhu dan angin serta bentang alam.

1. Garis lintang

Dilihat dari garis lintangnya, Australia memiliki garis lintang yang luas yakni kawasan tropis, kawasan subtropis dan beriklim sedang. Berdasarkan garis lintang tersebut, sepertiga luas wilayah Australia berada di kawasan tropis dan sisanya berada di kawasan subtropis dan beriklim sedang.

2. Arus samudra

Untuk arus samudra, umumnya terbentuk ketika angin bertiup tetap di atas lautan. Arus samudra memengaruhi iklim di daratan misalnya ketika arus dingin maka biasanya daratan juga dingin. Sementara jika arus hangat menyebabkan iklim menjadi panas. Arus samudra yang ada di sekitar Australia terbagi menjadi beberapa antara lain adalah:

- a. Arus hangat
Arus hangat yang disebut Arus Australia Timur. Arus samudra ini mengalir di sepanjang pantai timur. Arus hangat lainnya disebut dengan Arus Leuwin yang mengalir di sepanjang pantai barat.
 - b. Arus panas
Arus panas yang sering disebut dengan Arus Khatulistiwa Selatan mengalir di sepanjang pantai utara Australia. Disebut arus panas sebab arus samudra ini menyebabkan udara di kawasan Australia menjadi panas.
 - c. Arus dingin
Arus dingin yang mengalir dari barat sampai timur kawasan Australia sering disebut dengan Apung Angin Barat. Arus ini setelah sampai di tepat sebelah selatan terus mengalir menuju ke Tasmania.
3. Jarak dengan pantai
Jauh dekatnya jarak daratan dengan pantai memengaruhi kondisi curah hujan dan suhu. Semakin dekat daratan dengan laut menyebabkan suhu menjadi lembah dan semakin jauh ke darat suhu menjadi kering. Bahkan, di tengah Australia merupakan daratan yang sangat kering dan bergurun. Maka, benua ini sering juga dikenal dengan benua terkering di bagian tengahnya.
 4. Keadaan suhu dan angin
Selain garis lintang, arus samudra, dan jarak dengan pantai, iklim Australia juga dipengaruhi oleh keadaan suhu dan angin. Udara tropis yang hangat memengaruhi iklim hingga menjadi panas. Untuk musim dingin, iklimnya lebih banyak dipengaruhi oleh udara kutub. Bulan Januari merupakan pertengahan musim panas dengan posisi matahari tepat di atas Australia bagian utara. Pertengahan musim dingin berlangsung pada bulan Juli. Pada saat ini, udara kutub

selatan sangat terasa mulai dari bagian selatan sampai ke utara daratan Australia. Udara kutub yang dingin bertiup ke arah Australia bagian selatan dari Samudera Selatan yang dingin menuju ke wilayah utara.

5. Bentang alam

Kondisi bentang alam Australia yang terkenal sebagai benua datar juga memengaruhi terhadap perubahan iklim. Misalnya saja udara yang berhembus di wilayah Australia tidak sedingin benua lain yang memiliki garis lintang sama. Garis lintang Australia memiliki kemiripan dengan daerah-daerah di Eropa Utara, Asia bagian utara dan sebagian Amerika Utara. Untuk ketiga kawasan tersebut pada saat yang sama mengalami musim dingin yang bersalju. Australia memiliki bentang alam yang setidaknya terbagi ke dalam tiga kawasan bentang alam. Bentang alam ini menjadi ciri khas dari benua Australia itu sendiri. Bentang alam Australia adalah sebagai berikut:

a. Perisai Australia

Australia Barat memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran yang terdiri atas plato dan perisai Australia. Dataran ini dibentuk dari batuan kristalin tua yang terbentang mulai dari barat laut ke arah timur sampai hampir setengah bagian dari benua Australia. Wilayah dataran ini merupakan daerah tandus dan kering. Beberapa tempat yang berada di dataran ini antara lain Great Sandy Desert, Great Victoria Desert, Simpson Desert, dan Gibson Desert. Sedangkan titik terendah yang berada di dataran ini adalah Danau Eyre yang terletak 13 meter di bawah permukaan laut.

Bagian barat dataran tinggi ini berupa daerah sempit berbentuk dataran rendah yang membujur sepanjang pantai barat Australia. Di Plato Australia ini

terdapat Mc Donnel Range, Musgrave Range, Ayers Rock, dan Mount Olga yang berada di Alice Spring sebagai hasil dari sisa-sisa erosi selama jutaan tahun.

Beberapa batuan yang ada di wilayah ini merupakan batuan tua di dunia yang umurnya lebih dari 3.000 juta tahun. Erosi yang terus menerus berlangsung mengakibatkan batuan ini aus. Karena kondisi erosi yang terus menerus, batuan-batuan tersebut sudah mengalami berbagai proses sedimentasi dan metamorfikasi. Kebanyakan batuan ini mengandung mineral penting seperti bijih besi, intan, dan nikel.

b. Dataran Rendah

Dataran ini merupakan tempat mengalirnya sungai bagian tengah dan selatan. Wilayah pengalirannya membentang mulai dari Teluk Karpentaria di utara sampai Teluk Spencer di selatan. Daerah Aliran Sungai Murray beserta anak-anak sungainya (Darling dan Murrumbidgee) merupakan salah satu daerah aliran sungai yang mengalir di dataran rendah Australia ini.

Sungai-sungai ini merupakan sungai yang intensitas pengalirannya tidak tetap dan hanya mengalirkan air pada saat hujan saja. Sungai ini mengalirkan alirannya ke danau-danau besar yang berada di daerah pedalaman dan alirannya pun tidak sampai ke laut. Danau Eyre merupakan danau terbesar dan sepanjang tahun danau ini adalah danau garam tanpa air.

c. The Great Dividing Range

Pegunungan Australia Timur terletak di sepanjang pantai timur Australia yang terkenal dengan pegunungan penghalang atau pemisah besar. Dataran tinggi ini berbentuk pegunungan-pegunungan tua yang tererosi selama jutaan tahun. Dataran tinggi timur berawal dekat

Semenanjung Cape York membentang ke selatan menuju Tasmania:

Di bagian utara Australia, pegunungan ini dikenal dengan Australian Alps dengan puncak tertingginya berada di Mount Kosciusco yang terletak di Snowy Mountains dengan ketinggian 2.234 meter di atas permukaan laut.

Dalam uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa iklim Australia tergolong variatif antara lain adalah:

1. Iklim tropis

Iklim tropis dapat dijumpai di wilayah yang berada di atas garis balik selatan. Daerah ini lebih dekat dengan garis khatulistiwa sehingga menerima sinar matahari terutama pada siang hari secara langsung. Suhnya menjadi lebih terasa hangat sampai panas di sepanjang tahun. Adapun suhu rata-rata suhu tahunan adalah berkisar antara 21°C dan 27°C. Pengaruh lain dari diterimanya sinar matahari secara langsung terutama di daerah yang berdekatan dengan pantai adalah tingginya curah hujan. Hal ini terasa terutama jika dibandingkan dengan daerah yang jauh dari pantai atau daerah pedalaman. Untuk daerah-daerah seperti ini, curah hujannya sangat rendah bahkan bisa muncul iklim gurun yang terasa panas dan kering.

2. Iklim lembab kering tropis

Daerah yang memiliki iklim lembab kering tropis mempunyai musim kering dan lembab. Curah hujan tahunan untuk daerah yang beriklim seperti ini paling sedikit adalah 1000-1500 mm. Kebanyakan hujannya turun pada musim panas yakni mulai bulan November hingga Maret. Pada waktu itu suhu rata-rata mencapai 28°C. Untuk bulan Maret hingga Oktober, udaranya terasa kering dan

lebih dingin dengan suhu rata-rata 26°C. Salah satu kota yang mempunyai iklim ini adalah Darwin.

3. Iklim sedang dan subtropis

Untuk daerah-daerah yang mengalami iklim sedang dan subtropis memiliki musim yang jelas pergantiannya. Daerah ini mengalami empat musim yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim panas biasanya diawali dengan suhu yang hangat pada bulan Desember hingga Februari. Bulan Juni suhunya terasa dingin dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus. Musim semi diawali pada bulan September sampai November dan untuk musim gugur mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Ketika musim gugur biasanya bersuhu sedang. Wilayah yang semakin menuju ke selatan, pergantian musim tersebut akan semakin terasa.

4. Iklim setengah gersang tropis

Daerah-daerah yang memiliki iklim setengah gersang tropis terletak di pedalaman dengan suhu hangat sampai panas. Suhu tersebut akan terasa sepanjang tahun yakni antara 21°C hingga 27°C. Tinggi rendahnya suhu suatu tempat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya curah hujan, jika suhu tinggi berarti penguapan juga tinggi maka curah hujannya akan rendah. Curah hujan dikatakan rendah jika berkisar antara 250 hingga 500 mm. Kondisi demikian merupakan pertanda pada daerah yang disebut dengan sabana atau padang rumput. Daerah ini sangat cocok untuk perembangbiakan kanguru dan ternak sapi.

5. Iklim lembab subtropis

Iklim lainnya yang ada di Australia adalah iklim lembab subtropis yang terletak pada Garis Balik dan 35°LS. Daerah ini biasanya ditandai dengan adanya dataran tinggi dan pantai di Australia bagian timur. Pada wilayah ini, hujan

turun pada semua musim bahkan pada musim panas dengan curah hujan rata-rata 500 hingga 1.500 mm per tahun. Cuaca pada musim panas terasa sangat menyengat dan sebaliknya pada musim dingin, udaranya sangat dingin. Suhu tahunannya berkisar antara 16°C sampai dengan 21°C.

6. Iklim setengah gersang subtropis

Iklim setengah gersang subtropis banyak dijumpai di daerah dataran tinggi yang berada di wilayah sebelah barat Australia. Daerah beriklim ini meskipun memiliki curah hujan yang kurang namun masih cukup untuk menanam rumput di sabana. Wilayah ini juga cocok sebagai habitat binatang kanguru serta domba bahkan untuk pertanian juga bisa yakni pertanian gandum.

7. Iklim sedang dan lembab

Iklim sedang dan lembab banyak dijumpai di Australia bagian timur yakni antara dataran tinggi dan pantai. Daerah yang memiliki iklim seperti ini biasanya hujan dapat turun sepanjang tahun dengan rata-rata mencapai 500 dan 1000 mm. Hujannya banyak turun di dataran tinggi bukan di sekitar pantai. Untuk musim panas, udaranya terasa panas dan pada musim dingin udaranya bukan terasa dingin tapi cenderung sejuk. Suhu tahunan rata-rata berkisar antara 10°C dan 16°C. Pada musim dingin biasanya salju turun di Pegunungan Salju. Selain itu, Australia juga memiliki iklim sedang yang lembab dan kering yang berada di sekitar Perth dan Adelaide. Pada musim panas, udaranya terasa sangat panas dan kering sedangkan pada musim dingin, udaranya sejuk dan berhujan. Umumnya, hujan tersebut dibawa oleh angin yang berembus dari barat sesudah menyeberangi Samudra Hindia dan Samudra Selatan. Untuk suhu rata-rata tahunan berkisar antara 16°C hingga 21°C. Curah hujan tahunan adalah antara 250 dan 500 mm.

8. Iklim padang pasir

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Australia juga dapat dikatakan sebagai benua terkering. Disebut sebagai benua terkering yang dapat didiami manusia disebabkan karena letak geografis Australia yang tidak cukup jauh di utara sehingga tidak secara luas dipengaruhi oleh cuaca lembab tropis. Australia juga sebagai benua yang tidak cukup jauh di selatan sehingga tidak memperoleh banyak hujan dari awan yang berasal dari samudra sebelah selatan. Hal ini terlihat pada sebagian besar wilayah di pedalaman merupakan padang pasir dengan kadar penguapan yang tinggi. Curah hujannya juga kurang dari 250 mm per tahun. Untuk padang pasir di Australia sama sekali tidak mendapat curah hujan selama beberapa tahun. Dengan kekeringan seperti itu sangat berpengaruh terhadap pertanian dan tempat tinggal sebab sekitar tujuh tahun sekali Australia mengalami kekeringan. Terkadang kekeringan yang melanda Australia tergolong sangat hebat hingga merugikan jutaan dolar seperti yang pernah terjadi pada tahun 1992 sampai 1995.

Di Australia terdapat tradisi kekeringan yang unik. Setiap tujuh tahun atau lebih Australia mengalami kekeringan. Kekeringan yang selalu timbul lagi itu juga merupakan masalah. Kadang-kadang kekeringan tersebut sangat hebat sehingga terjadi kerugian jutaan dolar ketika tanaman pangan dan hewan peliharaan mati. Seperti yang terjadi pada tahun 1992 sampai dengan 1995. Terjadinya kekeringan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di Pasifik yang tidak normal. Keadaan inilah yang disebut El Nino. Dapat dijelaskan di sini bahwa peristiwa El Nino muncul ketika Samudra Pasifik menjadi hangat, mulai dari Pasifik tengah sampai dengan pantai Peru di Amerika Selatan, tetapi tidak demikian di perairan Australia sebelah utara dan Indonesia. Apabila hal ini terjadi, angin pasat akan melemah dan arahnya berbalik, yakni berhembus dari arah

barat ke arah timur. Jadi udara tropis yang lembab tidak terpusat di dekat Benua Australia. Udara lembab tersebut terpusat di Samudra Pasifik tengah dan meluas ke timur ke arah Amerika Selatan. Hal ini menyebabkan turunnya hujan di Samudra Pasifik dan hujan di Australia serta di Indonesia menjadi berkurang dari biasanya. Akibatnya timbul kekeringan di Australia.

Jika diperhatikan wilayah Australia tidak begitu subur atau bahkan berupa gurun. Namun Australia memiliki aneka ragam habitat dari mulai padang rumput beriklim alpen hingga ke hutan hujan tropika, dan diakui sebagai negara megadiversitas. Biota Australia yang beraneka ragam ini tidak terlepas karena umur benua yang tua, namun juga pola cuaca yang sangat variatif, dan keterpencilan geografis. Biota di Australia terdiri atas: 85% tumbuhan berbunga, 84% mamalia, lebih dari 45% burung, dan 89% di dekat pantai, serta 755 spesies reptil.

Hutan-hutan di Australia memiliki beragam spesies tumbuhan yang selalu hijau. Misalnya saja pohon eukaliptus dan akasia yang tumbuh subur di kawasan yang sebenarnya kurang subur. Spesies ini merupakan yang paling dominan. Spesies fauna di Australia juga beragam. Binatang-binatang yang sangat khas di Australia antara lain monotremata (platipus dan elidna), sejumlah marsupialia (kanguru, koala, dan wombat), dan burung (emu dan kookaburra). Bahkan di Australia merupakan rumah bagi banyak binatang yang berbahaya termasuk beberapa ular yang paling mematikan di dunia. Salah satu fauna yang saat ini sudah punah, dinggo, diperkenalkan oleh orang Austronesia yang berdagang dengan penduduk asli Australia kira-kira 3000 Masehi. Tidak hanya itu, banyak spesies tumbuhan dan hewan menjadi punah segera setelah pendudukan manusia pertama, termasuk megafauna Australia. Selain itu spesies lainnya juga ada yang hilang sejak pendudukan bangsa Eropa, di antaranya adalah Harimau Tasmania.

Dengan banyak ekoregion Australia dan spesies Australia yang terancam oleh kegiatan manusia, maka Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *Undang-Undang Federal Tahun 1999 tentang Perlindungan Lingkungan dan Cagar Keanekaragaman Hayati* adalah kerangka hukum perlindungan hewan-hewan yang terancam. Pemerintah membangun banyak kawasan yang dilindungi dengan mengacu pada "Strategi Nasional untuk Perlindungan Keanekaragaman Hayati Australia". Tujuannya adalah untuk melindungi dan melestarikan berbagai macam ekosistem yang unik. Langkah Pemerintah antara lain adalah dengan mendaftarkan 65 lahan basah di bawah Konvensi Ramsar dan mendirikan 15 Situs Warisan Dunia UNESCO alami. Dengan berbagai kepedulian Australia terhadap lingkungannya ini, Australia menduduki peringkat ke-51 dari 163 negara di dunia pada Indeks Kinerja Lingkungan 2010.

Ancaman serius terhadap lingkungan Australia saat ini adalah perubahan iklim. Pemerintah telah menempatkan isu ini sebagai isu terpenting yang dihadapi negara ini. Misalnya saja Pemerintahan Kevin Rudd dengan melaksanakan beberapa kegiatan pengurangan emisi. Tindakan resmi pertama yang dilakukan Rudd adalah menandatangani perangkat ratifikasi Protokol Kyoto. Meskipun demikian, emisi karbondioksida per kapita Australia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, hanya lebih rendah daripada negara industri maju lainnya.

Australia, *Misplaced Continent*

Sejarah Benua Australia diawali dengan kedatangan masyarakat kulit putih yang membuka pemukiman di Sydney Cove tahun 1788 yang kemudian menjadi koloni New South Wales, kemudian dalam waktu beberapa dekade komunitas masyarakat kulit putih tersebut terbentuk menjadi suatu negara Federasi (1 Januari 1901) dengan nama *Commonwealth of Australia*. Tidak ada yang aneh jika melihat masyarakat Australia didalam *mainland*-nya sebab memang mayoritas mereka berkulit putih.

Jika dilihat kehidupan masyarakat yang berada di sekeliling *mainland* Australia, maka tampak adanya keganjilan yakni Australia yang putih dikelilingi oleh masyarakat kulit berwarna. Itu sebabnya dikatakan bahwa Australia sebagai *misplaced continent*, atau benua salah letak. Seharusnya dengan mayoritas masyarakat kulit putihnya, Australia berada di kawasan Eropa, tetapi justru lokasinya berada di wilayah Pasifik. Seharusnya dengan penduduk kulit putih berlokasi di kawasan Eropa atau Amerika bukan Asia atau Pasifik Selatan. Dengan melihat kondisi geografis dan sejarah tersebut memengaruhi pada perilaku masyarakat. Hal ini memperlihatkan gambaran sekelompok orang kulit putih di antara orang kulit berwarna. Secara umum orang kulit berwarna memiliki budaya dan cara pandang yang sangat berbeda dengan orang kulit putih. Orang kulit putih yang tinggal di Australia memiliki budaya Barat dengan tradisi Kristen-Judaisme dan orang Kaukasoid yang rasis.

Sebagai benua terkecil, Australia berada pada posisi geografis yang menguntungkan terutama pada jalur perdagangan. Banyak kapal asing yang singgah di benua ini untuk berdagang. Jika dilihat sebagai negara terbesar di kawasan Pasifik, Australia juga mendapat posisi yang diuntungkan. Dengan PDB per tahun sebesar \$579.662 juta, menjadikan Australia sebagai sebuah Negara yang sangat diperhitungkan dan berpengaruh di kawasan dan juga di kawasan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar negara-negara di kawasan tersebut yang sampai sekarang masih tergantung pada Australia. Hubungannya dengan komunitas di sekitarnya dipengaruhi oleh posisinya sebagai negara dengan tingkat atau nilai perdagangan besar dan sebagai donor kemanusiaan yang penting. Ketergantungan negara-negara kecil di sekitarnya bukan hanya pada sektor komoditas perdagangan tapi sampai pada tataran pemerintahan. Australia juga membantu negara-negara tersebut untuk maju dan berkembang, baik dalam hal ekonomi, pembagian kekuasaan antara pusat dan provinsi, dan falsafah pemerintahan.

Dalam bidang perdagangan terlihat produk Australia masih mendominasi pasaran di Pasifik. Dalam masalah politik pemerintahan, Australia juga mempunyai andil besar. Kondisi yang ada selama ini muncul adalah masih banyaknya negara-negara Pasifik yang kurang stabil dalam bidang politik sehingga sering terjadi kerusuhan, kudeta pemerintahan, dan pembunuhan massa. Australia berpengaruh besar dalam proses perdamaian dan pencapaian kestabilan pemerintahan. Ditambahkan juga bahwa Australia juga mempunyai tanggung jawab kemanusiaan kepada para korban. Hal ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kemanusiaan yang cukup diperhitungkan.

Australia merupakan rekan penting dalam bidang pertahanan dan keamanan bagi negara-negara Pasifik. Posisi penting Australia tersebut terutama pada perannya untuk mengatasi kejahatan transnasional, *human trafficking* dan sebagainya. Pembangunan di negara-negara Pasifik secara langsung maupun tidak juga masih tergantung pada bantuan yang diberikan oleh Australia. Banyak investasi untuk pembangunan yang ditanamkan Australia di wilayah ini. Melalui kawasan Pasifik inilah Australia sekaligus menanamkan pengaruhnya di bidang politik.

Sejak kemerdekaannya 1 Januari 1901, Australia berusaha untuk menjadikan negaranya sebagai negara besar kawasan yang berpengaruh. Usaha tersebut terpenuhi dengan munculnya Australia sebagai negara yang kuat secara ekonomi, stabil secara politik dan keamanan. Sementara realita menunjukkan bahwa negara-negara Asia dan Pasifik mempunyai karakteristik dan kultur yang sangat berbeda dengan Australia. Misalnya dari tata pemerintahan, banyak negara-negara tetangga Australia yang termasuk negara sedang berkembang. Sebagai negara sedang berkembang umumnya menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi dan politik yang membutuhkan uluran negara-negara tetangganya. Nilai impor terkadang melebihi nilai jualnya sehingga hutang luar negeri belum bisa teratasi secara maksimal. Akhir-akhir

ini Australia berhasil menjadi negara pengekspor gandum terbesar ke Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya bagi masyarakat Indonesia sejatinya gandum bukan menjadi bahan makanan pokok namun pengaruh dari gaya hidup modern.

Sementara ketidakstabilan politik terlihat dengan belum menguatnya nilai-nilai demokrasi. Sebagai penandanya antara lain adalah pergantian pemerintah yang diwarnai dengan kerusuhan atau munculnya dinasti pemerintahan. Artinya pemerintah yang sedang menjabat mempunyai pewaris yang telah dipersiapkan guna menggantikannya di kemudian hari jika masa jabatannya telah habis. Selain itu, masih banyak terlihat korupsi yang merajalela yang kemudian dibarengi dengan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Itu semua sebagai eksese dari ketidakmampuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi semua warganya.

Dalam utaran proses pembangunan yang berkelanjutan tersebut, terkadang masih diwarnai dengan kekacauan politik dan ekonomi baik dalam skala kecil atau besar. Jika yang terjadi adalah kemungkunan kedua yakni konflik ekonomi yang berujung pada konflik politik biasanya menimbulkan dampak yang luar biasa. Seperti munculnya kelaparan, suasana menjadi *chaos* dan terakhir adalah perpindahan penduduk secara ilegal ke negara lain. Bagi warga negara mana pun situasi aman dan nyaman yang menunglankan untuk mencari nafkah guna mempertahankan hidup menjadi tujuan utama. Kondisi inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua pemerintah di mana pun.

Selama ini menunjukkan jika terjadi ketidakamanan dan ketidaknyamanan di negara sendiri, banyak warga Asia atau Pasifik yang lari dari negaranya menuju ke Australia. Seperti ketika Indonesia memulai masa reformasi yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto, ada sebagian warga Indonesia menuju Australia guna mencari aman dan nyaman. Hal ini tidak dapat

dipungkiri sebab dalam pandangan para imigran baik legal maupun ilegal tersebut, Australia dianggap sebagai negara yang mampu memberikan segala yang dibutuhkan baik keamanan, kenyamanan, terjaminnya ekonomi dan politik. Dengan kata lain, Australia sebagai negara maju telah memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang diperlukan bagi individu.

Perbedaan lain Australia dengan negara-negara sekitarnya terlihat juga dengan warna kulit. Sebagian besar penduduk yang mendiami Australia mempunyai warna kulit sama seperti orang-orang keturunan Barat. Kenyataan sejarah tidak dapat dipungkiri bahwa semenjak ditemukan oleh orang Inggris, benua terkering di dekat Asia ini kemudian diberi nama Australia. Sejak itulah, banyak orang Inggris, Irlandia, dan warga negara Eropa lainnya yang berdatangan ke Australia untuk mengadu nasib. Bagi para pendatang yang mampu dan bertahan di "rumah barunya" akhirnya menjadi leluhur bagi penduduk sekarang.

Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, maka pantaslah jika penduduk Australia mempunyai kebudayaan yang sangat berbeda dengan negara-negara sekitarnya. Budaya yang turun temurun hingga sekarang tidak jauh berbeda dengan budaya Barat (Eropa). Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, negara ini menerima masuknya imigran non-Eropa. Latar belakang penerimaan imigran non-Eropa seperti dari Asia dimaksudkan guna memenuhi lapangan pekerjaan yang ada. Antara lain dalam wilayah perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Dalam pandangan orang-orang Australia, warga Asia yang berdatangan dan bekerja pada bidang-bidang pekerjaan.

Dari sini jelas menunjukkan bahwa gaya hidup dan budaya orang Australia akan berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Gaya hidup dan budaya yang berkembang di kawasan sekitarnya lebih terlihat sebagai Budaya Timur. Hal ini menunjukkan perbedaan bahwa orang-orang di sekitar Australia merupakan keturunan

orang Timur atau orang Asia. Perlu diketahui bahwa dalam pandangan orang Barat, Asia sebagai benua yang di dalamnya terdapat negara-negara berkembang. Perkembangan tersebut bukan hanya dari bidang politik tapi juga ekonomi. Sementara masyarakatnya khususnya dari negara-negara Asia Tenggara juga mengalami perubahan sosial yang begitu cepat.

Perubahan sosial tersebut dapat dimaknai dari dua sisi yakni internal dan eksternal. Dari sisi internal, sebagian anggota masyarakat yang telah menggap pendidikan tinggi. Pengaruh pendidikan tersebut secara langsung dan tidak akan membawa perubahan gaya hidup. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat bekal yang diperoleh dari pendidikan tinggi tersebut dapat digunakan untuk mencari pekerjaan yang lebih mapan. Pada gilirannya akan tercipta kemampuan untuk mencari eksistensi diri. Dari sisi eksternal, perkembangan teknologi membawa pengaruh pada warga negara dari negara-negara berkembang untuk mengikuti arus yang terjadi di negara-negara maju. Misalnya *junk food* yang begitu cepat menjadi gaya hidup baru.

Bidang lain yang perlu dicermati adalah politik dan pemerintahan, dalam bidang pemerintahan, sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang berkembang di Asia khususnya Asia Tenggara mengalami perbedaan dalam menentukan garis politiknya. Sebagai dampaknya negara-negara Asia Tenggara mengalami pengkotak-kotakan sistem politik. Hal ini bisa dilihat kembali ketika masih pecah Perang Dingin dan sesudahnya, tidak sedikit negara di Asia yang terpecah politiknya antara mengikuti garis liberal (AS) atau komunis (Soviet), antara lain adalah Vietnam. Dan meskipun tidak begitu terlihat selarang karena kuatnya pengaruh liberalisme namun sisa-sisa ketutsertaan negara Asia pada garis komunis masih tampak seperti pada Korea Utara dan Kamboja.

Untuk itulah, Australia sering dikatakan sebagai negara benua yang salah letak (*mislplaced continent*). Namun untuk menjembatani kondisi yang sangat berbeda antara Australia dengan negara-negara sekitarnya maka kebijakan yang dikeluarkan adalah berusaha untuk menjadi tetangga yang baik. Kerukunan bertetangga terus-menerus diusahakan oleh pemerintah dari waktu ke waktu meskipun konflik juga tetap mewarnai hubungan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan nasional sebagai sasaran utama bagi setiap negara yang terkadang menyebabkan timbulnya ketegangan di antara dua negara bertetangga.

BAB II

PENDUDUK AUSTRALIA

Pengantar

Berhasil tidaknya sebuah negara tidak hanya tergantung pada kepiawaian yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang berskala nasional maupun internasional. Keberhasilan negara tidak dapat terlepas dari keberadaan penduduk. Penduduk yang dalam hal ini mengacu pada semua orang yang menempati wilayah tertentu ternyata dalam beberapa kesempatan menimbulkan permasalahan. Permasalahan kependudukan yang akan diuraikan dalam pembahasan ini tidak lebih pada upaya satu kelompok yang kebetulan sebagai pendatang untuk menguasai tanah dan segala isinya yang sebenarnya sudah ada pemilikinya. Kedatangan para pendatang tersebut secara kebetulan pula telah memiliki ilmu, kemampuan, dan teknologi yang lebih tinggi daripada penduduk asli. Kontan, penduduk aslinya yang semakin lama semakin terdesak ke pedaiaman, terpojok, dan tertindas. Sebagai penghujung, penduduk pribumi inilah sebagai kelompok termarginalkan yang dipaksa untuk mengakui dan menghormati terhadap segala aturan dan tatanan yang dikeluarkan oleh pendatang.

Mengenal Penduduk Asli

Bicara soal penduduk Australia tidak dapat dipisahkan dengan kisah kehidupan orang-orang Aborigin. Orang-orang ini dikenal sebagai penduduk asli masyarakat Australia yang telah mendiami wilayah ini ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Kata Aborigin berasal dari Bahasa Latin "Aborigine" yang dapat diartikan sebagai "dari awal mula". Kapan orang Aborigin mulai datang ke Australia tidak dapat diketahui secara pasti. Ada yang menyebutkan seribu atau beberapa ribu tahun yang lalu. Menurut

Clark (1986) berdasarkan tes karbon mereka diperkirakan sudah dari 30.000 tahun yang lalu. Hal tersebut senada dengan pendapat Bereson dan Rosenbalt (1979) Sementara itu dalam buku *The Official Bicentennial Diary* (1988) disebutkan bahwa Aborigin telah datang sekitar 40.000 atau mungkin 70.000 tahun yang lalu.

Kedatangan orang-orang Aborigin dari Asia Tenggara sejak zaman es dengan menempati daerah yang lembab yang cocok untuk pertanian dan peternakan. Ada versi lain yang mengkaitkan dengan hikayat *Dreaming*. Menurut hikayat tersebut menunjukkan beberapa asal-usul dari orang-orang Aborigin yakni bahwa nenek moyang mereka diciptakan di Australia. Sebagian lagi mempercayai bahwa nenek moyang Aborigin berasal dari wilayah utara yang menyeberangi lautan menuju ke selatan dengan menggunakan perahu kano. Dengan perahu tersebut, orang-orang Aborigin datang ke benua selatan untuk membangun kehidupan baru.

Dalam perkembangannya, masyarakat Aborigin terbiasa hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan wilayah dan makanan baru (*food gathering*) untuk kelangsungan hidup. Perpindahan tersebut dilakukan bukan secara serempak tapi dalam suku atau identitasnya masing-masing. Dalam kepercayaan Aborigin, tanah yang ditempati dianggap sebagai tanah mereka secara turun-temurun. Penduduk asli diperkirakan 300.000 orang yang terdiri dari ratusan suku dengan bahasa dan dialeknya sendiri-sendiri.



Tarian Aborigin

Penemuan Benua Oleh Bangsa Eropa

Memasuki abad ke-16, banyak kapal asing yang singgah ke benua terkering ini. Sebagian besar kapal-kapal asing tersebut berasal dari dataran Eropa. Armada pertama yang singgah ke pulau ini adalah para navigator Portugis. Selanjutnya secara berturut-turut datang orang-orang Belanda dan Inggris. Kedatangan orang-orang Inggris ini bersamaan dengan terjadinya revolusi industri. Benua ini ditemukan Inggris di bawah pimpinan Kapten James Cook yang pada waktu itu berlayar menyusuri seluruh panjang pantai timur pada tahun 1770. Dalam perjalanannya, Cook sempat berhenti di Botany Bay dan sangat mengagumi pulau indah yang "belum berpenduduk". Dalam kekaguman tersebut, akhirnya Cook mengdalm bahwa tempat yang dijak menjadi milik Inggris dengan nama New South Wales. Sembilan tahun setelah penemuan tersebut, Joseph Banks yang sempat satu armada dengan Cook pada waktu itu mengusulkan kepada pemerintah Inggris. Usulan tersebut berkaitan dengan akses dari revolusi industri yang sedang melanda negaranya.

Pulau Narapidana

Di tahun 1779, Joseph Banks (seorang naturalis dalam armada Kapten Cook) mengusulkan cara agar Inggris dapat mengatasi masalah kepadatan di penjara-penjaranya dengan mengirimkan narapidana ke New South Wales. Di tahun 1787, armada pertama berlayar menuju Botany Bay, terdiri dari 11 kapal dan 750 narapidana pria maupun wanita. Armada ini tiba tanggal 26 Januari 1788, tapi segera berpindah ke utara ke Sydney Cove, Sydney Cove bagi para pendatang ini dianggap sebagai daerah yang memiliki tanah dan persediaan air yang lebih baik. Alasan lain bagi perpindahan penduduk ini juga berkaitan dengan kondisi di New South Wales yang tergolong sebagai wilayah yang panas, keras, dan buruk sehingga ancaman kelaparan sering menghantui kehidupan masyarakat.

Sedua tahun 1788, orang-orang Eropa semakin banyak yang datang. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan kondisi penjara-penjara Inggris yang semakin padat dengan orang-orang yang menentang revolusi industri. Kedatangan narapidana ke tempat baru ini secara perlahan ternyata semakin mendesak eksistensi penduduk pribumi. Dilihat dari kuantitas dan kualitas sangat jelas menunjukkan bahwa penduduk pendatang semakin menindas penduduk Aborigin yang tergolong masih sederhana, primitif, dan minim jumlahnya.

Sementara itu, para pendatang yang sudah habis masa tahananannya dan menjadi penduduk bebas berusaha untuk mempertahankan daerah yang pernah didiami. Keinginan untuk terus menempati wilayah baru ini sangat didukung oleh pemerintah Inggris dengan semakin banyak mengirimkan para pendatang dari Britania Raya dan Irlandia. Sedikit demi sedikit penduduk baru ini mengambil alih tanah Australia. Pada waktu itu pemerintah Inggris telah mengirimkan Arthur Philip sebagai gubernur pertama di Australia. Tugasnya selain membina para tawanan juga penduduk asli. Namun, dalam praktiknya tugas pembinaan terhadap penduduk

asli dianggap paling sukar terlebih dalam "penciptaan" hubungan dengan pendatang. Bagi Arthur Philip dan orang-orang Britania Raya yang ada di Australia selalu menganggap bahwa penduduk asli adalah orang bodoh yang tidak mampu diajak untuk kerja sama karena keterbatasan cara berpikirnya. Selain bodoh, penduduk asli masih percaya pada takhayul, pemikiran di luar logika manusia. Dalam pandangan para pendatang, Australia merupakan wilayah yang masih kosong (*terra nullius*) dan tidak mengakui keberadaan suku-suku pribumi. Sebaliknya, bagi orang Aborigin yang telah menempati wilayah yang sama selama ribuan tahun merasa bahwa merekalah yang empunya wilayah tersebut. Para pendatang yang kemudian mendirikan koloni dianggap sebagai penjajah, sebagai ancaman yang mengambil tanah dan seluruh isinya yang secara turun temurun telah menjadi miliknya sebelumnya.

Kedatangan Imigran

Eksplorasi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa tidak hanya berhenti pada tanah dan sumber daya alamnya. Penduduk asli semakin lama semakin tergesur, terbuang dan tertindas. Suku-suku Aborigin harus memutuskan apakah mereka akan menolak atau menerima pendatang baru. Sekalipun melakukan perlawanan, penduduk asli tetap tidak dapat mengambil alih kembali harta miliknya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kemampuan mereka dalam melakukan perlawanan yang masih mengandalkan pada alat-alat sederhana dan kemampuan magis untuk mengusir pendatang. Penduduk asli semakin terdesak ke pedalaman dan jumlah mereka semakin menipis. Pada masa ini sering dikenal sebagai *lost generation* karena banyaknya orang pribumi yang telah hilang generasinya.



Situs Kingston and Arthur's Vale

Penindasan dan penjajahan terhadap penduduk pribumi semakin terlihat ketika pemerintah Inggris mengirimkan orang-orang bebas (bukan tahanan) untuk mendiami wilayah "kosong" ini. Pemerintah Inggris pada waktu itu melancarkan program *assisted immigration* untuk mengatasi kekurangan penduduk. Kemudian pada tahun 1835 diperkenalkan sistem kependudukan yang baru yakni *Bounty System Dinamo*. Dalam sistem ini, koloni diminta untuk memilih kualifikasi imigran tertentu. Imigran yang akan didatangkan ini selanjutnya dapat dipekerjakan pada imigran terdahulu. Pada tahun 1841 didirikan tempat penampungan imigran wanita oleh Carolina Chirison. Keberhasilan program tersebut dapat terlihat mulai tahun 1850 dengan penambahan sekitar setengah juta jiwa. Orang-orang bebas tersebut mengubah segalanya sebab dengan kemampuannya berhasil menemukan tambang-tambang emas di New South Wales dan Victoria di tahun yang sama.

Sampai dengan tahun 1861 jumlah penduduk Australia meningkat. Peningkatan jumlah pendatang tersebut terlihat sampai lebih dari satu juta orang. Dan sesudah 1930 terjadi peningkatan minat berimigrasi ke Australia, hingga mencapai 30.000 jiwa imigran. Sepuluh tahun kemudian, pemerintah Inggris yang diwakili di Australia mengeluarkan kebijakan baru yakni program masuknya imigran sebanyak mungkin terutama dari

Inggris dan selebihnya bisu dari negara Eropa lainnya atau sekitar Laut Tengah.

Dalam perkembangannya, orang-orang Aborigin yang masih bertahan hidup tetap tidak mampu bersaing dengan para pendatang karena perbedaan budaya dan pola hidup. Masalah-masalah baru semakin banyak bermunculan terutama mengenai rasialisme dalam semua bidang kehidupan. Bagi penduduk asli yang tidak mengenali adanya jual beli dengan uang merasa kesulitan ketika harus berhadapan dengan pendatang dengan kebudayaan barunya. Padahal sumber daya alam yang sudah dikeruk dan dimiliki pendatang, memaksa penduduk pribumi yang biasa nomaden dan *food gathering* membeli semua keperluan hidupnya (terutama bahan makanan) dari pendatang dengan harga mahal (versi Aborigin).

Demikian juga dengan bidang sosial terutama pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Keberadaan orang Aborigin yang belum diakui oleh pemerintah setempat sebagai warga negara menyebabkan dampak yang luar biasa. Orang-orang Aborigin yang terbiasa nomaden menjadi alasan untuk tidak diperolehnya tempat yang tetap untuk mendirikan perumahan. Keturunan Aborigin juga tidak mendapatkan akses yang memadai dalam bidang pendidikan. Aborigin yang masih kental dengan gaya hidup kolot dan keterkaitannya dengan dunia magis seringkali dijadikan alasan untuk tidak diberikannya kesempatan mengenyam pendidikan. Tidak ketinggalan pula dalam bidang kesehatan yang menunjukkan tidak adanya perhatian dari orang-orang pendatang terhadap pribumi. Dengan kondisi yang semakin kacau menjadikan warga pribumi yang sakit tidak tertolong lagi. Penindasan tersebut semakin terlihat ketika perpolitikan tercipta di bumi Australia. Keadaan yang semula damai, aman, dan nyaman bagi penduduk pribumi dikacaukan dengan berdirinya pemerintah Australia sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Inggris. Kekerasan fisik dan pelanggaran HAM semakin merajalela. Sampai tahun 1971

orang-orang Aborigin dan termasuk penduduk asli yang tinggal sebagai warga negara.

Dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa masyarakat Australia terpecah-pecah dan setiap bagian karakteristik maupun budayanya masing-masing. Adapun struktur dan keragaman masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penduduk Asli

Penduduk asli terdiri dari orang-orang Aborigin yang telah menempati wilayah tersebut ribuan tahun. Meskipun dikategorikan sebagai penduduk asli, orang-orang Aborigin sebenarnya juga termasuk imigran awal yang berasal dari wilayah utara. Dengan budaya yang masih sederhana, hidup secara nomaden dan *food gathering* menjadikan struktur masyarakat kaum Aborigin terpecah-pecah dalam komunitas kecil. Komunitas kecil ini sering disebut sebagai suku-suku primitif yang satu dengan lainnya tidak selalu saling mengenal. Suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang kepala suku yang dipercaya memiliki kekuatan magis sehingga dapat melindungi anggota dan tanahnya.

b. Kolonis dan pendatang

Kedatangan para pendatang baru di luar kaum Aborigin dapat dikatakan mayoritas berasal dari dataran Eropa terutama Britania Raya dan Irlandia. Kedatangan pendatang selain karena dampak dari revolusi industri juga sebagai sarana untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik.

1. Inggris

Adalah negara yang pertama kali menemukan benua terkering di selatan Asia yang dianggapnya masih kosong. Setelah penemuan tersebut, Inggris pula yang kemudian mendirikan atau membangun koloni-koloni. Koloni dapat dimaksudkan sebagai komunitas masyarakat yang sudah diperkenalkan dengan unsur-

unsur politik. Dikemudian hari, koloni ini pulalah yang dikembangkan menjadi negara bagian. Adapun struktur masyarakat dalam koloni terdiri dari: narapidana, imigran bebas, dan pemerintah Australia yang mewakili ratu Inggris.

2. Orang Irlandia-

Orang Irlandia sampai di Australia pada abad 19. Seperti di negara asalnya, orang-orang Irlandia yang bermigrasi ke Australia sebagian besar masih menganut agama Katolik Romawi. Alasan mendasar kedatangan imigran tersebut ke tanah baru bukan semata-mata mencari mata pencaharian baru tapi juga kebebasan beragama. Dalam perkembangannya jumlah imigran Irlandia meningkat secara drastis dan banyak di antara mereka yang menjadi tokoh gerakan nasional Australia.

3. Orang Jerman dan Italia

Kedatangan orang Jerman sebagai imigran bebas berhasil mendirikan komunitas di koloni Victoria, New South Wales, dan terutama di Queensland. Sedangkan orang Italia justru yang sebenarnya memelopori pembukaan pemukiman di New South Wales pada tahun 1860. Keberhasilan orang-orang Italia dalam membuka pemukiman baru tersebut erat kaitannya dengan karakteristiknya sebagai petani perkebunan. Sampai saat ini keturunan Italia menduduki masih tergolong besar dari jumlah masyarakat Australia.

4. Orang Yunani.

Kedatangan orang-orang Yunani di Australia difasilitasi oleh pemerintah New South Wales (NSW). Imigran tersebut berhasil sampai ke Australia setelah mendapatkan tiket gratis. Sampai dengan tahun 1981

jumlah orang Australia yang berketurunan Yunani mencapai 146.625 jiwa.

5. Orang Yahudi

Orang-orang Yahudi yang berhasil tinggal dan menetap di Australia dilatarbelakangi dengan kehidupan sebelumnya yang tidak menentu. Setelah penjajahan Ottoman Turki dan merebaknya orang-orang Palestina menjadikan kaum Yahudi keluar dari negaranya. Pada masa itu, orang-orang tersebut terpencar-pencar di berbagai negara untuk mencari perlindungan dan ketenangan hidup. Namun sayangnya ketika sampai di Jerman yang waktu itu dikuasai oleh Nazi justru memperlakukan orang Yahudi dengan kejam. Sebagai dampak dari pengejaran dan penyiksaan Nazi itulah yang kemudian menjadi alasan bari orang Yahudi untuk menetap di Australia.

6. Ketika perang dunia II terjadi pada tahun (1930-an - 1940-an) terjadi perpindahan penduduk Eropa secara besar-besaran keluar Eropa. Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi dalam negeri yang sangat kacau dan tidak menentu. Gelombang migrasi yang dilakukan oleh banyak orang Eropa ke Australia sangat didukung oleh pemerintah Australia yang tentu saja setelah mendapat restu dari Ratu Inggris. Tahun 1940-an - 1950-an Australia menerima ratusan ribu orang yang tidak punya tempat tinggal di Eropa.

7. Orang-orang Timur Tengah (Turki dan Lebanon) dan China

Orang timur tengah datang ke Australia pada tahun 1970-an. Sedangkan orang-orang China datang ke Australia (koloni Victoria) tahun 1959 sudah mencapai 42 ribu jiwa. Ketika mulai ditemukan tambang-tambang

emas sudah banyak orang China yang tinggal sebagai pekerja di Australia. Dengan banyaknya orang China yang menetap sebagai pekerja tambang menimbulkan kerusuhan dengan keturunan Eropa yang sudah tinggal di situ sebelumnya. Berikut ini adalah gambar penemuan emas dan perusahaan tambang.



Perusahaan Tambang dan Penemuan Emas

Demam emas melanda Australia pada tahun 1814 di mana para narapidana yang masa itu dipaksa untuk melakukan kerja paksa membuat jalan ke Bathurst menemukan sejumlah emas tetapi tidak memiliki kekuatan untuk dapat dibayarkan. Kemudian pada tahun 1851 ketika Edward Hammond Hargraves menemukan emas yang dapat dibayarkan dekat Bathurst, New South Wales, di situs yang disebut Ophir oleh Edward Hargraves. Enam bulan kemudian, emas ditemukan di Victoria di Warrandyte dan Ballarat, dan tidak lama kemudian di Bendigo Creek. Emas kemudian ditemukan di seluruh koloni Australia.

Orang China yang dikenal sebagai pekerja keras dan ulet dianggap terlalu memasuki area pencarian orang Eropa. Bukan hanya itu saja, dampak kerusuhan yang ditimbulkan sebagai akibat ulah orang China berkembang ke masalah budaya dan sosial. Kejadian seperti ini sering terjadi di Koloni Victoria. Upaya pemerintah Australia untuk mengatasi masalah orang-orang China adalah dengan dikeluarkannya peraturan migrasi yang baru. Dalam

UU tersebut terdapat pembatasan bagi imigran China. Pada tahun 1880 - 1888 dilakukan konferensi antarkoloni. Konferensi tersebut memutuskan bahwa semua koloni menyetujui dikeluarkannya UU koloni untuk mencegah terlalu banyaknya imigran orang nonkulit putih. Semua koloni juga menyetujui bahwa kehadiran orang-orang China sering menimbulkan masalah.

Proses terbentuknya struktur masyarakat Australia

Menurut Crawford (1971) menyusun versi lain pada proses pembentukan penduduk Australia sampai saat ini. Menurutnya ada tiga gelombang migrasi: *Pertama*, migrasi penduduk asli yang diperlakukan memasuki Australia paling sedikit dalam dua gelombang dengan selang waktu yang cukup lama. *Kedua*, migrasi yang dimulai ke Sidney Cove yang didominasi oleh orang-orang Inggris. *Ketiga*, migrasi yang dimulai pada bagian akhir tahun 1940-an. Gelombang ini menandai berakhirnya ketergantungan Australia pada Inggris. Imigran ini berbahasa banyak, bersifat kosmopolitan, dan menjadikan masyarakat Australia sebagai masyarakat dengan kebudayaan yang beraneka ragam.

Gelombang migrasi pertama

Dikenal dengan masyarakat asli, tidak diketahui berapa secara pasti jumlahnya. Menurut dugaan orang-orang Inggris yang datang ke Australia, penduduk asli diperkirakan 300.000 orang yang terdiri dari ratusan suku dengan bahasa dan dialeknya sendiri-sendiri. Pola hidup penduduk masih komunal primitif dapat dilihat dari corak hidupnya yang masih belum menetap, berburu dan mengumpulkan makanan (*food gathering*). Arthur Pihlip, gubernur pertama di Australia mendapat perintah dari pemerintah Inggris untuk membina penduduk asli. Pemerintah Inggris sulit untuk membina hubungan baik antara penduduk asli dan pendatang. Hal ini disebabkan karena dari pihak penduduk pendatang yang lebih maju menganggap penduduk asli adalah orang bodoh. Kebodohan tersebut terkait dengan keterbatasan cara berpikirnya. Bagi penduduk asli merasa bahwa merekalah yang punya hak atas

seluruh ruang lingkup daratan Australia, karena mereka yang paling awal ada di Australia. Kedatangan orang Inggris dan mendirikan koloni di Australia dilihat sebagai suatu ancaman terhadap suku asli. Mereka semakin terdesak. Orang-orang Aborigin melakukan perlawanan, namun kalah karena persenjataan mereka tidak seanggih para pendatang dari Inggris.

Penduduk asli semakin terdesak pedalaman. Karena pola pikirannya yang masih sederhana, mereka tidak bisa bersaing dengan pendatang, maka mereka mengalami banyak masalah, yang memicu pada permasalahan rasial. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi mereka mengalami kesulitan keuangan. Bidang sosial sarana prasarana pendidikan, perumahan, kesehatan yang tidak memadai, sehingga banyak yang meninggal karena sakit. Dalam bidang politik mereka tidak mendapatkan hak untuk menjadi pemimpin. HAM terjadi berbagai kekerasan fisik; banyak yang dibunuh karena melawan pendatang dari Inggris. Kekerasan fisik mereka mendapat teror, kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam bidang politik kurang mendapat hak pilih sampai tahun 1967 dan pada tahun 1971 mereka baru disensus penduduk sebagai warga negara.

Gelombang migrasi kedua

Berlangsung dalam kurun waktu 1788 dan 1945 (berakhirnya PD II), sampai tahun 1820 jumlah imigran-imigran masih sedikit. Pemerintah Inggris melancarkan program *assisted immigration* untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian pada tahun 1835 diperkenalkan *Bounty System Dinamo*. Dalam sistem ini kolonis diminta memilih kualifikasi imigran tertentu untuk didatangkan dan bekerja pada mereka. Pada tahun 1841 didirikan tempat penampungan imigran wanita oleh Carolina Chrisom. Program tersebut bisa dikatakan berhasil, hal ini bisa dilihat pada tahun 1850 jumlah imigran sudah mencapai setengah juta jiwa. Jumlah imigran semakin bertambah dengan ditemukannya emas di New South Wales dan Victoria di tahun yang sama. Hingga tahun 1861

jumlah penduduk Australia meningkat sampai lebih dari satu juta orang. Dan sesudah tahun 1919 - 1930 terjadi peningkatan massal berimigrasi ke Australia, hingga mencapai 30 000 jiwa imigran.

Gelombang migrasi ketiga

Pada tahun 1940 pemerintah Australia memprogramkan agar imigran yang masuk ke Australia sebanyak mungkin, khususnya dari Inggris. Namun dalam gelombang ketiga ini Australia menerima imigran dari luar Inggris. Mereka masuk dari daratan Eropa dan daerah sekitar Laut Tengah.

Pembentukan Koloni di Australia

Keberhasilan Inggris melakukan eksplorasi, baik *coastal exploration* (eksplorasi pantai) maupun *inland exploration* (eksplorasi pedalaman) telah membuka pintu bagi pembukaan dan perluasan koloni. Bukan saja perluasan koloni di New South Wales dalam arti area pemukiman, tetapi juga bagi kemungkinan berdirinya koloni-koloni lain di sudut-sudut Australia. Semuanya ini meletakkan jalan bagi pendudukan seluruh daratan Australia oleh Inggris yang akan diuraikan dalam bagian uti.

Secara tradisional motif utama yang mendorong pemerintah Inggris membuka koloni di Australia adalah untuk memenuhi kebutuhan tempat pembuangan narapidana. Di mana pada akhir abad ke-17 kemiskinan dan kejahatan merupakan gejala yang selalu tampak dalam kehidupan masyarakat Inggris, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota. Banyaknya kejahatan menyebabkan penuhnya penjara-penjara di Inggris. Untuk menambah kapasitas penjara pemerintah menampung dalam kapal-kapal yang sudah tidak layak berlayar untuk dijadikan penjara terapung. Keadaan tersebut membuat pemerintah Inggris berpikir untuk mencari tempat pembuangan narapidana yang jauh dari negeri Inggris. Akhirnya diputuskan New South Wales adalah tanah yang cocok sebagai tempat pembuangan narapidana.

Motif lainnya pembukaan koloni di Australia, menurut para sejarawan lainnya adalah sebagai *naval supply and maritime base* hal ini dikaitkan dengan *swing to the east* dalam rangka peningkatan pelayaran dan perdagangan Inggris dengan China melalui pantai timur Australia sehubungan di sebelah Barat Australia sudah ada kekuasaan Belanda di Indonesia. Untuk itu, pembukaan koloni di New South Wales adalah untuk menyediakan tempat persinggahan dan pangkalan pemasokan kapal-kapal Inggris yang melintasi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Setelah koloni New South Wales berdiri, selanjutnya koloni ini dipimpin oleh gubernur. Gubernur pertama adalah Arthur Philip dari angkatan laut yang berusaha menjadikan koloni itu *selfhelp* mampu berdiri sendiri. Menurut Arthur Philip jumlah *free settler* harus ditingkatkan agar narapidana menjadi tenaga kerja yang produktif. Berbeda jika mereka statusnya masih narapidana yang tergolong tenaga kerja tidak produktif yang akan menghambat *selfhelp*.

Setelah Letnan Gubernur Arthur Philip (1792-1795) keadaan di koloni sempat dikuasai para Perwira Corps. Para perwira memonopoli perdagangan, terutama perdagangan rum. Setiap ada usaha yang mengganggu dan merugikan mereka pasti akan ditentang. Begitu juga ketika datang gubernur pengganti Arthur Philip, para perwira tersebut tidak patuh pada keputusan gubernur. Dalam perkembangannya, para perwira sering berselisih sampai pada tiga gubernur selanjutnya. Gubernur Hunter dituduh tidak layak menjadi gubernur, King dihina, dan puncak perselisihan terjadi ketika masa pemerintahan gubernur William Bligh yang dijebloskan ke dalam penjara. Peristiwa itu terkenal dengan nama Rum Rebellion.

Selanjutnya di bawah pemerintahan Lachlan Macquarie, seorang perwira dari Angkatan Darat Inggris berhasil melumpuhkan kekuasaan Perwira Corps. Para perwira tidak lagi

berkuasa penuh sehingga Macquarie berhasil memacu koloni ke arah kemajuan yang pesat. Pengetahuan tentang garis besar pantai Australia sudah banyak dicapai dilanjutkan ke arah pedalaman. *Great Dividing Range* atau *the Blue Mountains* dapat ditembus oleh Gregory Baxland, Lawson, dan Wenworth. Ekplorasi itu memungkinkan perluasan koloni dan pembentukan koloni-koloni lainnya di Australia, yaitu sebagai berikut:

1. Tasmania

Koloni Tasmania mulai berkembang dari pemukiman yang dimulai di daerah Sungai Derwent yang kemudian berpusat di Hobart dan di Port Dalrymple yang kemudian berpusat di Lounceston. Pada awal pertumbuhannya kedua pemukiman itu masing-masing dipimpin oleh seorang letnan gubernur yang mewakili gubernur New South Wales.



Tasmania

Sejak tahun 1813 kedua pemukiman itu (Lounceston dan Hobart) ditempatkan di bawah seorang letnan gubernur. Letnan gubernur yang pertama yang berkuasa atas kedua daerah itu adalah Kolonel Davey. Dengan mendorong kemajuan pertanian serta menjadikan Hobart sebagai pelabuhan bebas, Davey berusaha menjadikan Tasmania sebagai koloni yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam usahanya ini ia berhasil. Sayangnya sekali ia kurang disenangi gubernur New South Wales karena Davey adalah orang yang kurang disiplin, dan suka minum minuman keras.

Sebagai bagian dari New South Wales, Tasmania pernah dijadikan sebagai tempat pembuangan narapidana yang berkelakuan paling buruk, bahkan di Tasmania sempat dibangun satu penjara khusus yaitu Macquarie Harbour, di pantai barat pulau itu. Pada tahun 1825 Tasmania dipisahkan dari New South Wales. Dalam perkembangan selanjutnya Tasmania mempunyai kedudukan setara dengan New South Wales, dan berhak mempunyai *legislative council* seperti New South Wales. Ketika New South Wales mulai mempersoalkan transportasi narapidana, Tasmania pun mengajukan tuntutan agar sistem narapidana di sana dihapuskan. Tuntutan masyarakat Tasmania ini menjadi kenyataan pada tahun 1852.

Pada tahun 1855 koloni ini menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan secara resmi sejak itu mengubah namanya dari Van Diemen's Land menjadi Tasmania. Ditemukannya tambang tembaga, perak, dan bahan-bahan mineral lainnya dalam dekade 1870-an, menambah pesatnya kemajuan yang dialami Tasmania. Keberhasilannya dalam mengekspor buah-buahan, serta bentuk pulaunya, menyebabkan Tasmania terkenal sebagai *The Apple Island*.

2. Australia Barat

D aerah pantai Australia Barat sudah dikenal oleh pelaut-pelaut Belanda sejak dekade kedua abad ke-17. Kondisi alamnya yang gersang tidak merangsang orang-orang Belanda maupun Inggris untuk mendudukinya.



Australia Barat

Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 ekspedisi-ekspedisi penyelidikan Prancis mengunjungi daerah pantai Australia Barat tersebut, lalu tersiar kabar yang tidak jelas bahwa Prancis bermaksud menduduki daerah itu. Khawatir didahului oleh Prancis, dan merasa terlalu jauh harus mengawasi daerah itu dari Sydney, mendorong Gubernur Darling mengirimkan Mayor Lockyer mendirikan pos di King George Sound (Alban) pada tahun 1827.

Pada tahun yang sama, James Stirling menyelidiki daerah Swan River, dan sangat tertarik untuk mendudukinya. Gubernur Darling mengutus Stirling ke Inggris untuk meminta kepada pemerintah agar segera menduduki daerah Swan River. Pemerintah Inggris menolak. Lalu Stirling berusaha menghubungi orang-orang pemilik modal untuk beremigrasi ke Swan River dan membuka usaha di sana.

Terpengaruh oleh Stirling, Thomas Peel membentuk kongsi untuk membuka koloni di Swan River. Rombongan Peel tiba di Swan River pada tahun 1829. Mula-mula Thomas Peel beserta rombongannya mendarat di suatu tempat di mana sekarang berdiri Fremantle, akan tetapi kemudian mereka pindah ke arah utara ke tempat di mana sekarang berdiri kota Perth. Dari sinilah berkembang koloni Australia Barat yang sekarang menjadi salah satu Negara bagian dalam *Commonwealth of Australia*.

Berbagai faktor menyebabkan sejarah permulaan koloni Australia Barat diisi oleh cerita-cerita kekecewaan yang lebih dekat kepada kegagalan. Salah satu sumbernya adalah kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, ketika koloni-koloni lain sudah menolak transportasi narapidana Australia Barat justru meminta. Sejak tahun 1800 dilakukan transportasi narapidana ke Australia Barat yang baru berakhir pada tahun 1868. Dibanding dengan koloni-koloni

lain di Australia. Australia Barat adalah koloni terakhir yang melakukan pemerintahan sendiri sebagai daerah otonom dalam lingkungan kekuasaan Inggris.

3. Queensland

Untuk pertama kali Queensland dihuni oleh masyarakat kulit putih pada tahun 1824. Ditemukannya pemukiman yang baik di Queensland sebagian besar merupakan jasa para penjelajah (*eksplorasi*). John Oxley misalnya menyelidiki daerah Moreton Bay, tempat pemukiman pertama di Queensland. Pada tahun 1827 pemukiman baru di Darling Downs dibuka lagi oleh Allan Cunningham.



Pada mulanya pemukiman di Queensland tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari New South Wales. Setelah mengalami kemajuan-kemajuan, Queensland akhirnya merasa tidak puas lagi berada di bawah New South Wales. Rakyat di Queensland menginginkan agar Queensland dipisahkan dari New South Wales. Keinginan masyarakat Queensland ini dikabulkan oleh Pemerintah Inggris pada tahun 1859.

Kondisi dan kekayaan Queensland sangat membantu kemajuan di sana. Letak negerinya yang sebagian berada di daerah tropis, memungkinkan Queensland mengusahakan perkebunan kapas yang pernah sangat menguntungkan negeri itu dan juga perkebunan tebu. Dalam mengusahakan perkebunan tebu ini Queensland memertukan tenaga buruh

yang tidak terlalu mahal. Akibatnya terjadilah apa yang disebut "Kamukus Traffic" yang menimbulkan dilema bagi negeri itu.

Dengan pertimbangan-pertimbangan keamanan, Queensland meminta kepada Pemerintah Inggris agar segera menduduki Irian Timur, namun permintaannya itu berkali-kali ditolak oleh Pemerintah Inggris. Akhirnya pada tahun 1883 Queensland bertindak sendiri mendudukinya dan menyatakan Irian Timur sebagai milik Inggris. Pada tahun 1884 Inggris menguatkan tindakan Queensland tersebut. Untuk selanjutnya sampai tahun 1901 Irian Timur yang menjadi milik Inggris itu diperintah dari Queensland.

4. Victoria

Sebagai bagian dari New South Wales, Victoria semula disebut Distrik Port Philip. Kolonis yang mula-mula dikirim ke daerah ini adalah rombongan David Collins



yang ditugaskan membuka pemukiman di Sorrento. Akan tetapi karena tempat ini kurang cocok untuk ditempati, Collins beserta rombongan pindah ke Tasmania. Orang kulit putih yang mula-mula menetap di daerah ini ialah Henty Bersaudara, yang menempati Teluk Portland pada tahun 1834.

Kemudian dalam tahun 1835 Batman dan asosiasinya menduduki daerah Sungai Yarra, dan pada tahun yang sama kelompok Fawkner juga mendirikan pemukiman di tempat di mana sekarang berdiri kota Melbourne. Sama dengan Henty bersaudara, kedua kelompok yang disebutkan terakhir juga

berasal dari Tasmania. Kelompok ini menempati Distrik Victoria tanpa seljin pemerintah sehingga Batman dan Fawkner beserta rombongannya tergolong penghuni liar yang dalam sejarah Australia disebut *squatter*. Batman mempunyai pengalaman yang unik dalam kehadirannya di daerah ini.

Pada tahun 1837 gubernur Bourke mengunjungi daerah ini dan meresmikan nama-nama Kota Williamstown dan Melbourne. Sampai tahun 1850 Victoria masih merupakan bagian dari New South Wales. Untuk mewakili gubernur New South Wales di sana diangkat seorang *superintendent* (pengawas). Rasa tidak puas di bawah tekanan pemerintah New South Wales mendorong rakyat di Distrik Port Philip menuntut pemisahan. Tuntutan itu mula-mula dijawab dalam bentuk hak distrik dengan memilih 6 dari 24 anggota *legislative council* di New South Wales. Jawaban pemerintah ini tidak memuaskannya. Pada tahun 1850 Victoria dipisahkan dari New South Wales, dan sejak tahun 1851 menetapkan dan melaksanakan pemerintahan sendiri.

5. Australia Selatan

Kalau Australia Barat dapat disebut koloni suatu kongsi, maka Australia Selatan dapat disebut koloni suatu teori. Hal itu dikarenakan pembentukannya didasarkan pada suatu teori yang dikemukakan oleh Wakefield. Australia Selatan dibentuk dengan memotong areal seluas 300.000 mil persegi dari wilayah New South Wales. Rombongan koloni pertama tiba pada tahun 1830, mendarat di Pulau Kangaroo.



Australia Selatan

namun akhirnya memilih lokasi untuk menetap di tempat di mana sekarang berdiri kota Adelaide.

Pada awal berdirinya koloni ini, di sana berjalan dualisme kekuasaan yang membawa berbagai komplikasi. Namun akhirnya pemerintah Inggris menghapuskan dualisme tersebut dengan cara memanggil kedua pejabat, gubernur dan komisaris residen, lalu mengangkat gubernur baru yaitu Gawler.

Di sekitar tahun 1840 koloni itu hampir bangkrut, namun diselamatkan oleh penemuan tambang tembaga di Kapunda pada tahun 1842 dan kemudian tambang yang lebih kaya lagi di Burra-burra. Gubernur Grey, berusaha menjadikan koloni ini mampu berswasembada. Sebagai seorang gubernur yang berhasil, Grey mendapat pujian dari Perdana Menteri Inggris dalam pidatonya di depan Majelis Rendah. Sejak tahun 1853, Australia Selatan mulai berusaha mempersiapkan pemerintahan sendiri, namun baru berlaku secara efektif tahun 1856.

Bila diperhatikan lebih lanjut setelah tumbuhnya koloni-koloni di Australia, pada tahun 1850 Pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan *Australian Colonies Government Act*. Dalam undang-undang ini, setiap koloni ditawarkan dengan penyusunan pemerintahan sendiri. Selanjutnya mulai tahun 1850, berdirilah lima koloni yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri, yaitu New South Wales, Victoria, Tasmania, Australia Selatan, dan Queensland. Koloni terakhir yang menjalankan pemerintahan sendiri adalah Australia Bagian Barat.

Perkembangan selanjutnya, *Australian Colonies Government Act* (1850) oleh Parlemen Inggris, dari satu sisi dipandang sebagai *historical accident* (kecelakaan sejarah). Undang-undang itu menjadi landasan hukum perpecahan di antara koloni yang hampir berjalan 50 tahun. Menjelang akhir abad ke-19 seluruh unsur yang

menghendaki persatuan berhasil mengkontruksi landasan yang menghendaki persatuan Australia. Faktor-faktor pendorongnya antara lain: munculnya kekuasaan Eropa lain di daerah Pasifik seperti Jerman dan Prancis, keinginan mereka untuk menjaga agar benua ini hanya diisi oleh orang-orang kulit putih, hasratnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kerja sama ekonomi, ketenagakerjaan, adanya perkembangan alat-alat komunikasi, aspek militer, dan kebanggaan untuk disebut sebagai orang Australia dibandingkan nama orang Tasmania, Victoria, dan sebagainya.

Dalam memprakarsai pembentukan satu bangsa Australia banyak politisi kenamaan dari dua koloni-koloni di Australia. Hasil referendum di empat koloni tersebut pada tahun 1898 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Victoria, Australia Selatan, dan Tasmania menyetujui sistem pemerintahan sebagaimana digariskan dalam konsep konstitusi yang dihasilkan oleh konvensi kedua.
2. Mayoritas rakyat di empat koloni menghendaki sistem pemerintahan baru dalam pembentukan federasi.
3. Sekalipun mayoritas rakyat di empat koloni menghendaki sistem pemerintahan yang baru itu, namun referendum ini tergolong gagal karena New South Wales tidak berhasil mencapai jumlah dukungan yang ditetapkan.

Koloni-koloni yang lain merasa bahwa federasi tanpa New South Wales merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Perasaan inilah yang mendorong masyarakat dari koloni-koloni yang lain menyetujui beberapa amandemen dalam pertemuan kepala-kepala pemerintahan yang diadakan sesudah referendum tersebut. Pada tahun 1899 diadakan referendum yang kedua. Kali ini lima koloni menyelenggarakan referendum, dan hasilnya adalah:

1. Mayoritas penduduk di lima koloni menyetujui federasi dengan konstitusi yang sudah mendapat amandemen.

2. Jumlah suara yang di setuju di New South Wales melebihi jumlah yang ditentukan, sehingga referendum ini berhasil menggolkan gerakan federasi.

Tanpa menunggu Australia Barat, kelima koloni mengirimkan rancangan konstitusi federasi itu ke Inggris untuk disahkan oleh parlemen Inggris. Pemerintahan Inggris dalam tahun 1900 mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan pembentukan federasi tanpa Australia Barat. Undang-undang ini disebut *Australian Commonwealth Act*. Sementara itu, Australia Barat mengadakan referendum dan hasilnya adalah 44.800 setuju dan 19.601 menolak. Dengan hasil ini maka Australia Barat bergabung dalam federasi. Dengan demikian, ketika *commonwealth of Australia* menjadi kenyataan, federasi itu meliputi enam koloni yang nantinya menjadi negara bagian.

Demikian akhirnya gerakan persatuan di Australia berhasil setelah 50 tahun lamanya hidup terpecah-pecah. *The commonwealth of Australia* menjadi kenyataan pada tanggal 1 Januari 1901 kurang lebih tiga minggu sebelum Ratu Victoria meninggal. Pada tanggal 9 Mei 1901 raja Edward VII, diwakili oleh anaknya Duke Of York membuka secara sidang secara resmi sidang pertama parlemen federal di Melbourne. Perdana Menteri pertama untuk federasi yang baru lahir ini adalah Edmund Barton. Melbourne sementara menjadi tempat kedudukan pemerintahan federal sampai kemudian dipindahkan ke Canberra pada tahun 1927.

Pembauran Budaya

1. Bahasa

Australia tidak memiliki bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang telah membudaya sejak awal penemuan Benua ini. Sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa *de facto* nasional. Bahasa Inggris merupakan bahasa kebangsaan, walaupun ada lebih dari 260 bahasa yang digunakan di Australia, termasuk bahasa pribumi. Bahasa

Inggris Australia sendiri sebenarnya merupakan varietas utama bahasa Inggris-Britania namun dengan aksen dan kosakata yang berbeda. Tata bahasa dan cara pengucapannya sama seperti Bahasa Inggris Britania namun memiliki beberapa pengecualian yang cukup terkenal. Misalnya saja penggunaan kata-kata percakapan sehari-hari yang populer. Kata-kata ini sering digabung dengan cita rasa humor Australia yang memiliki karakter ironi dan tanpa kesopanan, kadang kala dapat menimbulkan kebingungan bagi pengunjung internasional. Ada sejumlah buku tentang kata-kata percakapan sehari-hari dan ungkapan-ungkapan populer Australia, termasuk *Macquarie Book of Slang*.

Menurut sensus 2006, bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa lisan di negara ini untuk hampir 79% populasi. Bahasa lisan kedua adalah bahasa Italia (1,6%), bahasa Yunani (1,3%) dan bahasa Kanton (1,2%). Proporsi ini wajar karena kaum migran generasi pertama dan kedua memang berasal dari negara yang mampu bicara dalam dua bahasa. Data dari Indeks Pembangunan Dini Australia dalam sebuah penelitiannya pada tahun 2010-2011 menemukan bahwa bahasa lisan yang paling lazim bagi kanak-kanak selain bahasa Inggris adalah bahasa Arab, diikuti oleh Bahasa Vietnam, bahasa Yunani, bahasa China, dan bahasa Hindi.

Pada saat pertama kali imigran pertama kali datang sebenarnya masih ada sekitar 200 hingga 300 bahasa asli Australia yang bertahan. Namun kini hanya 70 bahasa yang masih lestari. Sebagian besar bahasa yang lain hanya dituturkan oleh orang tua. Saat ini hanya 18 bahasa asli Australia yang masih dituturkan oleh semua kelompok umur. Pada sensus 2006, menyebutkan bahwa 52.000 orang asli Australia, mewakili 12% penduduk asli dilaporkan bahwa mereka menggunakan bahasa asli di rumah. Australia juga memiliki bahasa utama untuk kaum tunarungu yang mencapai

5.500 orang. Bahasa isyarat tersebut dikenal dengan nama Auslan.

2. Agama

Australia tidak memiliki agama resmi. Penduduk Australia menganut berbagai agama. Setiap orang bebas mengekspresikan dan memelihara tradisi budaya dan agamanya menurut undang-undang, dan dapat berpartisipasi dan betah sebagai seorang warga Australia. Menurut sensus 2006, warga Australia saat ini kurang religius. Peningkatannya sekitar 13% dari tahun 1991 menjadi 30% pada tahun 2016. 64% orang Australia mengaku sebagai Kristen, termasuk 26%-nya sebagai Katolik Roma dan 19%-nya sebagai Komuni Anglikan. Kira-kira 19% populasi menyatakan diri sebagai "ireligius" (termasuk humanisme, ateisme, agnostisisme, dan rasionalisme), yang merupakan kelompok yang paling cepat berkembang dari tahun 2001 sampai 2006, dan lebih dari 12% tidak menjawab (jawabannya opsional) atau tidak memberikan tanggapan yang memenuhi syarat penafsiran. Agama terbesar yang bukan Kristen di Australia adalah Buddha (2,1%), diikuti oleh Islam (1,7%), Hindu (0,8%), dan Yahudi (0,5%). Semuanya, kurang dari 6% orang Australia yang menyatakan diri bukan penganut Kristen. Kehadiran mingguan pada tahun 2004 adalah sekitar 1,5 juta umat: kira-kira 7,5% populasi. Sedangkan agama atau aliran kepercayaan Australia yang paling awal dimulai adalah penduduk Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres, yang telah mendiami Australia selama antara 40.000 dan 60.000 tahun. Penduduk Asli Australia memiliki tradisi agama dan nilai-nilai rohani yang unik.

3. Dominasi Budaya Eropa

Dengan masuknya imigran Eropa ke Australia, budaya Barat sangat memengaruhi bagaimana budaya di Australia. Sejak tahun 1788, basis budaya Australia didominasi budaya Barat Anglo-Keltik. Selain itu, Australia memiliki keunikan

dengan masih bertahannya budaya yang muncul dari lingkungan alami. Budaya inilah budaya asli Australia. Namun pada perkembangannya, sejak pertengahan abad ke-20, budaya populer Amerika Serikat telah memengaruhi Australia melalui televisi dan film bioskop. Tidak hanya budaya Barat, Australia juga dipengaruhi budaya-budaya yang datang dari negara Asia. Budaya-budaya ini masuk melalui imigrasi besar-besaran dari negara yang tidak berbahasa Inggris ini. Dengan komposisi budaya Australia yang beragam ini, maka Australia memang sangat cantik dilihat kepaduannya.

Penduduk asli Australia, Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres, adalah pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua dunia yang masih langgeng. Mereka telah berdiam di Australia selama lebih dari 40.000 tahun dan mungkin hingga 60.000 tahun. Penduduk Australia lainnya adalah migran atau keturunan migran yang tiba di Australia dari sekitar 200 negara sejak Inggris mendirikan pemukiman Eropa yang pertama di Sydney Cove pada 1788.

Para imigran ini telah memperkaya hampir setiap aspek kehidupan Australia, termasuk budaya masyarakat. Para imigran masuk dan beradaptasi dengan masyarakat Australia yang toleran, informal, dan secara garis besar egalitarian. Walaupun Australia memiliki kejajemukan budaya penduduknya, namun seluruh masyarakat menyadari bahwa adanya komitmen yang mendasar dan menyatu atas nama Australia.

Dalam kerangka hukum Australia, seluruh penduduk Australia berhak untuk mengungkapkan kebudayaan dan kepercayaan dan untuk ambil bagian dengan bebas dalam kehidupan nasional Australia. Pada saat yang sama, setiap orang diharapkan untuk menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama yang menyokong cara hidup Australia. Prinsip

dan nilai yang menjadi budaya masyarakat Australia adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati kesetaraan nilai, kehormatan, dan kebebasan individu.
- b. Kebebasan berbicara dan berserikat.
- c. Kebebasan beragama dan pemerintah sekuler.
- d. Dukungan atas demokrasi-parlementer dan negara hukum.
- e. Kesetaraan di bawah hukum.
- f. Kesetaraan pria dan wanita.
- g. Kesetaraan kesempatan.
- h. Kedamaian.
- i. Semangat egalitarianisme yang mencakup toleransi, saling hormat-menghormati dan rasa kasih sayang kepada mereka yang sedang dalam kesulitan.

Australia juga memiliki keyakinan teguh bahwa tak seorang pun boleh dirugikan hanya karena perbedaan negeri kelahiran, warisan budaya, bahasa, jender, atau agama mereka. Secara umum, masyarakat Australia adalah masyarakat egalitarian. Ini tidak berarti bahwa setiap orang sama atau memiliki kekayaan atau harta yang setara. Namun ini berarti bahwa tidak ada perbedaan kelas yang formal atau mendarah daging pada masyarakat Australia, seperti di negara-negara lain. Ini juga berarti bahwa dengan kerja keras dan tekad, orang tanpa koneksi tingkat tinggi atau patron yang berpengaruh dapat mewujudkan ambisi masyarakat Australia. Tingkat pengangguran secara relatif rendah (4,3 persen pada Desember 2007) dan pendapatan per kapita bruto sekitar \$39.000. Seluruh warga setara di bawah hukum di Australia dan seluruh warga Australia memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan secara wajar.

Kehidupan Australia pada dasarnya sangat kental Budaya Barat namun Australia memiliki kekhasan tersendiri dalam bersosialisasi. Penduduk Australia selain egalitarian, juga dikenal sebagai penduduk yang sangat taat hukum dan percaya terhadap pihak berwenang sebagai penegak hukum. Sehingga inilah yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman di negerinya. Pandangan lain terhadap penduduk Australia adalah bahwa penduduk Australia itu informal, terbuka dan langsung mengatakan apa yang dimaksudkan. Masyarakat juga dipandang sebagai orang yang percaya pada prinsip memberi orang lain kesempatan secara adil dan membela sahabat mereka, yakni mereka yang kurang beruntung dan lemah.

4. Australia Masa Kini yang Modern

Di abad ke-20 ini, satu bagian dari budaya dan sejarah Australia yang kurang dikenal mulai muncul dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas, khususnya melalui seni, sastra, dan film. Sebagai akibatnya, ikon 'battler' menjadi semakin kurang relevan. Para imigran membawa kisah, budaya, dan mitos untuk berbaur dengan kalangan kolonial Australia. Lama-kelamaan para pendatang tersebut membaaur membentuk budaya baru dalam bingkai *melting pot* seperti yang digambarkan dalam kartun berikut ini. Juga ada pengakuan yang sudah lama ditunggu, yaitu Aborigin Australia merupakan fundamental dari definisi sejati budaya nasional masa kini.



Para pendatang membentuk bangsa Australia yang melting pot

"Impian Besar Australia" yaitu memiliki rumah, yang dimulai di masa keemasan di tahun 1950-an, terus berlanjut dan menghasilkan suburbanisasi besar-besaran di kota-kota Australia, khususnya di Sydney dan Melbourne. Arsitektur Australia masa kini sebenarnya tidak memiliki gaya yang khas, dan tren dari Eropa seringkali mendominasi proyek-proyek pembangunan besar. Dalam banyak hal, bangunan modern yang paling menarik sebenarnya merupakan daur ulang bangunan bergaya Victoria atau dari era lainnya. Meskipun demikian tetap ada pengecualian, dan yang terkenal antara lain *Convention Centre di Darling Harbour Sydney*, *Melbourne Museum*, serta *Cultural Centre di Uluru-Kata Tjuta National Park* di bagian tengah Australia, yang didesain sesuai konsultasi dengan dengan pemilik tradisional cagar alam tersebut. Kompleks *Federation Square Melbourne*, dengan bentuk geometriknya yang tajam, mencerminkan arsitektur modern yang penuh tantangan, tepat di jantung kota.



Darling Harbour Sydney



Uluru-Kata Tjuta National Park

Sehatnya perekonomian saat ini terbukti dari dolar Australia yang relatif tinggi, peningkatan perdagangan dengan China dan beberapa keuntungan yang tinggi dan mencetak rekor pada bisnis-bisnis setempat. Semua ini dibarengi dengan inflasi dan angka pengangguran yang rendah. Namun, di sisi negatifnya adalah meningkatnya defisit perdagangan negara sampai \$20 miliar, hutang rumah tangga rata-rata yang melonjak tinggi dan harga perumahan di pusat urban yang semakin tak terjangkau.

Lambing Flat Riots

The discovery of gold in New South Wales from the early 1850s saw a huge influx of migrants in search of instant wealth. The primary result of the gold rush was that the economy boomed and for a short time gold outstripped wool as the Colony's primary export. Many of the people who came in search of gold were Chinese men. Drawn from their home villages mainly in Kwangtung Province by the first gold rushes in Victoria, California and New south Wales in the 1850s they usually arrived in organised groups of 30 -100 men. In 1861 there were about 13,000 Chinese in New south Wales with the majority 12,200 on the gold fields. Throughout the 19th century Chinese arrivals continued to the regions of New south Wales associated with mining, replacing those who had returned home or left for opportunities elsewhere.

The Chinese diggers moved from goldfield to goldfield within New south Wales and across the border. Constantly on the move, their presence and experience are evidenced mainly from the observations and interpretations of Europeans, from archaeological digs and from objects saved by families and community members. There are few written accounts and sources from a Chinese perspective. The Chinese attracted particular attention and local newspapers were quick to comment on their distinctive features, clothes, languages and habits – especially their tendency to travel en masse, their methods of transport, their diligence, tirelessness and productivity. Any admiration of their work ethic was offset by envy and resentment when times got hard. The Chinese were often scapegoated by disgruntled European miners as seen in the violent anti-Chinese riots at Taran (1853), Merbo (1854) Rocky River (1856) Tambaroora (1858) Lambing Flat, Kiandra and Nundle (1860 and 1861) and Tingha tin fields (1870). They

were seen initially as oddities, later as rivals and then as threats to white Australia.



Chinese in Lambing Flat riots, December 1861. Courtesy National Archives of Australia

A report in mid 1861 that 1,500 Chinese had landed in Sydney bound for Lambing Flat, in central New South Wales, alarmed many miners who were doing it tough and saw the Chinese as a threat to their prosperity. With no troopers stationed at Lambing Flat to control the situation, the miners formed into a large a mob with the call 'roll up', in June 1861, the worst anti-Chinese riots in Australian history occurred at Lambing Flat that resounded throughout Australian political and cultural history. Three thousand miners amassed to move the Chinese off the goldfield. A militant mob took over the meeting of miners assembled at All and Ale pub at Tipperary Gully. The drunken mob headed by a brass band then began the march to Lambing Flat, with two men carrying the banner at the front of the procession.

On reaching Lambing Flat, the procession made for the Chinese camp. The mob set upon the Chinese, assaulting them,

while their pistols were cut off. The Chinese miners' tents, clothing and furniture were set on fire and their mining tools destroyed. The procession moved on to the Back Creek Chinese camp five miles further on, and again carried out assaults and damaged tents and mining equipment. The Lambing Flat Miner newspaper, estimated the value of property destroyed at 3000 pounds. When all had been destroyed, the band formed up and the procession headed back to camp.



Lambing Flat Riot 1861; 'Might versus Right', S.T. Gill, c.1862 - 1863.
Courtesy State Library of New South Wales

The banner used in the riot created a symbol that began to crystallise the ideologies of racism, nationalism and exclusive egalitarianism in a conceptual process that would manifest itself in the New South Wales Chinese Immigration Act of 1861 and later the Federal Immigration Restriction Act of 1901. The banner's historic significance lies in its relationship to the themes of the gold rush experience, racial antagonism, the fear of the exotic and unknown, and exclusive ideologies that fostered racially discriminatory trade unionism and the

development of Colonial policies culminating in the first act of the newly Federated Commonwealth of Australia, the Immigration Restriction Act 1901. The banner has aesthetic significance in the design, language and the appropriation of the Southern Cross emblem as a symbol of racially exclusive working class rights and trade union solidarity in nineteenth century Australia. This symbolism and language has persisted into contemporary labour movement culture. The Southern Cross emblem, like the Australian flag, is also often used in times of perceived crisis by extreme right wing racist political groups.
<http://www.migrationheritage.nsw.gov.au>

BAB III

PROSES PEMBENTUKAN KONSTITUSI

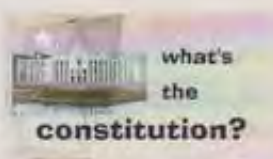
Pengantar

Konstitusi Australia merupakan dasar hukum dari segala hukum yang berlaku di Australia. Segala ketetapan atau peraturan yang dibuat oleh anggota perlemen tidak sah jika bertentangan dengan konstitusi tersebut. Segala sesuatu yang terdapat di dalam konstitusi akan bersifat mengikat setiap orang di Australia termasuk Parlemen Persemakmuran maupun Parlemen masing-masing negara bagian. Penyusunan Konstitusi Australia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara bekas Koloni Inggris lainnya. Keunikan tersebut dapat dilihat pada bentuknya yang tertulis.

Makna Konstitusi

Kata konstitusi merupakan landasan atau dasar berdirinya suatu negara. Sebagai landasan negara maka di dalam konstitusi akan mencakup berbagai elemen peraturan yang digunakan sebagai pendukung

eksistensi negara. Konstitusi juga sebagai pedoman bagi para politisi dan penyelenggara lembaga politik negara dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Dalam khasanah ilmu politik, konstitusi merupakan sesuatu yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar (UUD) yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Peraturan



tersebut ada yang bentuknya secara tertulis sebagai hasil keputusan dari badan berwenang dalam negara. Ada juga peraturan tidak tertulis yang tetap digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat seperti dalam norma, nilai, kebiasaan, dalam adat istiadat, dan konvensi masyarakat.

Secara etimologis, konstitusi berasal dari bahasa Latin *Constitutio*. Dalam bahasa Inggris disebut *Constitution* dan dalam bahasa Belanda disebut *Constitutie*, dalam bahasa Prancis disebut *Constitution* dan bahasa Jerman adalah *Konstitution*. Jika dikaitkan dengan ketatanegaraan, konstitusi merupakan Undang-Undang Dasar, Hukum Dasar, atau susunan badan. Dalam perkembangannya, konstitusi mempunyai dua pengertian yakni pengertian luas dan sempit. Untuk pengertian luas, konstitusi merupakan keseluruhan yang ada dalam hukum dasar atau ketentuan dasar dalam suatu negara. Secara sempit, konstitusi merupakan piagam atau Undang-Undang Dasar sebagai dokumen lengkap yang berisi peraturan kenegaraan.

Dari uraian tersebut di atas jelas menyebutkan bahwa konstitusi yang tertulis atau yang disebut dengan UUD mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran pada saat dibuat. UUD juga merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual pada masa pembuatannya. Sehingga hasilnya adalah segala ketentuan yang terdapat di dalam UUD tidak lekas usang dan dapat mengikuti perkembangan zaman meskipun hanya garis besarnya saja. Hal ini disebabkan karena pertama, masyarakat terus mengalami perkembangan secara dinamis; kedua, para penyusun UUD tidak akan mampu melihat jauh ke depan segala hal yang dimuat dalam isi UUD.

UUD sebagai undang-undang tertulis juga sering disebut sebagai undang-undang bernaskah atau *codified constitution*. Sedangkan undang-undang tidak tertulis sering disebut dengan *uncodified constitution* atau undang-undang tidak bernaskah.

Sebenarnya perbedaan ini bukan sebagai perbedaan praktis yang dapat digeneralisasikan. Hal ini didasarkan pada fakta yang ada bahwa sampai sekarang hanya Inggris dan negara-negara persemakmurnya kecuali Australia serta Israel saja yang mempunyai undang-undang tidak tertulis. Namun secara ilmiah tidak ada undang-undang yang seratus persen tidak tertulis ataupun seratus persen tertulis. Misalnya konstitusi AS merupakan naskah namun di sisi lain telah timbul konvensi yang pada hakikatnya telah mengubah beberapa asas pokok dari UUD tersebut.

Demikian juga dengan konstitusi Inggris yang bukan merupakan naskah secara keseluruhan sebab masih ada beberapa dokumen tertulis seperti *Magna Charta* 1215 (ditandatangani oleh Raja John karena desakan dari pihak bangsawan sebagai pengakuan raja terhadap hak dari bangsawan bawahannya), *Bill of Rights* 1689 dan *Act of Settlement* 1701 (keduanya merupakan hasil kemenangan parlemen terhadap Raja-Raja Dinasti Stuart karena meniadakan kedaulatan dari tangan raja ke parlemen), *Parliament Acts* 1911 dan 1949 (bertisi pembatasan kekuasaan Majelis Tinggi atau *House of Lords* dan menetapkan supremasi Majelis Rendah atau *House of Commons*) dan sebagainya.



Pigami Magna Carta

Sebagai tambahan bahwa di Inggris tidak ada perbedaan antara undang-undang tata negara dengan undang-undang biasa. Sebab, parlemen sebagai badan tertinggi (*parliamentary supremacy*) mempunyai hak untuk mengadakan perubahan konstitusional dengan undang-undang biasa. Hal ini tentu saja akan berbeda dengan keadaan di kebanyakan negara bahwa suatu badan yang lebih tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk mengubah UUD. Jadi UU Inggris disebut tidak tertulis karena tidak sebagai naskah tunggal namun konvensi dan tradisi memegang peranan penting daripada di negara lain yang UUD-nya tertulis.

Konvensi-konvensi yang berperan penting dalam ketatanegaraan Inggris tersebut sudah merupakan tradisi ratusan tahun sehingga sudah mendarah daging. Beberapa konvensi yang penting adalah:

1. Prinsip tanggung jawab politik yang merupakan tulang punggung sistem pemerintahan Inggris yakni bahwa kabinet yang tidak mendapat kepercayaan dari sebagian besar anggota Majelis Rendah harus mengundurkan diri.
2. Jika kabinet mengundurkan diri maka Raja pertama-tama memberi kesempatan kepada pemimpin partai oposisi untuk membentuk kabinet baru.
3. Sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Majelis Rendah, PM dapat meminta raja untuk membubarkan majelis tersebut dan mengadakan pemilu baru. Persejisan antara kabinet dan parlemen pada tahap terakhir dipuriskan rakyat.
4. PM merupakan anggota Majelis Rendah.

Konvensi secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum namun tetap ditaati disebabkan karena faktor praktisnya. Contohnya, ketika pemimpin partai oposisi diberi hak untuk membentuk kabinet baru sebagai pengganti kabinet lama yang telah mengundurkan diri bukan pemimpin partai lain dikhawatirkan orang tersebut tidak mendapat dukungan dalam parlemen sebab

biasanya hanya ada dua partai besar dalam pemerintahan. Sebab lainnya adalah bahwa aturan tersebut sudah didukung dan dianggap wajar oleh rakyat. Banyak juga konvensi yang dikodifikasi atau dituangkan dalam bentuk UU sehingga diperkirakan pada masa mendatang jumlah konvensi akan berkurang. Antara lain adalah *Statute of Westminster* (1931) yang menetapkan kedudukan dari dominion-dominion dalam Persemakmuran Inggris secara resmi meskipun negara-negara dominion tersebut telah lama menjadi anggota Persemakmuran. Misalnya, Australia, Malaysia, India, dan sebagainya.

Proses Pembentukan Konstitusi Australia

Konstitusi Australia didefinisikan sebagai *'the birth certificate of a nation'*. Konstitusi ini berisi dasar peraturan negara Australia dan mengikat kepada semua pihak termasuk parlemen di Negara Commonwealth maupun di tiap negara bagian, negara bagian juga memiliki konstitusinya sendiri. Konstitusi ini dirancang sejak tahun 1900 yang kemudian disahkan oleh Parlemen Inggris dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1901. Konstitusi Australia hanya dapat diubah melalui referendum.

Proses pembentukan konstitusi Australia pada mulanya bukan karena keputusan dari pemerintah Inggris sebagai pelindung semua persemakmuran. Pembentukan konstitusi justru dilandasi pada keinginan dari koloni-koloni yang ada. Adapun tujuan awal dari pembentukan konstitusi adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan bersama dari masing-masing koloni. Harapan tersebut kemudian dibicarakan oleh semua koloni yang ada pada tahun 1891. Hal ini dilaksanakan mengingat masing-masing koloni telah mempunyai pemerintahan dan parlemen sendiri meskipun dalam tahap sederhana.

Perbedaan tersebut terlihat pada pelaksanaan kebijakan ekonomi, politik dan luar negerinya sehingga terkadang terjadi tumpang tindih. Misalnya penduduk yang berdagang dengan

penduduk dari koloni lain akan menghadapi kendala karena kebijakan pemerintahnya berbeda satu dengan yang lain. Dengan kebijakan pemerintah koloni yang berbeda dapat mengakibatkan timbulnya benturan atau konflik kepentingan meskipun masih dapat diselesaikan dalam meja perundingan. Meskipun masing-masing koloni memiliki karakteristik pemerintahan sendiri namun masih memiliki persamaan yakni menganut sistem pemerintahan *Westminster (Westminster System of Government)* yang diterapkan di Inggris.

Dengan perbedaan-perbedaan penerapan kebijakan pemerintah koloni terhadap masyarakatnya yang berimbas pada munculnya pergesekan menimbulkan kekhawatiran dari Kerajaan Inggris. Melalui perwakilannya (Gubernur Jenderal) yang berkuasa sebagai perpanjangan tangan pemerintah Inggris secara perlahan diadakan dialog bersama untuk mencapai kesepakatan akan satu tujuan. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah Inggris agar koloni-koloni yang ada di Australia dapat bersatu. Akhirnya suatu bangsa Australia sudah dirintis sejak tahun 1952 ketika koloni-koloni mulai membentuk pemerintahan sendiri. Semula New South Wales menguasai hampir semua bagian timur benua

Kata sepakat dan kesatuan dari seluruh pemerintah koloni didasarkan pada beberapa harapan:

1. Melindungi dan meningkatkan perekonomian Australia melalui kebijakan pengetatan keuangan. Hal ini disetujui oleh Inggris dengan mendirikan Bank Persemakmuran (*Commonwealth Bank*).
2. Dengan dibentuknya kesatuan dari semua koloni berarti dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah secara keseluruhan. Dalam berbagai waktu negara-negara besar (Jerman, Rusia, Prancis, dan Jepang) menunjukkan kepentingan untuk mendirikan semacam koloni serupa di pulau-pulau sekitar Australia.

3. Melindungi kepentingan masing-masing koloni. Diharapkan dengan terlindunginya kepentingan masing-masing koloni, maka koloni yang mempunyai sumber daya alam melimpah dan unggul dalam pendapatan (kaya seperti New South Wales dan Victoria) tidak "mengambil jatah" koloni miskin (Tasmania).
4. Memajukan koloni terutama bagi koloni-koloni yang tidak mempunyai sumber daya alam dan manusia yang kompeten.
5. Berkaitan dengan masalah pembatasan imigrasi. Kenyataan menunjukkan bahwa dari koloni-koloni yang ada belum mampu memberikan perlindungan terhadap kaum buruh.
6. Membentuk pemerintahan yang bersifat nasional. Pemerintah nasional tersebut sebagai pelindung dan pengkoordinir bagi semua warga negara guna mengantisipasi terjadinya berbagai masalah yang ditimbulkan dampak multikultur.
7. Berkaitan dengan nasionalisme yang belum terbangun mengingat penduduk yang sangat variatif. Pada waktu itu muncul perasaan bahwa Australia perlu membangun jati diri dan nasionalisme dan bangga sebagai bangsa dan negara Australia yang satu.

Dari ketujuh hal tersebut jelas menunjukkan adanya pengikisan terhadap egoisme dan *chauvinisme* yang sempit. Nasionalisme sebagai satu bangsa Australia terlihat lebih menonjol guna mencapai kemajuan dan perkembangan negara. Pembangunan jati diri dan nasionalisme juga dimaksudkan untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang stabil, aman, damai, dan makmur. Setiap warga negara dari berbagai latar belakang diharapkan mau menjunjung tinggi nilai dan prinsip bersama yakni:

1. rasa hormat terhadap nilai, martabat dan kebebasan setiap orang,
2. kebebasan berbicara,

3. kebebasan beragama dan pemerintahan sekuler;
4. kebebasan berserikat,
5. dukungan terhadap demokrasi parlementer dan peraturan hukum,
6. kesetaraan di hadapan hukum,
7. kesetaraan pria dan wanita,
8. kesetaraan kesempatan,
9. kedamaian, dan
- 10 semangat egalitarianisme yang menganut toleransi, saling menghormati, dan kasih sayang bagi mereka yang membutuhkan.

Dengan demikian, tujuan utama dari perumusan konstitusi adalah untuk membentuk suatu pemerintahan nasional yang mampu melindungi kepentingan masing-masing koloni. Pada saat yang sama, konstitusi juga mampu melestarikan basis kekuasaan koloni terhadap masyarakatnya. Sehubungan dengan keinginan kuat dari koloni untuk merumuskan sebuah konstitusi, pemerintah Inggris mengirimkan seorang utusannya yang bernama Sir Henry Parkes sebagai menteri dalam Pemerintahan Koloni New South Wales.

Parkes diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari koloni terutama untuk menghindari perpecahan. Dalam benak Parkes, permasalahan koloni akan selesai jika ada pembagian kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif secara jelas sehingga perlu diadakan konvensi. Konvensi konstitusi pertama kali diadakan pada tahun 1891 dengan menghadirkan perwakilan dari keenam koloni dan utusan Selandia Baru. Konvensi pertama tersebut belum membuahkan hasil dikarenakan oleh egoisme masing-masing koloni. Para delegasi yang hadir ternyata belum sepenuhnya menerima secara didilaksanakan pembagian kekuasaan. Artinya pemerintah setiap koloni masih menghendaki kekuasaan yang seluas-luasnya atas koloninya demi kepentingan dan kepuasan individu atau kelompok.

Pada tahun 1893-1896 telah diadakan beberapa kali pertemuan di antara para tokoh dari setiap koloni. Pertemuan tersebut pada hakikatnya menghendaki agar terbentuk sebuah pemerintahan federal yang mencakup seluruh koloni. Dari beberapa kali pertemuan akhirnya berhasil menyelenggarakan konvensi konstitusi kedua pada tahun 1897/1898. Konvensi kedua ini dihadiri oleh perwakilan koloni kecuali Australia Barat yang masih berusia muda. Para delegasi ini sekaligus diberi tanggung jawab untuk merumuskan draft konstitusi. Dalam konvensi kedua ini, Selandia Baru tidak mengirimkan perwakilannya karena telah memutuskan untuk membentuk negara baru yang terpisah dari Australia dengan bentuk kesatuan.

Dalam konvensi kedua ini pun, kesulitan-kesulitan masih muncul. Kesulitan tersebut terutama berkenaan dengan keinginan dari beberapa koloni untuk memelihara ikatan dengan Ratu Inggris padahal di sisi yang lain juga berkeinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab. Persoalan berikutnya berkisar tentang pembagian kekuasaan antara kekuasaan federal dengan kekuasaan koloni. Tidak semua koloni dapat menerima pembagian kekuasaan dengan menyerahkan kekuasaan koloni kepada pemerintah federal yang akan terbentuk. Harapannya adalah terbentuknya pemerintahan federal yang efektif dengan tetap memelihara kekuasaan dan identitas koloni yang selanjutnya disebut dengan negara bagian. Selanjutnya adalah keharusan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan kepentingan antara koloni kaya dan berpenduduk padat (Victoria dan New South Wales) dengan koloni miskin yang berpenduduk minim (Tasmania).

Selain persoalan-persoalan tersebut juga masih diperumit dengan adanya perbedaan latar belakang dari para delegasi. Delegasi yang berpandangan liberal mengharapkan terbentuknya pemerintahan yang dapat memberikan perubahan dan memberikan perwakilan yang luas kepada masyarakat. Delegasi dari koloni kaya mendambakan terbentuknya konstitusi dan pemerintah federasi

yang dapat melindungi kepentingan mereka. Caranya adalah dengan membatasi jumlah pemilih atau pembatasan hak pilih dan kekuasaan pemerintah federal. Sementara, wakil dari koloni-koloni miskin jelas mengharapkan terbentuknya konstitusi dan pemerintah federal yang dapat melindungi koloninya dari kemungkinan terjadinya dominasi dan "penindasan" dari koloni-koloni besar.

Di balik perbedaan dan kesulitan untuk mempertemukan pandangan dan harapan yang beraneka ragam tapi secara umum menunjukkan adanya kesamaan. Kesamaan tersebut berkaitan dengan keinginan untuk membentuk konstitusi dan pemerintahan federal yang memiliki sedikit kekuasaan namun bisa melindungi semua koloni secara adil dan merata. Dari konvensi kedua tersebut akhirnya dapat merumuskan sebuah naskah konstitusi yang diberi nama *Commonwealth Constitution of Australia* atau Konstitusi Federal. Dalam Konstitusi Federal terdapat pembagian kekuasaan antara kekuasaan koloni yang selanjutnya disebut negara bagian dan kekuasaan federal. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah federal mencakup pertahanan keamanan, urusan luar negeri, perbankan, mata uang, pos dan telegraf, dan arbitrase dalam sengketa antarnegara bagian. Selebihnya kekuasaan tetap dipegang dan dikuasai oleh pemerintah negara bagian.

Secara garis besar terdapat tiga bagian kekuasaan yang dipegang oleh masing-masing pemerintah, yakni kekuasaan eksklusif (*exclusive powers*) merupakan kekuasaan yang diselenggarakan oleh pemerintah federal, kekuasaan bersama (*concurrent powers*) merupakan kekuasaan yang pelaksanaannya berbagi antara parlemen atau pemerintah federal dengan parlemen atau pemerintah negara bagian, dan kekuasaan tersisa (*residual powers*) sebagai kekuasaan yang hanya diselenggarakan oleh parlemen atau pemerintah negara bagian.

Secara keseluruhan dan menasar menunjukkan bahwa Konstitusi Australia menyepakati penyatuan kepentingan negara-negara bagian dalam sebuah negara federal. Rancangan konstitusi tersebut kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk disahkan. Pengesahan rancangan konstitusi dilakukan melalui referendum. Dalam referendum pertama pada bulan Juni 1899 rancangan konstitusi belum mendapat suara mayoritas masyarakat. Selanjutnya referendum kedua pada bulan Juli 1900 mendapat suara mutlak dari keenam koloni. Referendum kedua tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pemerintah federal. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1901 naskah konstitusi disahkan oleh Parlemen Inggris dengan tergabungnya enam koloni yang memiliki otonomi penuh. Keenam koloni tersebut juga secara resmi tergabung dalam Pemerintah Persemakmuran (Federasi) Australia.

Isi Konstitusi Australia

Seperti halnya dengan konstitusi tertulis pada umumnya, Konstitusi Australia terdiri dari beberapa bab. Masing-masing bab berisi rangkaian aturan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi Australia terdiri dari delapan bab. Bab pertama berisi tentang parlemen; bab kedua berisi aturan-aturan penyelenggaraan pemerintahan eksekutif; bab ketiga mengenai masalah peradilan. Selanjutnya pada bab empat berisi mengenai keuangan dan perdagangan; bab kelima tentang negara-negara bagian; bab keenam mengenai kemungkinan terbentuknya negara-negara bagian baru. Pada bab ketujuh berisi tentang aturan lain-lain dan terakhir, bab delapan berisi perubahan konstitusi.

Jika ditelaah lebih lanjut, bab satu sampai empat dari konstitusi menunjukkan sebagai bagian yang sangat esensial. Bagian tersebut berkaitan dengan pembentukan negara federal. Bab satu meliputi hampir setengah dari keseluruhan konstitusi yakni terdiri dari 60 pasal yang menyetengahakan tentang parlemen. Bab ini terbagi menjadi lima bagian yakni bagian pertama tentang penjelasan

umum parlemen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Bagian pertama ini berkaitan tentang jabatan gubernur jenderal dan sidang parlemen. Pasal 1 menyatakan bahwa UU harus disahkan oleh parlemen yang terdiri dari Ratu, Majelis Tinggi (Senat), dan Majelis Rendah (*House of Representatives*). Pasal 11 berisi tentang penjelasan mengenai posisi gubernur jenderal sebagai wakil dari Ratu Inggris. Dalam pasal ini juga menyatakan bahwa Ratu Inggrislah yang mengangkat gubernur jenderal melalui konvensi berdasarkan saran dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Pasal VI menyatakan bahwa parlemen harus bersidang setiap tahun. Persidangan harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 hari setelah berakhirnya pemilu.

Bagian kedua mengenai Majelis Tinggi atau Senat. Pada pasal 7-16 menjelaskan tentang pemilu yang harus diselenggarakan untuk posisi anggota Senat (Senator). Pasal 17, 18 dan 22, 23 berisi penjelasan tentang cara-cara senator melaksanakan tugasnya. Untuk penjelasan tentang masa jabatan, penempatan, dan pengunduran diri senator dapat dilihat pada pasal 19 dan 21.

Bagian ketiga berisi penjelasan tentang Majelis Rendah atau *House of Representatives (HoR)*. Antara lain adalah pemilu untuk memilih anggota *HoR* untuk masa jabatan tiga tahun serta prosedur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dalam pasal 24 dijelaskan tentang jumlah anggota *HoR* sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota Senat. Bagian keempat berisi tentang hal-hal yang memengaruhi kedua majelis. Pada pasal 41 dijelaskan tentang hak-hak pemilih serta kualifikasi atau diskualifikasi anggota kedua majelis pada pasal 43-46. Pasal 47 mengenai sengketa dalam pemilu, pasal 49 tentang hak-hak istimewa parlementer. Untuk pasal 50 berisi mengenai ketentuan yang mengizinkan kedua majelis untuk membuat peraturan tata tertib atau yang disebut dengan *Standing Order*.

Bagian kelima sekarang akan menjadi pusat dari keseluruhan isi konstitusi. Secara umum, dalam bagian ini menjelaskan tentang distribusi kekuasaan antara:

1. pemerintah pusat (nasional/federal) dengan pemerintah negara bagian.
2. *HoR* dan Senat.

Pasal 51 menjelaskan tentang kekuasaan yang dimiliki oleh parlemen federal. Dalam kekuasaan tersebut secara rinci tertulis tentang perundang-undangan dalam bidang-bidang yang terurai sebanyak 40 ayat. Bidang-bidang tersebut meliputi perdagangan dan pertiagaan antarnegara bagian dan luar negeri, pelayanan jasa, pos dan telegraf, pertahanan, dan mata uang. Sebagian besar bidang yang terurai dalam pasal ini dikategorikan sebagai bidang kekuasaan eksklusif parlemen federal dan beberapa lainnya dikategorikan sebagai kekuasaan bersama antara parlemen federal dan negara bagian. Untuk bidang-bidang yang tidak disebutkan dalam pasal ini diklasifikasikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh parlemen negara bagian. Perlu diketahui bahwa konstitusi juga menyediakan jalan keluar atau solusi ketika terjadi sengketa perundang-undangan antara negara bagian dan federal dalam wilayah di mana parlemen federal melaksanakan kekuasaan bersama dengan parlemen negara bagian. Hal ini dapat dilihat pada pasal 109 yang menyatakan bahwa bila terjadi sengketa dalam wilayah yang menjadi kekuasaan federal dan negara bagian, hanya *UD* federal yang berlaku. Segala perbedaan pendapat dan ketidakpastian lainnya dalam persengketaan tersebut diserahkan kepada keputusan Pengadilan Tinggi.

Pasal 52 berisi mengenai kekuasaan eksklusif parlemen federal di wilayah ibukota nasional serta pengawasan terhadap pejabat publik. Pasal 53 menegaskan bahwa parlemen berhak mengesahkan suatu *UD* serta membatasi kekuasaan Senat. Senat tidak dapat mengajukan atau mengubah *RUU* mengenai keuangan serta *budget*

yang disebut sebagai RUU *supply* dan *appropriation* (perpajakan). Senat hanya dapat menyetujui atau menolak RUU sebagaimana tersebut di atas. Pasal 53 dan 54 menjelaskan bahwa RUU *appropriation* dan perpajakan tidak boleh berhubungan dengan subjek lainnya. Pasal 57 menyatakan bahwa bila terjadi kemacetan di antara kedua majelis maka kedua majelis harus dibubarkan atau disebut dengan *double dissolution* (pembubaran ganda). Bab ini diakhiri dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan bagaimana gubernur jenderal memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU yang telah disahkan parlemen (pasal 58 - 60).

Bab dua berisi ketentuan dari pemerintahan eksekutif seperti mengenai kedudukan gubernur jenderal dan dewan eksekutif dari pemerintah federal. Keluasan eksekutif federal berada di tangan Ratu Inggris dan gubernur jenderal sebagai perwakilannya di Australia, dalam pasal 61. Dua pasal berikutnya berisi mengenai wewenang gubernur jenderal untuk mengangkat dan membentukkan dewan eksekutif serta memberikan saran. Dewan eksekutif juga membentuk departemen dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab terhadap departemen-departemen tersebut (pasal 64). Pada pasal 68 berbunyi bahwa gubernur jenderal adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan berhak menetapkan pengalihan beberapa departemen dari negara bagian pada pemerintah federal.

Dari beberapa pasal yang ada ternyata ada yang menimbulkan keraguan dan perbadaan interpretasi. Hal ini terlihat pada pasal 62 misalnya, yang sebenarnya tidak bertujuan untuk menentang konvensi yang berlaku mengenai pemerintahan yang bertanggung jawab. Berdasarkan konvensi, segala keputusan eksekutif dibuat oleh kabinet dan perdana menteri kemudian disahkan oleh gubernur jenderal dalam posisinya sebagai dewan eksekutif. Dewan eksekutif yang memberikan saran kepada gubernur jenderal terdiri dari menteri-menteri pemerintahan yang secara formal dapat diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jenderal. Ini terjadi

manakala konvensi memberikan wewenang bagi partai mayoritas di *HoR* untuk memerintah namun dirusak oleh ketetapan konstitusi, sewaktu bersengketa dengan partai mayoritas di senat yang menolak RUU *supply*. Penolakan senat atas RUU *supply* diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya karena tidak memiliki anggaran penerimaan dan belanja. Sementara itu, pemerintah yang berkuasa tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam kondisi seperti ini, gubernur jenderal berhak menggunakan wewenangnya berdasarkan interpretasi harfiah atas isi konstitusi (*reserve powers* atau kekuasaan cadangan). Sesuai dengan pasal 62 maka Gubernur Jenderal Sir John Kerr memecat pemerintahan terpilih yakni PM Whitlam dan kabinetnya serta mengangkat *caretaker* sebagai penggantinya pada bulan November 1975.

Bab tiga menyetengahkan tentang peradilan. Isinya antara lain pembentukan pengadilan tinggi, kekuasaan parlemen untuk membentuk pengadilan federal (pada pasal 71). Pasal 72 tentang cara dan syarat bagi pengangkatan seorang hakim. Pasal 73 mengenai kewenangan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding baik yang diajukan dari pengadilan federal maupun negara bagian. Pengadilan tinggi selanjutnya berwenang menyetujui usulan banding yang diajukan kepada *privy council* di Inggris. Konstitusi juga memberikan yurisdiksi kekuasaan pengadilan tinggi yang sejati. Maksudnya adalah wilayah kekuasaan pengadilan tinggi untuk dapat mendengarkan perkara secara langsung dan bukan perkara banding yang tertuang dalam pasal 75-76. Selanjutnya mengenai pembatasan kekuasaan parlemen dalam hubungannya dengan yurisdiksi federal pada pasal 77-78. Pengadilan tinggi juga memberikan kemungkinan pengadilan dengan sistem juri atas dakwaan pelanggaran melawan pemerintah pada pasal 80.

Bab empat berisi tentang keuangan dan perdagangan yang dimulai dari pasal 81. Pada pasal ini sampai pasal 83 menjelaskan

tentang persyaratan mengenai cara mempertanggungjawabkan keuangan oleh pemerintah federal. Pasal penting lainnya adalah 87 mengenai seberapa besar uang yang dikumpulkan oleh pemerintah federal yang dikembalikan kepada negara bagian. Yaitu bahwa tiga perempat bagian diberikan kepada negara bagian untuk dikelola sendiri sedangkan sisanya dikelola pemerintah federal selama 10 tahun pertama federasi. Bab ini juga membahas peraturan lainnya mengenai penjaminan bahwa semua negara bagian diperlakukan secara adil oleh pemerintah federal serta memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah federal bea cukai dan perpajakan.

Berikutnya pada pasal 92 memberikan ketentuan tentang perdagangan bebas di wilayah Australia. Pasal 96 bahwa pemerintah federal boleh menghibahkan uang tambahan kepada negara bagian bila syarat-syaratnya dipandang cocok. Pada pasal 105, konstitusi mengizinkan pemerintah federal untuk mengambil alih hutang negara bagian. Dan pasal 105A, Konstitusi juga memperbolehkan pemerintah federal dan negara bagian untuk membuat perjanjian peminjaman uang yang ditambahkan setelah referendum 1928. Dalam penjelasan di atas menyebutkan bahwa antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian sudah diadakan perjanjian kerja sama. Dengan adanya keputusan Pengadilan Tinggi yang mengizinkan pemerintah federal untuk meningkatkan kontrol terhadap masalah keuangan di negara bagian menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan keduanya. Sampai tahun 1988, pasal 92 diinterpretasikan oleh Pengadilan Tinggi sebagai cara untuk membatasi pengawasan pemerintah federal terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan usahanya antarnegara bagian.

Bab lima menjelaskan bahwa semua bekas koloni otomatis menjadi negara bagian federasi Australia. Bab ini dimulai pada pasal 106 yang menjabarkan bahwa konstitusi yang sudah berlaku di negara bagian tetap dijalankan kecuali ada aturan-aturan tambahan yang dipengaruhi oleh konstitusi federal. Selain itu, pasal 107-108

menyatakan bahwa konstitusi federal tetap ingin mempertahankan kekuasaan parlemen dan UU negara bagian. Konstitusi federal tetap memberlakukan UU negara bagian yang tidak konsisten dengan UU federal (pada pasal 109). Pasal 111 menetapkan bahwa parlemen negara-negara bagian harus menyerahkan sebagian wilayahnya pada pemerintah federal. Walaupun begitu, negara bagian tetap berhak untuk memungut pajak untuk tujuan impor-ekspor. Hal ini dijelaskan pada pasal 112.

Pasal 113 menyatakan bahwa minum-minuman keras termasuk subjek UU negara bagian. Pasal berikutnya mengenai larangan terhadap negara-negara bagian untuk memiliki angkatan bersenjata serta memungut pajak atas harta benda federal tanpa seizin pemerintah federal. Pasal 115 menyatakan bahwa negara-negara bagian hanya boleh mencetak mata uang kertas bukan koin. Pasal selanjutnya adalah parlemen federal dilarang membuat UU tentang pembentukan agama atau melarang kebebasan beragama atau memaksakan percobaan atas agama. Penjelasan ini dilanjutkan pada pasal 117 bahwa di Australia tidak ada diskriminasi penduduk suatu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Pemerintah federal berhak dan wajib melindungi semua negara bagian dari invasi atau kekerasan domestik dan asing (pasal 118-119). Pasal 120 berisi negara-negara bagian berhak dan boleh melakukan penahanan terhadap orang-orang yang didakwa melakukan pelanggaran terhadap UU federal.

Bab enam yang dimulai dengan pasal 121 berisi tentang pendaftaran atau pembentukan negara-negara bagian baru ke dalam federasi. Pasal selanjutnya menegaskan bahwa pemerintah federal mempunyai kekuasaan penuh terhadap wilayah-wilayah yang sudah diserahkan oleh negara-negara bagian kepada pemerintah federal. Penyerahan ini termasuk kemampuan mereka untuk diwakili di dalam parlemen federal. Konstitusi juga mengatur cara-cara mengubah atau menentukan batas-batas negara bagian

atau negara-negara bagian yang baru dibentuk. Hal ini dijelaskan pada pasal 123-124.

Bab tujuh dimulai pada pasal 125. Pada pasal ini berisi mengenai lokasi kedudukan pemerintahan (*seat of government*) yang ketika konstitusi dibentuk berada di Melbourne kemudian dipindah ke Canberra (ibukota dari Australia *Capital Territory* atau ACT). Pasal 126 mengatur pemberian kewenangan kepada gubernur jenderal untuk mengangkat para wakilnya. Perlu dicatat bahwa ketika konstitusi terbentuk awalnya ada satu pasal lagi dalam bab ini yakni yang menetapkan bahwa kaum Aborigin tidak dihitung sebagai rakyat dari Persemakmuran Australia. Hal ini semula tercatat pada pasal 127 namun kemudian dihapus dari konstitusi sejak tahun 1967 melalui referendum. Bab delapan sebagai bab terakhir dan penutup dari konstitusi mengatur tentang perubahan konstitusi. Bab ini hanya terdiri dari satu pasal yakni pasal 128 yang menegaskan bahwa konstitusi dapat diubah melalui referendum.

Perubahan Konstitusi

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa konstitusi Australia dapat dimungkinkan diadakan perubahan melalui referendum. Perubahan tersebut menyangkut menambah, mengurangi ataupun menghapus pasal-pasal di dalamnya. Konstitusi juga telah memperhitungkan akan adanya perimbangan kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara-negara bagian. Hal ini telah ditunjukkan dalam berbagai pasal yang isinya memproteksi kekuasaan perluasan kekuasaan pemerintah federal atas negara bagian. Selain itu juga tentang perlindungan yang diberikan oleh pemerintah federal terhadap negara-negara bagian kecil dari dominasi negara-negara bagian yang lebih besar. Tidak lebih dari empat faktor yang memengaruhi perluasan peranan pemerintah federal sehingga memungkinkan untuk mengubah konstitusi. Empat faktor tersebut adalah:

1. Anggota parlemen setelah dipilih berkehendak untuk menggunakan kekuasaan yang tersedia: seorang politisi federal tidak perlu melihat latar belakang negara bagiaannya sebab biasanya akan membangun wawasan nasionalnya yang dipengaruhi oleh sikap dan kebijakan partainya. Ketika seseorang telah terjun ke dalam politik biasanya ia akan berusaha untuk meningkatkan karier politiknya maka dengan sendirinya ia akan memperluas kepentingan pemerintah federal.
2. Pemerintah federal akan selalu menanggapi berbagai tuntutan yang perlu melibatkan perluasan peranannya. Antara lain adalah memperbaiki pelayanan sosial, pengenaan tarif untuk melindungi produsen dari barang impor, bantuan bagi produksi Australia, tersedianya pelayanan kereta api yang tidak dapat diberikan oleh negara bagian. Otomatis semakin banyak tuntutan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh pemerintah federal, rakyat akan semakin menambah daftar tuntutan yang baru.
3. Semakin banyaknya perubahan sosial (perubahan pola dan masalah kehidupan) yang disebabkan oleh perkembangan teknologi sebenarnya menjadi sinyal bagi semakin meningkatnya intervensi pemerintah federal. Hal ini tidak dapat dipungkiri sebab dengan adanya teknologi baru membawa dampak pada pemerintah federal untuk membangun badan-badan (instansi) baru di tingkat federal.
4. Dengan adanya peningkatan sumber-sumber keuangan pemerintah federal telah menambah pula kekuasaan ekonomi yang melekat padanya. Misalnya tentang pertukaran mata uang, pajak, tarif atau perdagangan internasional. Dalam hal ini pemerintah federal dianggap sebagai satu-satunya badan yang mampu memberikan pengelolaan manajemen yang profesional. Selain itu pemerintah federal juga menjadi satu-satunya tingkatan pemerintahan yang dapat memenuhi berbagai tuntutan.

Konstitusi Australia dapat diubah oleh referendum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam bagian 128 dari Undang-Undang Dasar. Perubahan yang diusulkan pertama harus disetujui sebagai RUU oleh DPR federal. Perubahan tersebut kemudian dikirim ke Gubernur Jenderal untuk dikeluarkan surat perintah referendum. Untuk melakukan referendum parlemen, masyarakat Australia harus terlebih dahulu melakukan *voting*. Jika sebagian besar masyarakat di sebagian besar negara bagian dan sebagian besar masyarakat di seluruh Australia memilih 'ya', maka usulan konstitusi disepakati. Sejak 1906 ketika referendum pertama diadakan, Australia telah mengadakan 19 referendum dengan 44 permintaan amandemen namun hanya delapan perubahan telah disepakati.

Untuk selanjutnya tentang perubahan konstitusi sedikitnya ada tiga klausul yang harus dipenuhi. Pertama, usulan perubahan konstitusi harus mendapat persetujuan dari kedua majelis. Kedua, usulan tersebut diserahkan kepada para pemilih dalam sebuah referendum. Ketiga, bila rakyat memberikan persetujuan untuk mengadakan perubahan terhadap konstitusi, maka gubernur jenderal akan memberikan persetujuan untuk dibertakannya. Perlu diketahui bahwa untuk memperoleh keefektifan dalam menyelenggarakan referendum harus mendapat dukungan dari mayoritas pemilih di seluruh wilayah Australia. Selain itu dukungan juga didapat dari mayoritas pemilih di empat negara bagian. Ternyata perubahan konstitusi yang dikehendaki rakyat tersebut masih menemui kesulitan. Perlu dicatat bahwa selama 87 tahun diberlakukannya konstitusi 1901-1988 telah 42 kali diadakan referendum untuk mengubah beberapa pasal namun hanya delapan yang berhasil ditetapkan. Sepanjang sejarah, sebagian besar usulan perubahan konstitusi muncul ketika Partai Buruh (*Australia Labor Party*) berkuasa. Dari 27 usulan perubahan yang dilakukan oleh Partai Buruh hanya dua usulan yang berhasil memperoleh suara mayoritas penduduk. Sementara enam dari 15 usulan perubahan

yang diajukan koalisi Partai Liberal-Nasional mendapat persetujuan mayoritas rakyat Australia.

Pada tahun 1906, perubahan konstitusi menyangkut waktu pemilihan bagi para senator. Tahun 1910 dan 1928 tentang pengaturan pembayaran hutang-hutang negara-negara bagian. Tahun 1946 tentang perubahan pelayanan sosial. Berikutnya adalah mengenai status kaum Aborigin yakni pada tahun 1967. Pada tahun ini perubahan tersebut berkaitan mengenai pengalihan kekuasaan masalah Aborigin kepada pemerintah federal. Tiga referendum lainnya dihasilkan pada 21 Mei 1977 mengenai masalah pengisian kekosongan anggota-senat, hak pilih dalam referendum bagi teritori, dan usia pensiun bagi para hakim. Penggunaan referendum untuk mengubah konstitusi terkadang mendapat ganjalan dari rakyat negara-negara bagian kecil. Aiton Jinks dan Warhurst seperti dikutip oleh Zulkifli Hamid menyatakan bahwa umumnya rakyat dari negara-negara bagian kecil khawatir terjadinya pemusatan kekuasaan. Sebab, rakyat Australia yang sebagian besar keturunan dari British cenderung agak konservatif, cenderung menentang perluasan dan pembesaran kekuasaan pemerintah. Artinya mereka umumnya menentang penambahan kekuasaan pemerintah federal. Selain itu, referendum juga sering dikaitkan sebagai kelanjutan dari persaingan partai politik utama yang ada di Australia.

Akta Australia

Akta Australia dapat dikatakan sebagai naskah deklarasi kemerdekaan negara yang ditandatangani oleh Ratu Inggris pada tanggal 2 Maret 1986. Penandatanganan naskah oleh Ratu Elizabeth II tersebut menunjukkan kekuasaannya yang masih bertahan di Negara Kanguru. Ada beberapa maksud dari penandatanganan akta oleh Ratu Inggris yakni:

1. Akta diartikan sebagai naskah kemerdekaan. Di dalam akta telah dinyatakan berbagai peraturan mengenai kedudukan parlemen federal dan negara-negara bagian dengan status

Persemakmuran Australia sebagai negara merdeka, berdaulat, dengan bentuk federal.

2. Akta sekaligus menandai penyatuan dan persetujuan dari semua negara bagian untuk mengakui pemerintah federal sebagai pelindung dan perwakilan negara bagian di tingkat internasional.
3. Akta 1986 juga menandai berakadunnya lebih dari 200 tahun kekuasaan parlemen dan hukum tertinggi Kerajaan Inggris di Australia. Berarti, sebelum tanggal 2 Maret 1986, Australia tidak dianggap sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Terbentuknya pemerintahan dan parlemen koloni seperti yang telah dijelaskan di atas dan dilanjutkan dengan pengesahan Konstitusi 1901 merupakan langkah awal untuk membentuk bangsa dan negara yang merdeka. Meskipun kemerdekaan yang dicapai Australia bukan didapatkan untuk mengakhiri suatu masa penjajahan dan penindasan negara lain. Sebab, kemerdekaan dalam konteks Australia ini berbeda dengan kemerdekaan negara-negara lain yang sebelumnya mengalami kolonisasi asing. Namun pada hakikatnya sama bahwa Australia sebagai negara besar dan makmur justru baru mendapatkan kemerdekaannya pada abad ke-20.
4. Dengan adanya pencapaian kemerdekaan tersebut, pembentukan garis politik luar negeri dapat diselenggarakan sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional Australia. Perlu diketahui bahwa selama bertahun-tahun, arah politik luar negeri masih sangat dipengaruhi dan diwarnai dengan kepentingan kerajaan semata. Bukan hanya itu saja, para duta besarnya juga masih dirangkap oleh bangsawan-bangsawan Inggris yang ditempatkan di negara lain. Dalam hal membina hubungan dengan luar negeri, gubernur jenderal berperan sebagai perantara komunikasi antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Inggris. Sejak pemberlakuan akta, Inggris baru

mengizinkan pencalonan gubernur jenderal bukan lagi dari kaum bangsawan Inggris tapi dari penduduk Australia dengan persetujuan Ratu.

5. Sejak diberlakukannya akta, Pengadilan Tinggi Australia sebagai satu-satunya lembaga banding yang berlaku di tingkat federal dan negara bagian seluruh Australia. Sebelumnya, semua perundangan yang menyangkut negara bagian menjadi hak mutlak kerajaan. Sehingga negara-negara bagian Australia tidak mempunyai wewenang untuk mengesahkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Parlemen Inggris.

Jika dilihat lebih lanjut, perundangan tersebut dibutuhkan dan sesuai dengan kepentingan negara-negara bagian. Ikatan yang mampu menyatukan di antara negara-negara bagian semakin diperkuat dengan adanya akta. Dengan diberlakukannya akta, Australia sebagai negara federal dapat bernafas lega untuk membangun hubungan sinergis dengan negara-negara bagian demi kemajuan negara. Dalam segala bidang masih dapat dikatakan bahwa pengaruh Inggris terasa begitu kuat misalnya masih tetap dipertahankannya posisi dan kedudukan seorang gubernur jenderal, bendera, lagu kebangsaan, dan sebagainya. Konstitusi negara Australia terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Konstitusi Australia adalah:

- Prinsip utama dan ketentuan-ketentuan konstitusional bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh pemerintah tanpa persetujuan dari rakyat Australia melalui referendum.
- Parlemen tidak memiliki kekuatan menyeluruh.
- Hakim bersifat nonpolitik dan mampu menafsirkan serta mengelola konstitusi untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuannya diikuti.

Kelemahan dari Konstitusi Australia:

- Kaku dan kurang responsif terhadap perubahan keadaan.

- Bagian penutup dalam konstitusi lebih berpihak pada *nonelected judges* daripada politisi demokratis yang bertanggung jawab.

Kelebihan Konstitusi Negara Bagian:

- Sumber daya alam negara bagian tersebut diperuntukan untuk masyarakat atau rakyat dari negara bagian tersebut.
- Dapat menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara di luar Australia.

Kelemahan Konstitusi Negara Bagian:

- Konstitusi negara bagian satu terkadang dapat menimbulkan ketegangan dengan negara bagian lain.
- Untuk menyelesaikan kasus hukum dan menghindari proses yang terlalu lama dapat dilakukan dengan melibatkan dua atau lebih negara bagian. Hal ini dapat dilakukan oleh pengadilan di tempat kejadian perkara atau negara bagian pelaku pelanggaran hukum.

BAB IV

MEKANISME FEDERALISME

Pengantar

Cikal bakal terbentuknya pemerintahan Australia sudah mulai terlihat pada tahun 1788. Pada saat itu Inggris mulai membentuk koloni sebagai sarana penampungan bagi para tawanan di Sidney. Kira-kira 40 tahun berikutnya para pendatang narapidana dan warga bebas dari Inggris semakin banyak menempati wilayah-wilayah Australia hingga mendesak kelompok Aborigin.

Lambang Australia

Sistem federal merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang dikenal dalam ilmu politik. Dalam sistem federal, kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dipegang oleh satu tangan. Kepala negara biasanya dikepalai oleh seorang raja, ratu, sultan, sunan, presiden,



Lambang Negara Australia

dan sebagainya. Kepala pemerintahan sebagai pelaku keseharian roda pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Perdana menteri ini mengepalai semua menteri yang ada dalam kurun waktu tertentu. Perlu diketahui bahwa jabatan perdana menteri dapat diguncang sewaktu-waktu dengan mosi tidak percaya yang diberikan oleh suara terbanyak dari parlemen.

Pembaca mungkin akan penasaran dengan lambang negara Australia seperti di atas, maka untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini. Perisai merupakan bagian yang terpenting dari simbol tersebut sebab melambangkan negara-negara bagian yang ada di Australia. Separuh atas pada bagian kiri dan kanan dari perisai melambangkan negara bagian New South Wales, Victoria, dan Queensland. Pada bagian bawah, separuhnya dari kiri ke kanan melambangkan Australia Barat, Australia Selatan, dan Tasmania. Di atas perisai terdapat sebuah bintang yang melambangkan Bintang Persemakmuran dengan Britania Raya. Bintang ini disebut juga dengan Bintang Federasi yang ditandai tujuh sudut. Enam sudut bintang melambangkan negara bagian yang berdiri sejak awal berjumiah itu. Untuk sudut ketujuh melambangkan gabungan dari seluruh negara bagian. Binatang yang paling terkenal dari benua Australia yakni Kanguru Merah dan Burung Emu merupakan dua satwa yang tidak dapat berjalan mundur. Kedua binatang tersebut dipakai sebagai lambang negara dengan harapan agar negara ini dapat selalu maju. Rangkaian tanaman Wattle Emas dan sehelai pita yang bertuliskan Australia meskipun bukan simbol resmi namun tetap direstui oleh Ratu Inggris sebagai lambang negara.

Sistem Federal

Sesuai dengan konstitusi Australia atau yang disebut juga dengan *Commonwealth Constitution of Australia* menyebutkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 1901, negara ini memilih bentuk pemerintahan federal. Pemerintahan federal dalam konteks ini mengambil tiga tingkatan yakni pertama, pemerintahan federal atau dikenal dengan pemerintahan pusat atau pemerintahan nasional atau pemerintahan persemakmuran. Kedua, pemerintah negara bagian atau teritori atau daerah istimewa (*special territory*). Ketiga adalah pemerintah lokal seperti di negara Indonesia setingkat pemerintah kecamatan. Setiap tingkatan pemerintahan tersebut mempunyai yurisdiksi dan kekuasaan masing-masing. Ada beberapa bidang yang bisa dilaksanakan bersama antara

pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Namun juga terdapat bidang-bidang yang ditangani secara terpisah bahkan ada bidang yang selarasnya dikendalikan oleh pemerintah negara bagian tapi tetap harus mendapat campur tangan dari pemerintah federal. Keterlibatan pemerintah federal dalam urusan-urusan tertentu tersebut biasanya berkaitan dengan atau dalam konteks untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Pemerintah lokal berperan mengurus keseluruhan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan konstitusi, Australia hanya terdapat satu pemerintah federal, enam pemerintah negara bagian dan dua teritori yang membawahi 900 pemerintah lokal. Keunikan dari sistem federal yang berlaku di Australia adalah bahwa di setiap negara bagian telah memiliki perangkat pemerintahan dan badan legislatif jauh sebelum terbentuknya negara. Negara bagian Tasmania dengan beribu kota di Hobart telah memiliki pemerintah dan parlemen sejak tahun 1854. New South Wales dengan ibukota di Sydney telah resmi memiliki sistem pemerintah dan parlemen dengan pengesahan parlemen Inggris sejak tahun 1855 sama seperti Victoria yang beribukotakan di Melbourne. Satu tahun berikutnya, parlemen Australia Selatan mengesahkan Australia Selatan dengan ibukotanya di Adelaide. Queensland dengan ibukota di Brisbane disahkan oleh parlemen setempat pada tahun 1867. Australia Barat (Perth) disahkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1890 dan beberapa amandemennya disahkan oleh parlemen setempat pada tahun 1899.

Selain enam negara bagian, Federasi Australia juga memiliki dua daerah istimewa atau teritori. Yaitu *Northern Territory (NT)* yang beribukota di Darwin disahkan sejak tahun 1978. Berikutnya *Australian Capital Territory (ACT)* direstikan tahun 1988 di Canberra. Kedua perangkat pemerintahan dari dua teritori tersebut disahkan oleh Parlemen Australia. Dua teritori tersebut memiliki karakteristik khusus, misalnya teritori NT memiliki wilayah luas

namun dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Pada mulanya ketidakseimbangan tersebut disebabkan karena masih banyaknya penduduk Aborigin dan Asia yang tersebar tidak merata sehingga perlu mendatangkan penduduk baru. Sedangkan teritori ACT penduduknya juga sedikit dan penyebarannya tidak merata yakni di Canberra, *Jervis bay Territory*, dan tujuh teritori eksternal seperti Pulau-pulau Norfolk, Coral Sea, Pulau-pulau Cocos, Christmas, Ashmore, dan Cartier, Pulau-pulau Heard dan McDonald, serta teritori Kutub Selatan Australia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa sebenarnya Persemakmuran Australia menggabungkan sistem pemerintahan dari dua sistem pemerintahan. Gabungan tersebut adalah sistem parlementer yang diambil dari sistem politik Inggris dan sistem federal dari Amerika Serikat (AS). David Solomon menyatakan bahwa bentuk pemerintahan federal yang bertakar di Australia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah nasional harus memiliki kewenangan penuh atas nama seluruh federasi untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.
2. Fungsi-fungsi pemerintahan didistribusikan di antara Pemerintah Nasional dan sejumlah pemerintahan regional atau negara bagian. Pendistribusian tersebut dilakukan melalui konstitusi yang tidak dapat diubah oleh pemerintah federal dan negara bagian.
3. Kekuasaan didistribusikan dengan cara bahwa kedua tingkat pemerintahan baik nasional maupun regional berdampak langsung terhadap warga negara. Dalam hal ini pemerintah federal tidak berlaku sebagai penengah, bukan sebagai penyelenggara sedangkan pemerintah negara bagian bukan sebagai objek dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintah nasional.
4. Ada kewenangan kehakiman yang bertindak sebagai wasit untuk menjamin bahwa baik pemerintah nasional maupun

pemerintah negara bagian melangkah di luar batas-batas kekuasaannya sebagaimana disyaratkan dalam konstitusi.

Aspek-aspek yang diatur dalam sistem federal Australia adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kabinet Parliementer. Parlemen merupakan badan perwakilan dan pembuat keputusan yang sah, terdiri dari wakil rakyat yang dipilih/anggota dalam periode tertentu. Pemerintahan/kabinet terdiri atas PM dan menteri-menteri, anggota parlemen, yang merupakan partai politik/koalisi partai pemenang pemilu, merupakan mayoritas di majelis rendah parlemen, berhak membentuk pemerintahan. Sistem parlemen mengamati pemerintah sebagai badan eksekutif bertanggung jawab kepada pemilihnya. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, sebaliknya parlemen bertanggung jawab kepada daerah pemilihannya.
2. Berbagi Yurisdiksi Kekuasaan. Sistem kabinet parlementer memiliki karakter pemerintahan kesatuan yang sangat kuat (gaya Westminster). Mengimpor sistem kabinet parlementer berarti negara bagian secara langsung telah memberi kedaulatan wilayahnya kepada pemerintah federal. Pemerintah federal yang baru bukan dimaksudkan untuk mengambil seluruh kedaulatan negara bagian. Negara bagian dan pemerintahnya tetap kokoh, tidak dipecah-pecah, tidak dibubarkan menjadi satu pemerintahan kesatuan. Negara bagian hanya memberikan kekuasaannya kepada pemerintahan federal yang akan dibentuknya. Sesuai konstitusi Australia 1897/1898, kekuasaan pemerintah dan parlemen federal terbatas pada masalah-masalah luar negeri dan pertahanan, pos dan telegraf, mata uang, perbankan, arbitrase dalam sengketa antarnegara bagian dan teritori. Yurisdiksi kekuasaan negara bagian di antaranya: masalah pertanian, kepolisian, hukum pidana,

pengendalian harga, aturan lalu lintas, penjara, penyediaan air bersih dan listrik, pendidikan, kesehatan, perencanaan *town* dan *city*, dan kesejahteraan Aborigin. Sejak 1967, kekuasaan kesejahteraan Aborigin diserahkan kepada pemerintah federal.

3. Konstitusi Bersifat Tertulis (*Written Constitution*). Wakil federasi negara bagian menginginkan jaminan bahwa fungsi dan aktivitas kekuasaannya aman dari pelanggaran (infiltrasi) yang mungkin terjadi yang dilakukan pemerintahan federal. Federasi negara bagian mau tunduk pada pemerintah federal bila posisinya terjamin, tidak diambil alih negara bagian yang berpenduduk banyak dan makmur (kaya), sorta-ada jaminan pemerintah federal (nasional) yang baru tidak akan jadi alat dari suatu negara bagian yang lebih besar. Maka, perumus konstitusi setuju diberlakukannya sebuah konstitusi tertulis yang sah, yang menetapkan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah suatu negara bagian. Ada jaminan yang pasti tentang yurisdiksi kekuasaan masing-masing pemerintahan (federal dan negara bagian). Ditetapkannya konstitusi tertulis, sistem pemerintahan dan parlemen Australia menyimpang dari tradisi sistem parlemen Inggris, yang didasarkan pada *Common Law*. *Common Law* tak mengenal konstitusi tertulis, tetapi mengenal konstruksi tidak tertulis (*unwritten constitution*). Konstitusi tertulis membatasi kekuasaan pemerintah (pemerintah federal), sementara dalam *common law*, parlemen punya kedaulatan mutlak dalam berbagai persoalan, tak ada pembatasan hukum tentang kewenangan parlemen untuk membuat UU.
4. Pengadilan tinggi sebagai lembaga banding. Pengadilan tinggi (*High Court*) berfungsi menguji kevaliditasan (keberlakuan) atau kekonstitusionalan dari UU yang dibuat parlemen-parlemen negara bagian ataupun federal. Pengadilan Tinggi dapat mengatakan suatu UU tidak

berlaku, dapat memberikan sanksi, bila UU tersebut di luar porsu kekuasaan parlemen nasional. Pengadilan Tinggi dapat pula menghapus UU negara bagian.

5. Senat sebagai pengimbang kekuasaan. Delegasi negara bagian yang lebih kecil percaya sebuah Senat dapat menjanjikan semacam perlindungan bagi kepentingannya. Secara teori, Senat dibentuk untuk melindungi kepentingan negara-negara bagian, terutama negara bagian yang lebih kecil. Senat merupakan sebuah majelis di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Masing-masing negara bagian mempunyai wakil yang sama. Jumlah anggota Senat tidak boleh lebih dari setengah jumlah anggota Majelis Rendah. Seluruh enam negara bagian mempunyai 12 wakil di dalam Senat, dipilih lewat pemilu. Enam senator masa jabatan selama enam tahun, enam senator lainnya untuk tiga tahun masa jabatan. Berbeda dengan *House of Lord*, anggotanya dipilih di antara bangsawan Inggris. Dua teritori, NT dan ACT, lahir 90 tahun setelah berlakunya konstitusi, memiliki dua senator yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun sekali.

House of Lords berfungsi mengesahkan UU yang telah disetujui majelis rendah. Senat Australia punya kekuasaan yang hampir sama dengan Majelis Rendah. UU yang telah disetujui Majelis Rendah harus memperoleh persetujuan Senat. Senat berfungsi sebagai lembaga penyeimbang partai-partai yang berkuasa di Majelis Rendah, melindungi kepentingan negara bagian, meliputi pemeriksaan proses legislatif, keuangan, dan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah federal (nasional). Sejak 1970-1971, Senat memperkenalkan sistem komite, Komite Seleksi dan Komite Tetap (*standing or permanent committee*). Komite Tetap terdiri Komite Internal, Komite Legislatif dan Tujuan-tujuan Umum, Komite Penyelidikan Legislatif dan Komite Perkiraan. Secara teori, Senat merupakan majelis bagi negara bagian (*states house*), berfungsi

sebagai majelis peninjauan kembali proses legislatif (*house of review*). Sejalan dengan sistem kepartaian moderu Australia sejak 1910, loyalitas kepada partai menjadi pertimbangan utama bagi para senator, dibandingkan loyalitasnya kepada negara bagian. Tampak jelas sistem federal Australia bergaya politik *Westminster*, baik tingkat federal (nasional) maupun negara bagian. Tingkat federal terdapat PM dan para menteri, di negara bagian juga terdapat Premier beserta menteri-menteri negara bagian. Tingkat federal ada parlemen federal (nasional) sebagai majelis rendah, dan di negara bagian ada parlemen negara bagian. Sebuah majelis tinggi yang disebut Senat di tingkat federal, di negara bagian juga terdapat majelis tinggi.

Catatan, negara bagian Queensland menghapus majelis tinggi sejak 1922, sedangkan teritori NT dan ACT tak memakai majelis tinggi sejak pembentukannya. Di atas lembaga-lembaga ini, ada lembaga gubernur jenderal (perwakilan Ratu Inggris). Di tingkat negara bagian ada juga seorang gubernur. Namun, tak ada hubungan hierarkis antara gubernur jenderal dengan gubernur, keduanya berdiri sejajar, bertugas mewakili keberadaan Ratu Inggris. Kedua lembaga ini diangkat Ratu Inggris atas saran pemerintah yang berkuasa di masing-masing tingkatan konstitusional yang cukup menentukan, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Gubernur jenderal bisa memecat PM dan Premier. Tahun 1932, Gubernur New South Wales menjatuhkan PM Pemerintah Buruh secepat, dan November 1975, Gubernur Jenderal Sir John Kerr menjatuhkan pemerintahan Buruh pimpinan PM Gough Whitlam. Sistem federal Australia memiliki ciri yang mirip dengan sistem presidensial di AS: memiliki konstitusi tertulis, memiliki Senat, dan memiliki sebuah Pengadilan Tinggi.

Federalisme Baru

Pemerintah yang berkuasa sejak dibentuk melaksanakan sistem federal sesuai dengan aturan konstitusional. Namun, 20 tahun terakhir, setiap PM punya ambisi mengubah atau "memulihkan" hubungan antara pemerintah nasional dan negara bagian atau merumuskan hubungan federal dengan basis yang lain. Sejak 1970-an, ada ambisi dari partai yang bersaing menginterpretasikan pasal-pasal konstitusi untuk memperoleh makna federalisme sesuai dengan kepentingan partai-partai yang ada.

Tahun 1972, Partai Buruh Australia (*Australian Labor Party/ALP*) menyatakan kepada para pemilihnya untuk melaksanakan suatu kebijakan "Federalisme Baru". Partai Buruh yang dipimpin Whitlam meminta penggunaan kekuasaan keuangan Federal (nasional/*commonwealth*) untuk melaksanakan program-program di bidang yang menjadi kekuasaan negara bagian. Kebijakan berhasil dilaksanakan, tetapi ada yang menentang dari kalangan oposisi Koalisi Liberal Nasional. Para PM negara bagian khususnya PM non-Buruh berhasil membentuk opini publik menentang kebijakan Pemerintah Buruh yang disebutnya sebagai *financial blackmail* oleh pemerintah Canberra. Namun, "Federalisme Baru" Partai Buruh berakhir setelah jatuhnya Pemerintah Whitlam pada 1975.

Pemerintah Koalisi Liberal-Nasional, pimpinan Malcolm Fraser, berkuasa setelah jatuhnya Pemerintah Buruh, mengajukan konsep "Federalisme Baru" mereka. Pajak, merupakan kekuasaan bersama antara pemerintah federal dan negara bagian. Pemerintah koalisi melembagakan pengaturan *tax sharing* mengizinkan negara bagian untuk menentukan prioritas-prioritas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Walau demikian, selama 8 tahun berkuasa, kebijakan federalisme Baru Fraser tak mengurangi keterlibatan Pemerintah Nasional ke dalam urusan negara bagian.

Mekanisme Federalisme

Pemerintah federal memiliki kekuasaan eksklusif di antaranya masalah luar negeri dan pertahanan, imigrasi, bea cukai, dan pajak. Bagi politisi pemerintah di tingkat federal, ada bidang kekuasaan negara bagian yang sangat penting di antaranya pendidikan, kesehatan, kesenian, perumahan, dan polisi. Bidang kekuasaan ini sangat menentukan dalam memengaruhi dukungan pemilih. Besarnya wilayah kekuasaan negara bagian dapat menjadi posisi tawar yang tinggi dalam hubungan federal. Hanya pemerintah negara bagianlah yang berwenang membuat dan memberlakukan perundangan di bidang-bidang: pendidikan, kesehatan, dan masalah perkotaan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, negara bagian memiliki hak veto pada setiap usaha Pemerintah Nasional untuk memengaruhi kebijakan di bidang-bidang tersebut. Negara bagian juga dapat memaksa Pemerintah Nasional untuk membayar "harga" yang mahal untuk keterlibatannya di dalam bidang-bidang tersebut.

Pemerintah federal juga memiliki kekuasaan membuat UU yang secara langsung berpengaruh dalam hubungannya dengan negara bagian. Pertama, kekuasaan membuat aturan mengenai negara bagian, yang merupakan bagian dari kekuasaan hubungan luar negerinya. Kedua, pemerintah federal mempunyai kekuasaan dalam wilayah-wilayah lepas pantai, ditegakkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi tahun 1975. Kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan membuat UU khusus mengenai ras Aborigin, diperoleh setelah perubahan konstitusi 1967. Dalam praktiknya, kekuasaan ini membawa pertentangan antara Pemerintah Nasional dan pemerintah Queensland, mengenai kasus mist Aborigin di pulau-pulau Aurukan dan Mornington.

Perubahan Perimbangan Kekuasaan

Pemerintah federal berkeinginan campur tangan dalam urusan-urusan negara federal, ada kecenderungan sentralistis, ada pandangan kekuasaan federal bersifat lebih nasional. Apalagi ada ambisi setiap PM untuk mengubah atau "memulihkan" pola

hubungan federal dengan basis yang lain. Tentu saja, cara ini membuat pemerintah federal berhadapan dengan negara bagian di Pengadilan Tinggi. Ada dua kasus penting yang diungkap yaitu kasus *Uniform Tax* 1942, dan kasus Bendungan Tasmania tahun 1983. Pengadilan Tinggi memutuskan memberi hak monopoli bagi pemerintah federal untuk meneruskan pemungutan pajak pendapatan, baik pada masa perang maupun masa damai.

Dalam kasus Bendungan Sungai Franklin di Tasmania, Pengadilan Tinggi mendukung IHI yang dikeluarkan pemerintah federal untuk mencegah Pemerintah (negara bagian) Tasmania yang akan membangun sebuah pembangkit listrik tenaga air di wilayahnya, dengan membuat bendungan di Sungai Franklin. Kasus *Uniform Income Tax* 1942, menjadi satu-satunya pengumpul pajak pendapatan (perseorangan maupun perusahaan), yang merupakan sumber utama penghasilan pemerintah Australia. Lembaga politik Australia mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen, yang berada dalam struktur federal. Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan perimbangan kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, sehingga memunculkan "Federalisme Baru". Kekuasaan pemerintah federal semakin besar, dan pemerintah negara bagian semakin kecil kekuasaannya, sesuai penafsiran Pengadilan Tinggi terhadap konstitusi dan dominasi keuangan pemerintah federal.

Sistem federal memberikan batasan-batasan yang jelas antara kekuasaan pemerintah federal dengan pemerintah negara-negara bagian. Dalam hubungan antara pemerintah federal dengan negara-negara bagian terdapat diwarnai dengan ambisi dan kehendak pemerintah federal dalam wilayah kekuasaan pemerintah negara-negara bagian. Melalui sistem federal tersebut, pemerintah Australia lebih dimudahkan dalam mengatur dan mengelola bidang-bidang kenegaraan. Misalnya masalah hubungan luar negeri dan keuangan dikelola secara langsung melalui pemerintah federal.

Bidang-bidang lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian seperti pada kesehatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Pada permasalahan tersebut, wewenang antara pemerintah federal dengan negara bagian masih tumpang tindih. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada permasalahan mengenai nasionalisasi rumah sakit di Tasmania. Menurut sejarah, rumah sakit tersebut adalah rumah sakit tertua yang ada di Tasmania. Ketika Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd, pengelolaan dari pihak swasta akan menghilangkan nilai sejarah yang ada di rumah sakit tersebut. Dipicu dari pengelolaan yang merugikan para pasien kalangan menengah ke bawah hingga sulitnya tenaga medis serta pasokan obat-obatan untuk mensuplai rumah sakit Mersey tersebut membuat Rudd menasionalisasikan Mersey pada tahun 2007.

Jika menoleh ke belakang, masalah kebijakan kesehatan sering dijadikan sebagai senjata politik satu partai untuk menyerang lawan politiknya. Setiap pihak memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan kebijakan kesehatan. Ada pihak yang mendukung liberalisasi dalam bidang kesehatan, ada pula pihak yang mendukung nasionalisasi bidang kesehatan. Pihak yang mendukung liberalisasi biasanya berasal dari Partai Liberal dan Partai Nasional, sedangkan pihak yang mendukung nasionalisasi biasanya berasal dari Partai Buruh. Partai Buruh selalu berada di pihak Liberalis Sosialis yang berpendapat bahwa kesehatan seharusnya dibiayai dari pajak dan sektor publik lainnya agar पास kesehatan dapat dijangkau oleh siapa pun dengan biaya yang terjangkau (dasar kesetaraan).

Oleh karena itu, produk kebijakan yang biasanya dikeluarkan oleh Partai Buruh adalah asuransi kesehatan untuk semua masyarakat dan berbagai produk kesehatan yang bersifat publik. Sedangkan Partai Liberal selalu berada di pihak Individualis Liberalis yang berpendapat bahwa kesehatan seharusnya dibiarkan untuk berkembang dengan sendirinya. Intervensi dari pemerintah

bidang-bidang lain yang menjadi tanggung jawab pemerintahan negara bagian seperti pada kesehatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Pada permasalahan tertentu, wewenang antara pemerintah federal dengan negara bagian masih rumpang. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada permasalahan mengenai nasionalisasi rumah sakit di Tasmania. Menurut sejarah, rumah sakit tersebut adalah rumah sakit tertua yang ada di Tasmania. Ketika Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd pengelolaan dari pihak swasta akan menghilangkan nilai sejarah yang ada di rumah sakit tersebut. Dipicu dari pengelolaan yang merugikan para pasien kalangan menengah ke bawah hingga sulitnya tenaga medis serta pasokan obat-obatan untuk memsuguhkan rumah sakit Mersey tersebut membuat Rudd menasionalisasikan Mersey pada tahun 2007.

Jika menoleh ke belakang, masalah kebijakan kesehatan sering dijadikan sebagai senjata politik satu partai untuk menyerang lawan politiknya. Setiap pihak memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan kebijakan kesehatan. Ada pihak yang mendukung liberalisasi dalam bidang kesehatan, ada pula pihak yang mendukung nasionalisasi bidang kesehatan. Pihak yang mendukung liberalisasi biasanya berasal dari Partai Liberal dan Partai Nasional, sedangkan pihak yang mendukung nasionalisasi biasanya berasal dari Partai Buruh. Partai Buruh selalu berada di pihak Liberalis Sosialis yang berpendapat bahwa kesehatan seharusnya dibiayai dari pajak dan sektor publik lainnya agar posisi kesehatan dapat dijangkau oleh siapa pun dengan biaya yang terjangkau (sifat kesetaraan).

Oleh karena itu, produk kebijakan yang biasanya dikeluarkan oleh Partai Buruh adalah asuransi kesehatan untuk semua masyarakat dan berbagai produk kesehatan yang bersifat publik. Sedangkan Partai Liberal selalu berada di pihak individualis liberalis yang berpendapat bahwa kesehatan seharusnya dibiayai untuk berkembang dengan sendirinya. Intervensi dari pemerintah

harus semakin dikurangi karena dapat menghambat kemajuan bidang kesehatan. Semakin banyak diintervensi, maka semakin kecil kemungkinan Australia untuk dapat bersaing di level dunia. Mengapa kesehatan di Australia menjadi sedemikian penting? Ternyata selain menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, kesehatan di Australia juga telah berubah menjadi industri yang sangat menggiurkan. Industri kesehatan Australia memiliki peluang yang sangat besar dan potensi keuntungan yang sangat besar, bahkan hingga lima kali lipat potensi keuntungan di industri Pertahanan.

Dalam sebuah survei yang dilaksanakan oleh Institut Kesejahteraan dan Kesehatan Australia disebutkan bahwa pada tahun 2003, biaya untuk belanja kesehatan di Australia mencapai 9,5 persen dari total PDB. Apalagi kecenderungan untuk belanja di bidang kesehatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat Australia sangat peduli terhadap kondisi kesehatan mereka. Industri kesehatan pun kian menjanjikan dan diperebutkan oleh banyak investor. Di sini juga terjadi pertentangan antara Partai Liberal dan Partai Buruh. Menurut Partai Liberal, industri kesehatan harus dilepas agar dapat berkembang dan menghasilkan banyak devisa untuk negara. Akan tetapi menurut Partai Buruh, industri kesehatan yang sedemikian menggiurkan ini harus dikontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak swasta. Pemerintah harus berperan agar tidak terjadi penyelewengan fungsi kesehatan yang sebenarnya. Dalam hal kesehatan, kedua partai ini selalu bertentangan.

Partai Liberal didukung oleh para dokter dan penyedia layanan kesehatan, sedangkan Partai Buruh banyak didukung oleh masyarakat yang menginginkan kesehatan yang murah, jika perlu kesehatan gratis. Pertentangan antara kedua negara ini memang bukan hal yang baru karena sudah sejak lama terjadi. Pada tahun 1940-an, isu kesehatan sempat mencuat di permukaan dan menimbulkan banyak pro dan kontra. Pemerintah berkuasa saat itu

berencana untuk membuat kebijakan kesehatan murah berupa penerbitan kartu asuransi jaminan kesehatan dan rumah sakit gratis kepada masyarakat miskin. Usaha ini ditentang oleh kaum industri kesehatan dan perserikatan dokter di Australia. Negara bagian pun terbelah menjadi dua golongan: golongan pertama setuju dengan usulan pemerintah (New South Wales, Queensland, dan Tasmania), dan golongan kedua menolak usulan pemerintah (Victoria, Australia Barat, dan Australia Selatan). Golongan yang menolak tersebut melakukan pemboikotan terhadap kebijakan pemerintah dengan tetap menerapkan biaya kesehatan kepada para pasien.

Lembaga Profesional (semacam Ikatan Dokter Indonesia) juga turut memboikot kebijakan tersebut, akibatnya kebijakan tidak dapat berjalan lancar dan terpaksa dihentikan oleh pemerintah federal. Hal ini memang cukup memalukan di mata internasional karena kebijakan yang sudah dibuat terpaksa harus ditarik kembali. Memang posisi pemerintah Australia memang sangat terjepit antara ikatan dokter dan rakyat. Kasus tersebut di atas menjadikan pelajaran Australia untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Masalah kesehatan biasanya diambil jalan tengah dengan menghitung keuntungan rakyat dan keuntungan layanan kesehatan. Namun bukan berarti pemerintah Australia terbebas dari masalah. Kasus tersebut kembali membuat para pemerintah hendak meluncurkan program asuransi Medicare di tahun 1983. Program asuransi kesehatan nasional tersebut malah sempat ditentang oleh kedua pendukung.

Pendukung liberal mengatakan bahwa program tersebut menghambat liberalisasi di bidang kesehatan sedangkan pendukung borah mengatakan bahwa program tersebut terlalu liberal. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengajak semua pihak baik dari pemerintah federal maupun dari negara bagian untuk saling berunding memutuskan permasalahan Medicare tersebut. Melalui Perjanjian Layanan

Kesehatan Australia (*Australian Health Care Treaty*), akhirnya diputuskan bahwa program tersebut tetap dilaksanakan tetapi dengan catatan dilakukannya evaluasi setiap lima tahun sekali. Bersesuaian antardua kubu tersebut terus berlangsung dan berdampak hingga pada tataran negara bagian. Setiap kali ada program dan kebijakan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah federal selalu ada negara bagian yang menolak program tersebut baik karena alasan politis maupun ekonomis. Demikian juga saat pemerintah federal meluncurkan sebuah aturan baru terkait masalah kesehatan di bidang alkohol. Isi kebijakan tersebut di antaranya adalah perubahan batas minimum usia penggunaan alkohol dari 21 menjadi 18 tahun, serta berbagai aturan terkait pajak alkohol dan batasan penggunaannya. Kebijakan ini ternyata tidak dapat lepas dari pro dan kontra dari negara bagian. Saat kebijakan tersebut diluncurkan, ada negara bagian yang masih kurang setuju dan memutuskan untuk mempertimbangkan penerapannya. Tidak semua negara bagian langsung sepakat terhadap kebijakan pemerintah federal.

Sebagian beranggapan bahwa alkohol sudah menjadi budaya hidup masyarakat Australia sehingga penerapannya dapat mengganggu perekonomian rakyat yang sudah lama bergantung pada produksi minuman keras. Sedangkan sebagian lain memiliki pertimbangan politis seperti perbedaan pandangan dan partai politik. Australia Barat pertama kali menyetujui dengan membuat peraturan *Liquor Control Act 1988* dan *Liquor Control Regulations 1988*. Australia Selatan baru menerima peraturan tersebut pada tahun 1997 melalui *Liquor Licensing Act 1997*, Victoria menerima pada tahun 1998 melalui *Liquor Licensing Reform Act 1998*. Sedangkan New South Wales baru menerima peraturan tersebut pada tahun 2007 melalui *Liquor Act 2007*.

Berdasarkan paparan tersebut terlihat bagaimana masalah kesehatan menjadi masalah yang sangat pelik di mata masyarakat Australia. Sedemikian pentingnya masalah kesehatan Australia

hingga negara bagian tidak segan untuk saling berselisih pendapat dengan negara bagian lain, bahkan menentang peraturan dari pemerintah federal. Adanya krisis yang terjadi di dalam operasionalnya rumah sakit Mersey tersebut atau terjadi masalah internal rumah sakit itu disebabkan banyaknya yang di butuhkan dalam rumah sakit tersebut seperti dokter, perawat, obat-obatan, peralatan rumah sakit yang tersedia karena itu membutuhkan pembiayaan atau anggaran yang sangat besar dan rumah sakit Mersey di Tasmania sudah tidak kuat lagi untuk membiayainya maka itu pada tahun 2007 rumah sakit Mersey dinasionalisasikan dan dikelola oleh pemerintah pusat khususnya di bagian negara bagian Tasmania itu sendiri.

BAB V

MENGENAL PARLEMEN

Pengantar

Sesuai dengan Cambridge Dictionary, parlemen adalah lembaga atau organisasi yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum untuk menduduki masa jabatan tertentu. Lembaga ini bertugas untuk membuat perundang-undangan yang akan diberlakukan bagi seluruh rakyat yang ada di negaranya. Parlemen merupakan suatu badan yang mengatur operasional harian pemerintahan dalam sistem federalisme. Di dalam badan ini terdapat dua lembaga yang mendominasi yakni Majelis Tinggi atau Senat dan Majelis Rendah atau *House of Representatives*. Anggota kedua lembaga tinggi negara tersebut dipilih dalam kurun waktu tertentu melalui pemilu sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku dalam konstitusi.

Parlemen Australia

Parlemen Australia merupakan parlemen yang paling dinamis di dunia. Mengapa? Sebab, semua aturan perundang-undangan tak luput dari "penggodakan" yang teliti dan cermat di lembaga ini. Semua tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi negara, masalah kepentingan umum, menjadi bahan untuk perdebatan di parlemen Australia. Parlemen Australia terdiri atas dua majelis yaitu majelis rendah (*House of Representatives/HR*), dan majelis tinggi yang disebut *Senate* (Senat). Konstitusi menetapkan anggota *HR* dipilih langsung oleh rakyat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Anggota *HR* terus meningkat tahun 1901-1949 berjumlah 75 orang, sejak 1949 menjadi 121, tahun 1980-an berjumlah 125, tahun 1990-an

meningkat menjadi 140 anggota. Keunikan yang terjadi dalam hubungan *HoR* dan Senat, secara konstitusi hubungan keduanya berimbang. Tetapi, faktanya Senat dapat meminta pemerintah untuk mengadakan pemilu lebih awal, ini berarti membubarkan *HoR*. Senat pun bisa menolak sebuah RUU dari *HoR*, Senat memiliki kekuasaan untuk mengesahkan RUU.

Fungsi Parlemen

Fungsi Parlemen di Australia adalah sebagai berikut:

1. Fungsi membentuk dan membubarkan pemerintah. Sesuai gaya Westminster, PM dan menteri-menteri harus berasal dari anggota parlemen yang dipilih rakyat. Membentuk pemerintah dilakukan saat majelis rendah (*HoR*) bersidang untuk pertama kali, memberikan mosi percaya kepada pemerintah yang baru terbentuk. Majelis juga memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan menteri, atau membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya jika tak mampu mengatasi masalah masyarakat. Catatan, Senator juga dapat diangkat sebagai menteri kabinet, seperti senator Gareth Evans (Menteri Luar Negeri) dalam Kabinet Pemerintah Buruh pimpinan Hawke dan Paul Keating. Senator bisa juga jadi PM, seperti senator John Gorton tahun 1967, karena mentoggalnya PM Liberal Harold Holt. Partai dengan kursi mayoritas dalam majelis rendah berhak membentuk pemerintahan (kabinet) disebut Partai Pemerintah. Partai yang kalah disebut Partai Oposisi. berhak membentuk "Kabinet Bayangan."
2. Fungsi Legislasi. Fungsi utama parlemen yaitu membuat UU. RUU yang rutin diajukan tiap tahun terkait anggaran pemerintah seperti RUU Perbekalan (*supply*), RUU Persewaan (*appropriation*).
3. Fungsi Kontrol. Parlemen bertujuan mengontrol dan mengkritik segala tindakan pemerintah yang melenceng dari UU yang berlaku. Cara anggota parlemen untuk

mengontrol pemerintah dapat menggunakan "Waktu untuk Bertanya" (*Question Time*), waktunya terbatas 30 menit di *HoR* dan 45 menit di Senat. Pertanyaan langsung ditujukan kepada PM/menteri tanpa pemberitahuan sebelumnya (*question without notice*). Anggota parlemen pun bisa mengajukan pertanyaan secara tertulis, dan akan mendapatkan jawaban tertulis dari menteri bersangkutan secara lebih mendalam.

Perdebatan yang diizinkan parlemen di antaranya: perdebatan mengenai pernyataan dan laporan menteri-menteri (*ministers statements and reports debate*), Perdebatan terbuka (*open debate*), anggota parlemen meminta untuk membicarakan persoalan menyangkut pemerintah, menyita banyak perhatian, atau sesuai kepentingan daerah pemilihanya. Perdebatan mengenai berbagai persoalan setelah gubernur jenderal membuka masa persidangan parlemen baru. Debat untuk menunda perdebatan (*adjournment debate*), anggota parlemen mengajukan mosi perdebatan ditunda beberapa jam atau sampai besok. Perdebatan pada "Hari Keluhan" (*grievance day debate*), Pauline Hanson, pernah kecewa ketika Australia kebanjiran pendatang dari Asia (*swamped by Asians*). Awalnya tak ada tanggapan pemerintah, tapi kemudian berkembang menjadi isu yang bisa menggoncang pemerintah.

Ada lagi alat untuk mengontrol pemerintah, yaitu mosi kecaman (*censure motion*) diangkat dari kepentingan publik (*matters of public importance*). Kedua, mosi tidak percaya (*no confidence motion*), melawan pemerintah, menentang menteri, bisa membuat sang menteri mengundurkan diri.

4. Fungsi penyelidikan. Bagian dari fungsi kontrol dilakukan berbagai komisi parlemen. Seringkali digunakan untuk penyelidikan keuangan pemerintah, tapi parlemen tidak bisa mengganggu gugat anggaran yang telah dialokasikan

departemen-departemen pemerintahan. Parlemen hanya dapat mengawasi setelah anggaran digunakan, melalui laporan tahunan.

5. Fungsi perwakilan. Anggota parlemen dipilih untuk mewakili daerah pemilihannya. Anggota parlemen harus peka terhadap aspirasi rakyat daerah pemilihannya.
6. Fungsi latihan kepemimpinan. Parlemen jadi ajang untuk jadi politisi menuju pemimpin potensial. John Howard jadi menjadi Ketua Partai Liberal berkat penampilannya yang baik di *HoR*.
7. Fungsi memberikan informasi dan publikasi. Yang istimewa di Parlemen Australia, anggota bebas untuk berbicara bahkan kata-kata "keras" dan "kasar" bukan hal yang tabu untuk diucapkan. Anggota Parlemen tidak akan digugur gara-gara pencemaran ataupun fitnah. Kasus tertentu, seorang *backbencher* (anggota parlemen yang bukan menteri pemerintah atau sekretaris parlemen atau menteri bayangan dari partai oposisi) dapat menceritakan semua hal kepada wartawan tanpa takut menghadapi gugatan.

Perangkat Parlemen

Badan-badan perlengkapan parlemen mengikuti tradisi Parlemen *Westminster*. Adapun perangkat penting yang bertugas memfungsikan acara persidangan di antaranya:

1. Peraturan Tata Tertib (*Standing Orders*). *Standing Orders* untuk mengontrol tingkah laku anggota parlemen dan aturan-aturan dalam persidangan. Pada awalnya diadopsi dari majelis rendah di Inggris (*House of Commons*) dan digunakan parlemen di koloni Australia. Tata tertib dalam *standing orders* bagi anggota *HoR* berisi 400 aturan main parlementer, sementara Senat kurang sedikit dari jumlah tersebut. Isi tata tertib di antaranya waktu untuk perdebatan, cara mengajukan pertanyaan, tingkah laku

anggota dalam bertanya, teknik penghitungan suara, dan lainnya.

2. Ketua Majelis: Ketua Majelis *HoR* disebut *Speaker*, untuk Senat disebut *President*. Keduanya bertugas memimpin persidangan di parlemen. Ketua majelis paham soal *Standing Orders*, harus berperan sebagai hakim, memberikan penilaian/keputusan, mengenai jenis pertanyaan yang boleh dan tidak boleh diajukan dan cara penyampaiannya. *Speaker* dipilih di antara anggota parlemen dari partai pemerintah. Bila dapat mempertahankan kursinya dalam pemilu, mantan *Speaker* bisa menjadi menteri. Sebaliknya, Senat dipilih oleh semua senator, merupakan perwakilan dari negara bagian, bukan mewakili partai politik. *Speaker* tak memiliki hak suara dalam pemungutan suara parlemen. Hal ini berbeda dengan Presiden Senat memiliki hak suara, disebut *deliberative vote*.
3. Parlemen Australia menganut pemungutan suara secara terbuka (*division*). Dalam pemungutan suara, anggota yang menyatakan dukungannya terhadap sesuatu mosi (menyatakan "ayes"), langsung berdiri di sebelah kanan, bagi yang menolak (menyatakan "noes") berdiri di sebelah kiri. Ketua majelis (*Speaker* dan *President*) harus tegas, adil, bijaksana dalam melaksanakan fungsinya. Bila sidang ricuh, *Speaker* harus bisa menenangkan ketegangan suasana.
4. Juru tulis majelis, disebut *Clerk of the House*, bertanggung jawab atas administrasi di masing-masing majelis, memperlancar seluruh proses persidangan di parlemen.
5. Hansard, seorang staf juru tulis majelis, duduk di tengah saat sidang majelis berlangsung. Sebagai juru tulis, mencatat kata per kata dari semua pembicaraan dalam sidang parlemen.

Komite-Komite: ada komite *HoR*, Komite Senat, dan Komite Gabungan (*Joint Committee*), anggotanya gabungan anggota *HoR* dan

Senat. Komite terbagi dalam dua kelompok Komite Tetap (*Standing Committee*) dan Komite-komite Pilihan (*Select Committees*). Komite Tetap mengurus masalah internal seperti Komite Prosedur, Komite Hak istimewa anggota parlemen, komite perpustakaan, dan lainnya. Komite Pilihan merupakan komite *ad hoc*, bersifat sementara, dibentuk untuk menyelidiki dan melaporkan persoalan-persoalan khusus setelah selesai komite ini diubarkan

Proses Pembuatan UU

Sejak 1970-an telah menyelesaikan lebih 100 RUU tiap tahunnya. Tahun 1973 bisa menyelesaikan 253 RUU, dan tahun 1985 mencapai 234 RUU. Sebagian besar RUU dari usulan menteri, RUU usulan *backbencher* sangat jarang yang dapat disahkan menjadi UU.

Tahap-tahap agar RUU bisa disahkan menjadi UU oleh parlemen:

1. Pembahasan pertama (*First Reading*). Hanya formalitas, berlangsung singkat, tanpa perdebatan.
2. Pembahasan kedua (*Second Reading*). Prinsip utama dijabarkan, dijelaskan menteri. Perdebatan ditunda untuk memberi kesempatan oposisi untuk memeriksa RUU tersebut. Setelah ditunda satu minggu, perdebatan mulai lagi, oposisi berhak mendukung, menolak atau mengajukan amandemen terhadap RUU tersebut.
3. Pembahasan di Komite (*Committee Stage*). Tahap ini sering dilangkahi, hanya yang kompleks dibahas di tahap ini.
4. Pembahasan ketiga (*Third Reading*), juga bersifat formalitas. RUU yang sudah disahkan dikirim ke majelis Senat untuk dipertimbangkan. Bila Senat setuju RUU tersebut, dikirim oleh *Her Majesty* kepada gubernur jenderal untuk mendapat "Persetujuan Kerajaan" (*Royal Assent*). Setelah disetujui, pemberlakuan sebagai UU diumumkan di Lembaran Negara (*Government Gazette*).

Bila tak ada kesepakatan, Senat dapat menyisihkan RUU tersebut. Jika pemerintah ingin Senat memproses RUU tersebut, setelah beberapa kali tidak sepakat, maka ketentuan mengenai pembubaran kedua majelis (*double dissolution*) bisa diberlakukan, sebagai tanda telah terjadi kemacetan di kedua majelis.

House Of Representatives



Komposisi Tempat Duduk Sidang House of Representative

Gambar di atas adalah komposisi tempat duduk dalam sidang Parlemen Majelis Rendah (*House of Representative/HoR*). Pada bagian depan dari kiri ke kanan adalah *clerk* (juru tulis), *speaker* (pemimpin dalam parlemen berasal dari partai pemerintah) dan *deputy clerk* (juru tulis senior kedua dalam parlemen). Pada bagian belakangnya yang sebelah kiri adalah Perdana Menteri (PM) beserta menternya yang duduk dalam jabatan sebagai menteri sedangkan bagian kanan adalah partai oposisi atau yang dikenal dengan kabinet bayangan dengan ketua oposisi duduk persis berseber-

rangan dengan kursi PM. Bagian tengah antara barisan partai pemerintah dan oposisi adalah barisan partai-partai kecil atau kelompok independen.

Anggapan umum partai pemerintah menggunakan *Hall of Mirrors* maksud konstruktif, sebab tugas utama *HoR* meluluskan legislasi yang diajukan pemerintah. Oposisi berpeluang menggunakan *Hall of Mirrors* untuk maksud-maksud bersifat "merusak", untuk menghancurkan atau paling kurang menggyahkan citra dan kredibilitas pemerintah. Hal ini untuk konsumsi luar parlemen, para pemilih dan daerah pemilihan, harapan kelak para pemilih mau mengubah pilihannya pada pemilu mendatang. Pihak oposisi kadang mempromosikan usulan konstruktif, tapi dengan maksud untuk memengaruhi daerah pemilihan bukan untuk memperbaiki hukum perundang-undangan atau persoalan administrasi pemerintah yang sedang dibahas.

Pihak oposisi menggunakan semua prosedur parlemen, seperti waktu untuk bertanya, perdebatan, mosi kecaman, dan lainnya. Semuanya disiarkan langsung televisi pemerintah ABC, dan diliput oleh *Press Gallery*, yang bisa menampung lebih dari 200 reporter dan wartawan. Bahkan, televisi swasta membangun studio mini di dalam gedung parlemen untuk konferensi pers dan wawancara.

Prosedur parlemen dalam *Standing Orders* seringkali menguntungkan pemerintah, yaitu prosedur *Gag* dan *Gulotine Gag* mengizinkan pertanyaan yang diajukan anggota parlemen bersama pihak oposisi. Prosedur *Gag* juga bisa diterapkan dalam sidang perdebatan parlemen. Prosedur *Gulotine* digunakan pemerintah, untuk membatasi berlarut-larutnya perdebatan dalam legislative, pemerintah bisa menetapkan batas waktu bagi pembahasan suatu RUU, perdebatan tidak boleh melampaui batas waktu dan harus segera diakhiri, misal melalui pemungutan suara. Walau demikian, parlemen tetap memberikan hak-hak istimewa

kepada seluruh anggotanya, termasuk juga para senator. Hak istimewa ini memberikan kebebasan kepada anggota parlemen untuk berbicara di dalam parlemen, bebas dari pembatasan ketentuan hukum mengenai fitnah, ataupun pencemaran martabat orang lain. Anggota Parlemen berhak mengungkap tentang kebaikan dan keburukan masyarakat, tanpa takut terhadap kekuatan apa pun. Kadang, argumentasi yang diajukan anggota parlemen sangat kasar, menyakiti perasaan dan mencemarkan martabat masyarakat. Namun, itulah tugas anggota parlemen, untuk bisa menghindar dari gugatan masyarakat dengan berlindung di balik hak istimewanya.

Jumlah Perwakilan Negara Bagian dan Teritori untuk *House of Representatives* Australia

No.	Negara Bagian	Jumlah Wakil
1	New South Wales	50
2	Victoria	38
3	Queensland	25
4	Australia	14
5	South Australia	12
6	Tasmania	8
7	Teritori NT	2
8	Teritori ACT	2

Berdasarkan tabel tersebut, hanya New South Wales yang memiliki jumlah wakil terbanyak karena penduduk dan luas wilayahnya terbesar. Keistimewaan lainnya, anggota parlemen terlarang menyalahkan ucapan-ucapan atau tulisan orang luar, yang dianggap menghina anggota parlemen, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Majelis parlemen bisa mengadakan *sumbang* dengan memanggil orang luar tersebut (wawancara atau memberi surat kabar) untuk membuktikan tuduhan terhadap anggota parlemen, yang tertulis di mediana. Jika tuduhan tidak

terbukti, maka majelis dapat meminta pengadilan untuk memenjarakan orang tersebut. Hal ini telah dialami Laurie Oakes, wartawan surat kabar *the Age*, dinyatakan bersalah oleh Komite Hak-hak Istimewa *HaR*. Masyarakat pun merasa adanya ketidakadilan adanya hak istimewa yang dimiliki anggota parlemen tersebut.

Senat



Komposisi Tempat Duduk Sidang Senat

Keterangan untuk gambar di samping adalah: (1) kursi bagian tengah di barisan depan adalah untuk The President (2) Deputy President dan Chairman of the Committee pada kursi bagian tengah yang menyerupai huruf T. Kedua jabatan ini bisa dirangkap oleh satu orang. (3) Leader of the Government in the Senate: Pimpinan untuk kelompok pemerintah pada kursi sebelah kiri bawah masih pada bagian tengah yang menyerupai huruf T. Jabatan ini ditempatkan

ada anggota Senat yang mendukung pemerintah. (4) *Leader of the Opposition in the Senate*. Kursi yang berhadapan dengan angka (3) diperuntukkan bagi ketua kelompok oposisi yakni anggota Senat yang tidak mendukung pemerintah. (5) *Party Whips*. Setiap partai memiliki kelompok kecil yang bertanggung jawab mengatur anggota untuk terlibat dalam debat Senat dan memperkuat jumlah kehadiran anggota dalam persidangan. (6) *The Clerks*. Juru tulis yang duduk pada bagian kiri dan kanan kursi bagian tengah yang menyerupai huruf T. (7) *Hansard Editors*. Setiap persidangan Senat hasil persidangan maupun hasilnya disiapkan dan dilaksanakan oleh *Hansard Editor* sehingga hasilnya bisa direkam dan disimpan rapi dalam audio visual. (8) *Adviser Benches*. Adalah staf anggota Senat yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada para menteri. (9) *Usher of the Black Rod*. Adalah staf parlemen yang bertugas terhadap acara seremonial, mengirim pesan dari Senat kepada HoR, dan membantu menjaga ketertiban di Senat.

Berdasarkan konstitusi, setengah dari 12 senator Negara Bagian dan seluruh dari senator dari teritori dipilih untuk masa takai 3 tahun. Sedangkan 6 senator sisanya dipilih 6 tahun sekali. Oleh karena itu, ada 2 kali masa pemilu bagi pengisian kursi senator. Yaitu *Full Senate Election*, di mana rakyat memilih 12 anggota senatnya 6 tahun sekali. Dan *Half Senate Election*, di mana rakyat memilih 6 anggota senar yang pension pada 3 tahun pertama keanggotaan dari 6 tahun. Untuk *Full Senate Election*, untuk mendapatkan kursi senat seorang senator harus mendapatkan quota 7,7%, sedangkan dalam *Half Senate Election* seorang senator harus mendapatkan 14,3% quota. Sejak federasi hingga 1981, pola hubungan Senat-Pemerintah seperti paradoks, sebagai "sahabat" sekaligus sebagai "musuh". Sebagai sahabat jika pemerintah menguasai kursi mayoritas di Senat, sebagai musuh bila oposisi menguasai Senat. Hubungan harmonis antara pemerintah federal dengan Senat pernah terjadi pada periode 1919-1922, oposisi hanya memiliki satu suara di Senat. Periode 1934-1937, oposisi memiliki

Tiga dari 36 kursi Senat dapat meloloskan RUU yang diajukan pemerintah, dan bahkan melakukan amandemen-amandemen terhadap RUU atas permintaan pemerintah.

Kedekatan hubungan antara pemerintah federal dengan Senat berawal sejak oposisi Partai Buruh menguasai mayoritas Senat sesudah Juli 1981. Oposisi yang menguasai suara mayoritas Senat memperlakukan pemerintah, yang menguasai mayoritas dalam majelis rendah. Oposisi memanfaatkan otoritas Senat untuk menghambat pemerintah, menunda membahas RUU, menolak RUU sampai menyetujui pemerintah. Permusuhan terbesar antara Senat dan pemerintah terjadi pada masa PM Whitlam berlatar, terutama selama 16 bulan setelah pemilu pembubaran ganda 1974, di mana 44 RUU yang telah diloloskan *HoR* ditolak seluruhnya oleh Senat. Ini merupakan penolakan RUU terbesar sepanjang sejarah federasi Australia, 1974-1975. Hal ini membuat Senat Australia telah menunjukkan posisinya sebagai salah satu lembaga yang sangat disegani dan patut dipertimbangkan kekuatannya.

Fungsi utama Senat dalam sistem pemerintahan Australia, yaitu majelis bagi negara-negara bagian (*House of States*) dan majelis peninjauan legislasi pemerintah (*House of Review*). Adapun fungsi peninjauan kembali di antaranya:

1. Memberikan pendapat kedua (*second opinion*) terhadap legislasi.
2. Memeriksa penyelenggaraan legislasi oleh eksekutif dan petunjuk pelaksanaannya (*regulations and ordinances*).
3. Mengajukan RUU yang tidak menyangkut masalah keuangan dan tidak bersifat kontroversial.

Senat diharapkan menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengoreksi legislasi pemerintah yang kurang matang pertimbangannya atau dibuat secara tergesa-gesa. Termasuk sebagai penangkal terhadap kemungkinan terjadinya malpraktik di dalam pemerintahan. Batas-batas yang harus ditaati Senat di

tersebut. Senat dilarang membuat dan mengajukan RUU mengenai keuangan. Senat dilarang mengamandemen RUU mengenai keuangan (*supply and appropriation bills*) yang diajukan pemerintah. Senat dilarang mengamandemen setiap RUU mengenai penguasaan cukai dan perpajakan. Puncak keretegangan Senat dan pemerintah pada Juli 1974 - November 1975. Untuk menjatuhkan PM Whitlam, oposisi menggunakan kekuasaan mayoritas di Senat, mengancam menolak RUU Perbekalan (*Supply*) yang diajukan pemerintah. PM Whitlam berhasil menciptakan pembubaran ganda dan mengadakan pemilu Mei 1974, namun Whitlam tetap tidak dapat menguasai kedua majelis. Gubernur Jenderal Sir John Kerr memecat PM Whitlam pada November 1975, dan mengangkat pimpinan oposisi Malcolm Fraser, dan langsung meloloskan RUU *Supply*. Whitlam mengajukan mosi tidak percaya kepada Fraser, dan selanjutnya diadakan pemungutan suara. Fraser tak mendapat kepercayaan dari majelis rendah. Dalam kejadian seperti ini tidak ada cara lain untuk mempertahankan Fraser, kecuali membubarkan kedua majelis. Pada tahap berikutnya adalah diadakan pemilu bagi kedua majelis pada 13 Desember 1975.

Mulai 1980-an, pola hubungan Senat-Pemerintah memasuki era baru. Senat tetap disegani oleh pemerintah. Sejak 1981, pemerintah dan oposisi tidak pernah mencapai posisi mayoritas di dalam majelis Senat. Sejak 1980-an sampai sekarang, kekuatan partai kecil dan kelompok independen mulai diperhitungkan oleh pemerintah maupun oposisi. Sejak masuk dalam kancah Senat pada 1981, *Australian Democrats* (Partai Demokrat) memiliki kekuatan sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara Senat dan *House of Representatives* dapat mengurangi ketegangan hubungan antara kedua lembaga tinggi ini. Di dalam sistem federal, senat dan majelis rendah memegang peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan. Hubungan keduanya harus terjaga keharmonisannya untuk mengurangi ketegangan.

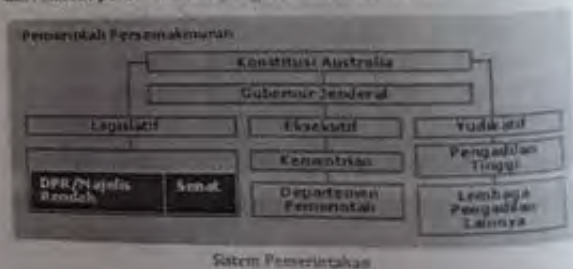
BAB VI SISTEM PEMERINTAHAN

Pengantar

Di dalam negara federal yang menganut sistem pemerintahan parlementer terdapat perbedaan kedudukan antara seorang kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan diduduki oleh perdana menteri yang dibantu oleh para menteri-menteri. Untuk kepala negaranya bisa dipegang oleh seorang Raja, Ratu, kaisar, sultan dan sebagainya. Yang pasti dalam menjalankan tugasnya kepala pemerintahan ialah yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap semua bidang ketatanegaraan. Kepala negaranya biasanya hanya bertindak dalam acara-acara tertentu dan sifatnya seremonial.

Sistem Pemerintahan

Penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri, disebut juga sebagai Dewan Eksekutif Federal. Lebih lanjut berikut ini adalah gambaran dari sistem pemerintahan yang berlaku di Australia.



Sistem pemerintahan yang berlaku di Australia pada dasarnya mengadopsi demokrasi liberal. Karakteristik liberal bukan hanya terlihat dalam bidang politik tapi hampir secara keseluruhan dari kehidupan masyarakat termasuk kebebasan beragama dan mengeluarkan pendapat. Secara konstitusional, kekuasaan eksekutif dipegang gubernur jenderal. Perlu diketahui bahwa dalam pemerintahan Australia, gubernur jenderal merupakan wakil dari Ratu Inggris yang berada di Australia. Namun, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto secara langsung dari Ratu Inggris. Dewan Eksekutif adalah menteri-menteri terdiri dari anggota parlemen dari partai mayoritas di dalam majelis rendah (*HoR*), pemimpinnya disebut sebagai PM.

Gubernur Jenderal



Makna dan Bunga Sebagai Simbol Gubernur Jenderal

Dalam bab II Konstitusi Australia, pasal 61 menyatakan pelaksanaan eksekutif federal berada di tangan Ratu dan diwakili gubernur jenderal sebagai wakil Ratu yang bertanggung jawab melaksanakan dan memelihara Konstitusi dan semua UU Federal. Keluasan gubernur jenderal termasuk mengangkat

jabat negara untuk melaksanakan tugas-tugas departemen federal. Pejabat tersebut yaitu menteri-menteri, merupakan anggota Dewan Eksekutif Federal, dengan kedudukan sebagai menteri Kerajaan bagi negara federal Australia. Ketentuan lain menyebutkan gubernur jenderal adalah Pangkatannya Federal.

Kekuasaan konstitusional gubernur jenderal di antaranya meminta persidangan parlemen, membubarkan majelis rendah, mengesahkan RUU (usulan legislatif), mengontrol pemerintahan eksekutif, dan membuat peraturan-peraturan sesuai ketentuan di Namun, berdasar konvensi mengenai pemerintahan yang bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kewenangan PM dan menteri-menteri. Semua kekuasaan boleh dilaksanakan gubernur jenderal hanya setelah mendapat saran dari Dewan Eksekutif Federal. Pasal 62 menyatakan bahwa Dewan Eksekutif Federal yang memberi saran kepada gubernur jenderal untuk melaksanakan pemerintahan, yang diangkat dan diampai oleh gubernur jenderal sebagai penasihat diadopsi. Kekuasaan konstitusional gubernur jenderal disebut sebagai "reserve power", gubernur jenderal bertindak atas saran dari Dewan Eksekutif Federal. Kekuasaan pemerintahan diselenggarakan oleh PM dan menteri-menteri berdasarkan konvensi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk diadopsi dari konvensi yang berlaku dalam sistem pemerintahan Westminster, telah diselenggarakan oleh Australia sebelum diberlakukannya Konstitusi Australia 1901. Kedudukan PM dan menteri-menteri (kabinet) tidak pernah tercantum dalam Konstitusi, kecuali dalam kerangka ketentuan yang khusus, dengan menyebutnya sebagai Dewan Eksekutif Federal. Kekuasaan gubernur jenderal bersifat seremonial dan simbolis.

Awal 1931, posisi gubernur jenderal dipegang oleh orang-orang Inggris bergelar bangsawan, sejak diberlakukannya Sistem Westminster posisi gubernur jenderal boleh dijabat oleh orang-orang Australia terkemuka, biasanya diberikan kepada pendatang

setia dari partai pemerintah. Pernah terjadi krisis konstitusional 1975, krisis konstitusional terbesar sepanjang sejarah federasi Australia, dan tetap tak terselesaikan, di mana Gubernur jenderal Sir John Kerr menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk "memecat" PM Whitlam. Padahal, kurang dari dua tahun sebelumnya, Sir John Kerr "diangkat" oleh PM Whitlam untuk mengisi jabatan tersebut.

The Dismissal, 1975 - Fact sheet 240

When he assumed leadership of the Liberal Party in March 1975, Malcolm Fraser pledged that the Opposition would only use its Senate numbers to block supply in the 'most extraordinary and reprehensible circumstances'. Fraser cited the loans affair, 1974-75 as an example of these circumstances in his October announcement that the Opposition would defer voting on the Whitlam government's appropriation bills.

Prime Minister Gough Whitlam announced that he would not be forced into calling an early election. The bills were reintroduced and deferred several times. Faced with dwindling funds the government devised a plan to borrow money from banks so it could continue to pay public servants and creditors when supply ran out.

The Governor-General, Sir John Kerr, met with Fraser and Whitlam several times in an attempt to resolve the Senate deadlock. He also received advice from the Attorney-General and the Solicitor-General on the constitutional position. Controversy still surrounds the role of the Chief Justice of the High Court, Sir Garfield Barwick, who provided advice to the Governor-General before the dismissal.

On 11 November at Government House, Sir John advised Whitlam that he was terminating his commission as prime minister and swore in Malcolm Fraser as caretaker prime minister. On the afternoon of 11 November, the Senate passed the appropriation

bills and the two houses were dissolved.

Despite demonstrations across the country, Fraser's Liberal-National Party coalition won the 13 December elections with a devastating swing against the former government. The new Fraser ministry was sworn in on 22 December 1975.

<http://www.nin.gov.au/collection/fact-sheets/fs240.aspx>

Perdana Menteri (PM)

PM tak disebut dalam Konstitusi, namun peranan PM sangat sentral dalam perpolitikan Australia. PM merupakan kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari-hari. Kekuasaan penting PM yaitu memilih menteri-menteri, mereshuffle kabinetya, menurunkan peringkat menteri (dari menteri senior ke menteri muda), "memaksa" pengunduran diri sampai kepada "memecat" menteri-menteri. Kekuasaan penting lainnya, menentukan waktu pelaksanaan pemilu. PM dapat meminta penyelenggaraan pemilu lebih awal. Hal ini terjadi jika PM telah menimbang bahwa kekuatan oposisi sedang berada dalam keadaan tidak solid dan terpecah-pecah melakukan pemilu lebih cepat, karena ingin memperoleh mandat baru yang lebih meyakinkan dirinya, maupun partainya, sehubungan adanya serangan keras dari pihak oposisi.

Kewenangan lain dari PM, melalui departemen yang dipimpinnya, *Department of Prime and Cabinet (PMC)* yaitu melakukan koordinasi terhadap administrasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk mengontrol kebijakan-kebijakan departemen-departemen lainnya. Seorang perdana menteri juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat pejabat-pejabat negara (*power of appointments*). PM juga berwenang mengangkat anggota-anggota komite kabinet, komisi-komisi tertentu, satuan tugas, serta daftar penerima anugerah kerajaan yang seringkali memerlukan tanda tangan PM (menteri-menteri). Jumlah komite kabinet

ditentukan oleh PM sesuai dengan prioritas-prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintahannya. Jenis komite kedua yang dapat dibentuk dan keanggotaannya diangkat oleh PM yaitu komite-komite *ad hoc*. Komite ini bersifat sementara bertugas menyelidiki suatu masalah pemerintahan, serta memberikan rekomendasi kebijakan mengenai masalah tersebut. Dalam beberapa kasus membuat kebijakan terhadap masalah yang diselidiki.

PM adalah juru bicara utama bagi partainya, baik di dalam parlemen maupun di daerah pemilihan, sehingga ia merupakan personifikasi dari partainya bagi para pemilih. Tanggung jawab lainnya, membina hubungan yang baik dengan para *backbencher* partainya di parlemen. PM juga wajib membina hubungan yang efektif dengan organisasi partainya. Bila dalam *leadership challenge*, seorang PM tidak mampu memperoleh dukungan mayoritas anggota parlemen, maka secara praktis yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya sebagai pemimpin parlemen dari partainya, yang sekaligus kehilangan jabatannya sebagai PM.

Menteri

Pada dasarnya seorang menteri bertugas untuk membantu kinerja dari perdana menteri. Para menteri akan mengepalai dan menangani suatu bidang tertentu. Masa jabatan para menteri tergantung pada keberadaan seorang perdana menteri. Jika karena mosi tidak percaya perdana menteri habis masa jabatannya maka demikian juga dengan masa kerja menteri. Tugas utama menteri adalah memimpin satu atau beberapa departemen pemerintahan. Selain memimpin departemen, menteri-menteri juga berwenang membentuk komite-komite departemen, dan perusahaan-perusahaan negara dalam lingkungan departemennya.

Sebagai pemimpin departemen, seorang menteri juga harus bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas departemennya, seorang menteri juga harus mengenali semua

persualan yang berada dalam ruang lingkup tugasnya. Menteri harus benar-benar mengetahui bahwa kepentingan-kepentingan masyarakat sudah diperlakukan secara adil. Tugas menteri lainnya memprakarsai pembuatan RUU. Menteri juga harus memberikan laporan secara teratur kepada partainya, dan kepada parlemen. Sistem pemerintahan Westminster yang diterapkan di Australia mengadopsi sistem *checks and balances*, semua orang yang memiliki otoritas atau kewenangan harus membuat pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka.

Tugas lain menteri adalah bahwa mereka pun mewakili daerah-daerah pemilihan. Sebagai seorang anggota parlemen (*MP*), misi seorang menteri merupakan wakil terpilih dari sesuatu daerah pemilihan. Berdasarkan konvensi pemerintahan yang bertanggung jawab, menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen, baik secara individual (*individual responsibility*) maupun secara kolektif sebagai anggota kabinet (*collective responsibility*). Untuk lebih jelasnya mengenai tugas para menteri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1.	Memimpin departemen
2.	Membentuk komite departemen
3.	Membentuk perusahaan negara dalam lingkungan departemen
4.	Membentuk perusahaan negara dalam lingkungan departemen
5.	Memberikan arahan dan mendampingi birokrat senior
6.	Memantau harian tugas departemen
7.	Mengetahui kepentingan masyarakat secara adil
8.	Mengetahui kasus individual masyarakat
9.	Memprakarsai pembuatan RUU
10.	Memberikan laporan pada partai dan parlemen
11.	Sebagai anggota <i>MP</i> , menteri mewakili daerah pemilihan

12	Menteri bertanggung jawab pada parlemen secara individu dan kolektif/kabinet
----	--

Serangkaian konvensi:

- Kebijakan para menteri harus memperoleh persetujuan kabinet sebelum diumumkan.
- Menteri-menteri harus menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan-keputusan kabinet pada masyarakat.
- Bila tidak mampu melaksanakannya, mereka harus mengundurkan diri.
- Menteri-menteri tidak boleh mengkritik tindakan-tindakan koleganya secara publik.
- Menteri-menteri tidak boleh menyatakan pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah, kecuali bersifat resmi. Menteri tidak boleh mempunyai pendapat "pribadi" mengenai persoalan kebijakan pemerintah.

Aturan-aturan yang muncul dalam konvensi Kabinet para menteri adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan terhadap pertahanan, pulgri, transaksi komersial, dan keuangan.
- b. Kebijakan menteri harus mendapat persetujuan kabinet.
- c. Menteri harus mendukung keputusan kabinet.
- d. Siap mundur jika tidak menepati janji.
- e. Tidak mengkritik tindakan kolega secara terbuka.
- f. Tidak boleh berpendapat pribadi tentang kebijakan pemerintah federal.

Hubungan yang harmonis antara perdana menteri dengan para menterinya sangat diharapkan dan menjadi faktor penting dalam sistem pemerintahan federal. Keharmonisan tersebut dapat terwujud jika ada kesepakatan dan kesepahaman tugas dan tanggung jawab antara menteri dengan perdana menteri. Sebagai pelaksana harian pemerintahan maka seorang perdana menteri

harus mampu membina, membimbing, dan mengkoordinir para menteri sehingga dapat mendukung dan bekerja secara maksimal. Seorang menteri selain paham akan kondisi yang terjadi di departemennya juga tahu betul dengan kebutuhan masyarakat secara umum bukan hanya daerah pemilihan saja. Kontak dan komunikasi antara menteri dan perdana menteri harus selalu dijaga agar dapat menjalankan tugas dan janji yang telah disampaikan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam sistem parlemen, hubungan antara menteri dengan perdana menteri saling memengaruhi. Kontak dan komunikasi antara menteri dan perdana menteri harus selalu dijaga agar dapat menjalankan tugas dan janji yang telah disampaikan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui hubungan baik tersebut, baik perdana menteri dan menteri akan lebih mudah mempertahankan kedudukannya dalam parlemen.

BAB VII

SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN KEPARTAIAN

Pengantar

Pemilihan umum sebagai lambang terbentangnya sebuah pemerintahan yang demokratis. Selain itu juga sistem kepartaian sebagai pondasi dan jalan bagi roda berjalannya partai-partai yang ada. Sistem pemilu di Australia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat, baik ditingkat federal/ nasional maupun di tingkat negara bagian dan teritori. Pada tingkat federal sistem majelis dan keanggotaannya sudah diatur berdasarkan konstitusi. Sistem pemilihan umum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konteks demokrasi. Demokrasi yang berlangsung di Negara Kanguru ini termasuk unik dengan penyelenggaraan yang bertingkat-tingkat. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat memberikan hak suaranya bahkan pemberian hak tersebut lebih dari satu kali. Pesta demokrasi yang berlangsung di Australia bukan hanya diwarnai dengan hingar bingar kampanye partai tapi benar-benar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sehingga rakyat sadar betul akan pentingnya pemilu dan siap memberikan hak suaranya. Ada aturan juga bahwa warga negara yang tidak memberikan hak suaranya akan mendapatkan sanksi yang jelas dengan membayar denda.

Sistem Pemilihan Umum

Demokrasi ala Australia boleh dikatakan sangat kompleks. Ada banyak tabapan yang harus diikuti, ada lima sistem pemilihan umum yang berbeda, tiga sistem pemungutan suara yang berbeda pula. Seorang pemilih harus memilih anggota majelis rendah dan senator pada tingkat federal. Tak hanya itu, pemilih juga memilih anggota-anggota parlemen pada masa rendah dan majelis tinggi di negara bagian masing-masing, dengan masa bakti yang berbeda pula. Kerumitan pemilu masih ditambah lagi bila diadakan pemilu kecil (*by election*) untuk memilih wakil-wakil mereka yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Pemilih masih diwajibkan berpartisipasi dalam pelaksanaan referendum, bila pemerintah yang berkuasa-menghendaki adanya konstitusi.

Pemilu Australia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat di tingkat federal/nasional maupun di tingkat negara bagian dan teritori. Pada tingkat federal, sistem majelis dua-keanggotaannya diatur konstitusi. Majelis bersifat dua-kamar, yaitu majelis rendah dan senat. Majelis Rendah, bernama *House of Representatives (HoR)*, beranggotakan 148, orang dari masing-masing negara bagian secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Keanggotaan majelis tinggi federal (Senat), setengah dari jumlah anggota majelis rendah. Setiap negara bagian memiliki jumlah senator yang sama, masing-masing 12 senator. Kecuali bagi teritori NT dan ACT, yang masing-masing dua senator.

Berdasar konstitusi, setengah dari seluruh 12 senator negara bagian — dan seluruh senator dari teritori (NT dan ACT) — dipilih untuk masa bakti 3 tahun. Sedangkan 6 senator lainnya dipilih 6 tahun sekali. Dengan demikian, setengah dari seluruh senator pensiun di tengah satu periode masa bakti Senat. Ada dua kali masa pemilu bagi pengisian kursi senator, yakni masing-masing negara bagian memilih 12 senatornya, disebut "*Full Senate Election*", dan rakyat di masing-masing negara bagian memilih

memilih 6 senator, disebut *Half-Senate Poll/Election*. Jumlah kuota suara yang dibutuhkan bagi seorang calon senator untuk duduk di kursi senat ketika *full senate elections* adalah 7,7%, sedang pada masa *half-senate elections*, jumlah kuota suara lebih besar lagi, kira-kira 14,3%.

Pada tingkat negara bagian dan teritori, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota parlemen negara bagian dan teritori. Kecuali Queensland, seluruh parlemen negara bagian menganut sistem majelis dua kamar. Negara bagian Queensland telah menghapus majelis tingginya sejak 1922, beserta teritori NT dan ACT, menggunakan majelis satu kamar. Seluruh lima majelis tinggi negara bagian dinamakan Dewan *Legislative Council*; majelis rendah negara bagian dan teritori mempunyai nama yang berbeda. Kecuali majelis rendah di South Australia dan Tasmania yang bernama *House of Assembly*, seluruh majelis rendah negara bagian dan teritori disebut dengan *Legislative Assembly*.

Jumlah anggota yang dipilih dan masa bakti maksimum parlemen di masing-masing negara bagian dan teritori berbeda. Majelis Rendah New South Wales beranggotakan 99 orang, masa bakti maksimum 4 tahun, majelis tingginya mempunyai 45 orang anggota, dengan masa bakti tiga kali masa bakti majelis rendah. Majelis rendah Victoria beranggotakan orang, dengan masa bakti 4 tahun, majelis tingginya anggota 44 orang dengan masa bakti 2 kali majelis rendah. Majelis rendah South Australia beranggota 47 orang masa bakti 3-4 tahun, majelis tinggi memilih 22 anggota untuk masa bakti 6-8 tahun.

Di negara bagian Western Australia, majelis tinggi memilih 34 anggota untuk mengisi masa bakti 6 tahun, sementara 57 anggota majelis rendah dipilih setiap 3 tahun sekali. Majelis rendah Tasmania memilih 35 anggotanya untuk masa bakti 4 tahun, majelis tingginya memilih 19 anggota setiap 8 tahun sekali. Pemilu di Queensland, NT dan ACT diselenggarakan hanya untuk memilih

anggota-anggota majelis rendah Majelis rendah Queensland memiliki 99 anggota setiap 3 tahun sekali, dan AP memiliki 20 anggota majelis rendah setiap 6 tahun sekali. Sistem pemilihan majelis rendah di ACT yang baru diberlakukan pada 1991 diselenggarakan untuk memilih 17 anggota, masa bakti maksimum 1 tahun.

Pemilu bagi 44 anggota Majelis Tinggi Victoria dilaksanakan di 22 daerah pemilihan, masing-masing pemilihan memiliki 2 anggota. Batas maksimum masa bakti majelis tinggi tersebut adalah dua kali masa bakti majelis rendahnya, namun masing-masing anggota dari setiap daerah pemilihan pensiun setiap tahun sekali masa bakti majelis rendah. Setiap empat tahun sekali (satu kali masa bakti majelis rendah) diselenggarakan pemilu untuk mengisi setengah dari anggota majelis tinggi yang pensiun tersebut.

Pemilu anggota Majelis Tinggi Western Australia sedikit berbeda. Seluruh 34 anggota majelis tinggi dipilih dari 6 daerah pemilihan, untuk masa bakti 6 tahun. Tetapi, satu anggota terpilih dari setiap daerah pemilihan tersebut harus pensiun setiap 3 tahun sekali sehingga setiap 3 tahun diselenggarakan pemilu untuk mengisi 6 anggota majelis tinggi yang pensiun. Penerapan sistem majelis baik di tingkat federal maupun negara bagian dan teritori, memiliki dampak yang luas dalam perwakilan politik anggota-anggota parlemen. Sistem perwakilan politik bagi anggota parlemen di Australia tidak hanya mempergunakan satu sistem perwakilan, tetapi semua sistem perwakilan yang ada dipergunakan.

Sistem *proportional representation* atau perwakilan berimbang (in sistem distrik —di Australia umumnya dikenal dengan sebutan *system preferential* (preferensial), karena metode pemungutan suaranya berbeda dengan sistem perwakilan berimbang—digunakan bagi wakil rakyat di parlemen. Sistem perwakilan berimbang yang memungkinkan setiap daerah pemilihan memiliki lebih dari satu anggota parlemen atau dikenal dengan sistem multi-

constituency, diberlakukan dalam pemilihan senator di tingkat federal. Pemilihan majelis tinggi di negara-negara bagian New South Wales, Victoria, South Australia, dan Western Australia serta pemilihan anggota-anggota majelis rendah di negara bagian Tasmania dan teritori ACT.

Sistem preferensial atau sistem distrik, yang menganut sistem *single-member constituencies* di mana setiap anggota parlemen hanya mewakili satu daerah pemilihan, berlaku bagi pemilihan anggota majelis rendah (*HoR*), dan sebagian besar parlemen negara bagian. Negara-negara bagian, seperti New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, dan teritori NT, menganut sistem ini untuk memilih anggota-anggota Majelis Tinggi Tasmania.

Hal yang menarik, tentang penentuan daerah pemilihan bagi majelis yang menggunakan sistem perwakilan langsung. Parlemen negara bagian yang menentukan daerah pemilihan. Daerah pemilihan besar yaitu negara-negara bagian New South Wales dan South Australia, memilih masing-masing 45 dan 22 anggota majelis tinggi, dibagi atas 6 wilayah, setiap wilayah memilih 4-5 calon. Sedang Tasmania membagi negara bagian ke dalam 5 daerah pemilihan, masing-masing daerah pilihan memilih 7 calon anggota bagi majelis rendah. Ada pengecualian, diberikan pada pemilu bagi senator federal. Sesuai konstitusi, negara bagian dan teritori merupakan daerah pemilihan, tanpa mempertimbangkan jumlah populasinya, setiap daerah pemilihan negara bagian memilih 12 senator, masing-masing 2 senator bagi daerah pemilihan teritori NT dan ACT.

Metode Pemungutan Suara

Pemungutan suara di Australia secara umum ada tiga metode, yaitu *Plurality*, *Preferensial*, dan Perwakilan Berimbang. Metode *plurality* (dikenal sistem *the first-past-the post*), diterapkan hanya sampai pada tahun 1918 dalam pemilihan majelis rendah federal.

Penghitungannya sederhana (disebut mayoritas sederhana), calon yang memperoleh suara mayoritas otomatis menjadi anggota parlemen. Metode Preferensial, diterapkan sejak 1919, diterapkan di daerah pemilihan yang menggunakan *single-member constituency*.

Anggota parlemen untuk majelis rendah federal yang dipilih dengan metode ini meliputi negara bagian New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Tasmania, teritori NT, dan majelis tinggi negara bagian Victoria. Partai Buruh pimpinan Whitlam tahun 1974, memperkenalkan kombinasi antara sistem *the first-past-the-post* dengan sistem preferensi, yang disebut sebagai sistem *optional preferential* atau preferensial opsi. Hingga sekarang banyak diterapkan untuk memilih anggota parlemen di negara bagian dan teritori.

Untuk sistem pemungutan suara Perwakilan berimbang diterapkan di daerah-daerah pemilihan yang memakai sistem *multi member-constituency*, meliputi semua daerah pemilihan bagi calon senator federal, anggota majelis tinggi di negara bagian New South Wales, Western Australia, dan South Australia, serta anggota majelis rendah negara bagian Tasmania dan teritori ACT.

Metode perwakilan berimbang mengadopsi dari pemilihan Majelis Rendah Tasmania yang telah dipakai sejak 1909. Metode ini pertama digunakan tahun 1949 untuk pemilihan Senat federal. Dianggap demokratis, sebab pemilih minoritas mampu memilih sejumlah minoritas wakilnya. Peluang partai kecil dan independen untuk memperoleh kursi di parlemen, seperti Partai Buruh Demokratis (*Democratic Labor Party/DLP*) dan Partai Demokrat Australia (*Australian Democrat/AD*). *DLP* menempatkan wakilnya di Senat selama satu dekade (1960-1970), sekarang *DLP* sudah tidak aktif. Untuk keterwakilan senator *AD* dalam Senat sejak 1980 sampai sekarang, semuanya ini berkat adanya sistem Perwakilan Berimbang.

Sistem Kepartaian

Sebagaimana kita ketahui bahwa partai politik merupakan alat bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dengan posisi yang demikian penting dalam sistem pemerintahan demokrasi, maka secara umum partai politik telah diatur dan dimasukkan di dalam konstitusi suatu negara. Demikian juga dengan partai politik yang ada di Australia hanya saja di negara ini, partai politik tidak dicantumkan dalam konstitusinya. Selain itu keberadaan partai politik juga tidak dikontrol oleh perundangan apa pun. Segala sesuatu yang menyangkut kepartaian seperti keanggotaan, perumusan kebijakan, calon partai yang akan masuk dalam parlemen adalah urusan rumah tangga partai sendiri.

Bagaimana cara mengklasifikasikan sistem kepartaian di Australia? Bila ditilik dari jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu, sistem kepartaian di Australia menganut sistem multi-partai. Banyaknya partai yang ikut pemilu memang fluktuatif, tetapi setidaknya ada 15 partai politik dalam setiap pemilu federal. Tahun 1983, sebanyak 55 partai politik mengajukan calon anggota parlemen. Tahun 1987, jumlah partai hanya 21.

Ternyata, jumlah partai kecil lebih banyak daripada partai besar. Padahal, partai kecil tidak memiliki dampak pada sistem politik. Perolehan suara partai sejak federasi, hingga tahun 1954, tak satu pun partai kecil yang memperoleh suara dalam pemilu bagi anggota *HoR*. Baru pada tahun 1955, partai kecil mendapat suara, tetapi suara yang diperoleh tak mencukupi untuk satu kursi pun di majelis rendah. Hal ini bertolak belakang dengan tokoh independen yang tidak menjadi anggota partai politik. Mereka bisa menangkan suara dalam setiap pemilu federal bagi anggota *HoR* sejak 1901. Dalam pemilu federal, tokoh independen juga bisa memenangkan kursi parlemen.

Sistem partai di Australia masih terbuka untuk terus diperlebarkan. Rae mengatakan mengenal sistem dua partai, empat

partai, atau lima partai, serta multi-partai, yang pernah terjadi di Australia. *Democratic Labor Party (DLP/Partai Buruh Demokrat)* atau *Australian Democrat (AD/Demokrat)*, hanya memiliki perwakilan di Senat, tidak memiliki perwakilan di majelis rendah. Keduanya hanya sebagai pengimbang kekuatan di tingkat Senat, tetapi belum berpartisipasi dalam proses politik yang sesungguhnya di majelis rendah.

Sistem kepartaian Australia:

- Sistem "dua partai", Partai Liberal dan Partai Nasional (sebelumnya Partai Country), konsisten membentuk koalisi saat memerintah maupun sebagai oposisi, berhadapan dengan Partai Buruh.
- Sistem "dua-setengah partai", di mana *DLP* (terwakili dalam parlemen sejak 1950-1970-an) dan *AD* (terwakili sejak awal 1980-an hingga sekarang) sebagai pengimbang dari sistem dua partai yang ada.
- Sistem tiga partai, yaitu Partai Buruh, Partai Liberal, dan Partai Nasional. Ketiganya memiliki perwakilan yang menentukan, baik di parlemen federal maupun negara bagian dan teritori.

Berbicara mengenai ideologi, secara umum hanya ada dua kutub ideologi dalam kepartaian Australia yaitu Partai Buruh di kiri dan koalisi Liberal-Nasional di kanan. Partai Buruh berideologi sosialis demokrat, pandangannya tak jauh berbeda dengan beberapa anggota Partai Liberal. Kebijakan partai cenderung bertingkah liberal. Memang ada elemen komunis dalam partai ini, tetapi ada ketakutan akan bahaya komunis di sebagian besar anggotanya.

Partai Liberal, berkoalisi dengan Partai Nasional, berideologi liberal. Sebagian tokoh berpandangan, ada sekelompok kecil kaum liberal, dan sebagian besar kaum konservatif. Kebijakan partai lebih bersifat konservatif. Tak banyak melakukan perubahan dalam sistem politik, cenderung mempertahankan kemampuan

mentanya, yang terdiri kaum industrialis, dan mitra-koalisinya dari pengusaha produk primer di pedesaan. Kedua partai, Partai Liberal dan Partai Buruh, sering menjadi bahan perbincangan. Partai Buruh cenderung mendukung sistem perekonomian campuran (*mixed-economy*), partai AD, partai kecil yang berciri demokral lebih mirip kelompok "oportunis", dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikuti " arus".

Ada empat asumsi yang terkait ideologi kepartaian di Australia:

- Partai di Australia pada hakikatnya bersifat sindikat, fungsi utama mereka melayani kepentingan-kepentingan tertentu.
- Sistem kepartaian bersifat sentripetal, bersaing untuk mendapat suara menengah, berusaha mencapai titik tengah dari spektrum politik, dan sengaja tidak mencantumkan ideologi secara jelas.
- Politik Australia sangat pragmatis, politik "dagang sapi", gaya ideologi sebagai jalan untuk mendapatkan posisi tawar dan kompromi.
- Faktanya, partai politik Australia menggunakan suatu ideologi yang luas dalam keanggotaan mereka, menyulitkan untuk menempatkan anggota suatu partai ke dalam suatu ideologi tertentu.

Undang-undang Pemilu

Sejak UU Pemilu 1902 berlaku, banyak masalah timbul khususnya soal kualifikasi siapa-siapa warga negara Australia yang berhak dipilih dan memilih. Sebagai contoh, wanita, khususnya kulit putih, baru mendapat hak dipilih dalam pemilu federal setelah 1902. Di negara bagian South Australia, wanita telah memiliki hak dipilih sejak 1894, berarti telah menjadi salah satu negara (bagian) di antara sedikit negara dunia, yang memberikan hak pilih kepada wanita. Tahun 1899, negara bagian Western Australia menyusul untuk memberikan hak pilih bagi wanita. Diskriminasi lainnya dialami orang-orang Aborigin, yang belum dianggap sebagai "warga

Australia" Baru pada tahun 1967, kaum Aborigin memperoleh hak pilih, dianggap sebagai kemajuan dalam perpolitikan Australia.

Pimpinan Partai Buruh, Chifley, menyatakan, sesuai UU Kewarganegaraan 1948, "Warga negara Australia akan tetap sebagai British subject bila mereka menghendakinya, dan bahwa seseorang dapat menjadi warga negara Australia bila ia juga adalah British subject, sehingga memiliki kualifikasi memperoleh hak pilih, dan dipilih menjadi anggota parlemen berdasar UU federal dan UU negara bagian."

Tahun 1983, pemerintah Buruh yang dipimpin Hawke, menghapuskan semua status British subject sebagai basis untuk melakukan kegiatan politik. Hanya warga negara Australia yang berkualifikasi untuk berpolitik, sehingga mendapat hak memilih dan dipilih dalam parlemen Australia. Semua negara bagian menerima ketentuan ini, (berlaku secara federal dan seluruh negara bagian) kecuali Queensland, pada tanggal 25 Januari 1984. British subject yang telah tinggal di suatu daerah pemilihan sebelum ketentuan ini berlaku, tetap memperoleh hak memilih, sebaliknya seluruh imigran — termasuk yang berasal dari Inggris — yang tinggal sejak tanggal 25 Januari 1984 dan yang belum mendarat kedatangannya, harus menjadi warga negara Australia terlebih dahulu, untuk bisa memiliki hak pilih dan dipilih sebagai anggota parlemen.

Sesuai konstitusi, warga Australia yang telah berusia 21 tahun dapat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Ternyata, partisipasi politisi untuk meraih kursi parlemen sangat hebat. Tahun 1987, sebanyak 256 calon berebut 76 kursi senator, 250 calon bagi 148 kursi HoR. Sebagian besar mewakili Partai Buruh dan koalisi Partai Liberal-Nasional, partai kecil dan golongan independen. Hingga awal tahun 2016, ada 49 partai politik yang resmi terdaftar di Australian Electoral Commission (AEC), Semacam Komisi Pemilihan Umum-nya Australia. Mayoritasnya adalah partai kecil dengan nama dan misinya yang unik, seperti Partai Hak-hak Perokok hingga Partai Kesehatan Australia. Pemerintah Australia

memberikan hak berdemokrasi kepada semua warganya dan siapa pun berhak membentuk partai politik. Persyaratan pembentukan partai politik harus sesuai dengan ketentuan UU. Salah satu syarat mendirikan partai politik adalah mendaftarkan partainya ke AEC disertai bukti dukungan minimal 500 anggota partai. Maka partai kecil yang dikenal sebagai *minor party* pun bermunculan sehiapsaat. Kemunculan partai kecil tersebut biasanya menjelang pemilu. Nama dan visi-misi *minor party* pun biasanya sangat spesifik, hanya berkaitan dengan isu-isu tertentu. Partai Perokok misalnya, dibentuk di negara bagian New South Wales dan terdaftar kali memperbarui pendaftarannya di KPU pada 16 Juli 2013 silam. Saat dibentuk oleh seorang pekerja IT yang berusia 28 tahun Clinton Mead, partai ini mengusung visi-misi menghapus UU yang mewajibkan kemasan rokok polos. Partai ini juga ingin memperjuangkan hak perokok untuk bisa merokok di mana saja sepanjang tidak merugikan orang lain.

Dalam pemilu tahun 2016 terdapat 49 partai politik yang resmi bisa ikut pemilu yakni: Partai Sustainable Australia, 21st Century Australia, Animal Justice Party, Australian Christians, Australian Country Party, Australian Cyclists Party, Australian Defence Veterans Party, Australian Equality Party, Australian Greens (including three additional branches), Australian Independents, Australian Labor Party (ALP) (including nine additional branches), serta Australian Liberty Alliance. Kemudian Australian Motoring Enthusiast Party, Australian Progressives, Australian Sex Party, Australians Against Paedophiles Party, Bullet Train For Australia, Christian Democratic Party (Fred Nile Group), Citizens Electoral Council of Australia, Country Liberals (Northern Territory), Drug Law Reform Australia, dan Family First Party. Selain itu Future Party, Glenn Lazarus Team, Health Australia Party, Help End Marijuana Prohibition (HEMP) Party, Jacqui Lambie Network, John Madigan's Manufacturing and Farming Party, Katter's Australian Party, Liberal Democratic Party, Liberal Party of Australia (including

seven additional branches], serta National Party of Australia. Berikutnya Nick Xenophon Team, Non-Custodial Parents Party (Equal Parenting), Online Direct Democracy - (Empowering the People), Outdoor Recreation Party (Stop The Greens), Palmer United Party, Pauline Hanson's One Nation, Pirate Party Australia, Republican Party of Australia, Rise Up Australia Party, Secular Party of Australia, serta Senior United New South Wales (NSW).

Dari 49 partai yang mendaftar di AEC dalam pemilu federal tahun 2016, ternyata tidak semuanya bisa bertahan. Hal ini berkaitan dengan jumlah keanggotaannya. Jika keanggotaan partai politik sudah tidak mencukupi syarat awal sesuai uraian di atas yaitu 500 orang pemegang kartu anggota, maka secara otomatis partai politik tersebut dikeluarkan dari daftar keikutsertaan dalam pemilu. Hal itu pernah dialami oleh Partai Seks, Australian Sex Party pada 5 Mei 2015. Partai yang mengusung hak-hak pekerja seks komersial ini dikeluarkan dari daftar keikutsertaan dalam pemilu tingkat federal karena menurut AEC, keanggotaannya tidak memenuhi syarat lagi. Akhirnya, partai ini gencar meminta para pendukungnya untuk menggunakan media sosial, memposting fotonya masing-masing untuk membuktikan dukungannya kepada partai. Partai ini akhirnya terdaftar kembali setelah memenuhi syarat dimaksud. Dalam pemilu sebelumnya, Partai Seks berhasil mendudukkan Fiona Patten di parlemen tingkat negara bagian Victoria di Melbourne. Partai Seks dibentuk oleh kelompok industri hiburan orang dewasa bernama Eros Association tahun 2009 karena menurut para pendukungnya saat itu parlemen di Australia terlalu didominasi oleh pengaruh ideologi keagamaan. Salah satu minor party dengan isu spesifik yang berhasil mendudukkan senatornya di Parlemen Australia dari kota Canberra pada Pemilu September 2013 lalu, adalah Australian Mooting Enthusiast Party (AMEP). Senatornya bernama Ricky Lee Muir.

Sebenarnya, keberhasilan Partai AMEP meloloskan seorang senator terjadi karena sistem perhitungan suara dalam Pemilu

Australia mengenal adanya preferensi, alias pelimpahan sisa suara ke caleg lain. Perolehan suara Senator Muir sendiri tidak begitu banyak yaitu hanya 17.122 suara atau 0,51, namun setelah melewati beberapa putaran perhitungan preferensi, dia kelimpahan suara menjadi 14,3 persen. Di Senat, dia memperjuangkan aspirasi para pencinta mobil, motor, truk termasuk gaya hidup dan budaya di reputar dunia otomotif. Calon anggota parlemen untuk bisa dicalonkan memberikan uang jaminan (A\$250 bagi HoR, dan A\$500 bagi kursi Senat), uang dikembalikan jika persentase perolehan suara minimumnya dapat tercapai. Untuk Senat, uang dikembalikan kepada calon senator yang memperoleh suara minimum 4% dari perhitungan preferensi pertama, untuk partai juga 4%. Untuk HoR, juga harus memperoleh suara minimum 4% di daerah pemilihannya. Tahun 1987, sebanyak 149 calon senator dan 120 calon anggota HoR terkena denda, uang jaminan tidak dapat dikembalikan. Ada hal yang perlu diperhatikan bahwa Australia termasuk salah satu bangsa demokratis di dunia, karena pemungutan suara dibuat wajib secara hukum. Para pemilih yang tidak hadir dalam tempat pemungutan suara (tanpa alasan yang kuat) dapat didenda, dianggap melanggar UU.

Ketentuan yang mewajibkan pemilih berlaku pertama kali dalam pemilihan federal tahun 1924, diadopsi dari pemilu di negara bagian Queensland tahun 1915. Kemudian seluruh negara bagian mengikuti: Victoria (1927), New South Wales (1930), Tasmania (1931), South Australia (1939), dan Western Australia (1944). Sebelumnya, tahun 1911 pemerintah federal menetapkan setiap warga negara Australia berusia 18 tahun wajib sebagai pemilih, sekarang diturunkan lagi menjadi usia 17 tahun sebagai pemilih. Perkecualian, tidak wajib menjadi pemilih hanya untuk pejabat pemerintah dan hakim.

Sanksi bagi pemilih yang tidak hadir dalam pemilu karena alasan yang tidak kuat cukup besar. Australia pernah menerapkan denda sebesar 10 dolar bagi warga negaranya yang tidak mau

mengikuti pemilu. Sebelum diterapkan wajib memilih, yang hanya (berpartisipasi) memilih dalam pemilu federal dan negara bagian hanya 47% (1903) hingga 59% tahun 1922, setelah diwajibkan menjadi rata-rata 90%. Dampak positifnya, ada efisiensi tenaga dan biaya. Sebelumnya, partai-partai politik harus menyediakan transportasi dan biaya lainnya, untuk menjemput pemilih agar hadir dalam pemilihan. Setelah diberlakukan wajib hadir, hal itu tak terjadi lagi. Mengenai hak-hak dari suku asli yaitu Aborigin Australia mulanya tidak memberikan izin sama sekali untuk dapat ikut dalam pemilihan umum. Aborigin dapat ikut serta memberikan hak suara atau hak berpolitik jika diberi izin oleh negara bagian dalam pemilu setingkat negara bagian. Pada tahun 1962 suku ini mendapatkan izin untuk mendaftar menjadi pemilih. Dan tahun 1983 hak-hak untuk memilih dan dipilih bagi Aborigin disetarakan dengan penduduk Australia. Kemudian pada tahun 1992 Neville Bonner menjadi orang Aborigin pertama yang duduk di parlemen Australia mewakili Queensland hingga tahun 1999.

Isu Gender Dalam Sistem Politik Australia

Sebagai negara maju yang demokratis, pemerintah Australia memberikan kebebasan dan hak kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Dilihat dari sejarah perkembangannya, kebijakan gender sudah diterapkan oleh negeri kanguru ini satu tahun semenjak pernyataan kemerdekaannya. Kebijakan tersebut sudah ada melalui Amandemen Commonwealth Franchise Act pada tahun 1902. Hak pilih kepada perempuan pada tahun tersebut hanya yang memiliki kulit putih atau keturunan Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Pemberian hak dan pengakuan terhadap keterwakilan perempuan ada pada tingkat federal dan negara bagian. Untuk lembaga-tinggi parlemen, pengakuan pemerintah terhadap keterwakilan perempuan ada pada tahun 1943. Selanjutnya pada tingkat negara bagian khususnya New South Wales justru telah ada sejak tahun 1894 dengan bukti adanya hak pilih bagi perempuan dalam pemungutan suara. Negara bagian

beritanya yang telah mengakui adanya hak perempuan sebelum kemerdekaan Australia adalah Australia Barat sejak tahun 1899.

Hak politik bagi kaum perempuan bukan hanya sebatas ikutsertaannya dalam pemungutan suara namun juga aktif sebagai anggota parlemen baik Majelis Tinggi, Majelis Rendah bahkan Gubernur Jenderal - sosok yang mewakili Ratu Inggris. Pengaturan seberapa besar jumlah partisipasi perempuan dan keterwakilannya dalam parlemen tidak diatur dalam perundangan sehingga sangat tergantung dari kebijakan masing-masing partai yang berhasil memenangkan pemilu. Kuota untuk perempuan dari masing-masing partai juga berbeda tergantung cara pandang partai dalam melihat isu-isu gender. Adapun partai-partai yang memiliki kebijakan dengan memberikan kuota tinggi terhadap perempuan untuk terlibat aktif dalam parlemen adalah Partai Buruh, Partai Green dan Partai Australia Demokrat. Berikut ini akan dijelaskan aktivitas politik dari partai-partai tersebut dengan memberikan kesempatan kepada anggota perempuannya untuk terlibat aktif dalam kancah politik baik tingkat negara bagian maupun federal.

Untuk mengetahui efektivitas implementasi kuota perempuan dalam parlemen adalah melalui femocrat. Lebih lanjut, Femocrat merupakan sebuah istilah yang merujuk pada kelompok feminis yang dalam perjalanan karirnya pernah terlibat langsung dalam politik praktis di parlemen dan menduduki jabatan sebagai pejabat atau pembuat kebijakan yang responsif gender (pro-perempuan). Kelompok feminis ini tergabung dalam organisasi yang dikenal dengan istilah *Women's Electoral Lobby (WEL)*. Organisasi ini sudah lama berdirinya yakni sejak tahun 1972. Masyarakat Australia mengenal WEL sebagai sebuah organisasi atau kelompok tekanan (*Pressure Groups*) yang aktivitasnya seputar isu-isu moral yang berkaitan dengan hak-hak perempuan untuk menentang terdorong-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak responsif gender. Aktivitas lainnya adalah memengaruhi pembuatan kebijakan publik agar lebih berpihak kepada permasalahan yang

dihadapt perempuan tanpa harus menduduki kelas-kelas secara formal dalam pemerintahan. Untuk memenuhi kepingannya tersebut, WEL tidak segan-segan melakukan kerjasama dengan pemerintah baik dalam tingkat negara bagian maupun federal.

Sebagai kelompok penekan, WEL juga melakukan kerjasama dengan berbagai partai politik yang memiliki kebijakan respons gender antara lain dengan Partai Buruh (*Australian Labor Party/ALP*), Partai Hijau (*Green Party*) dan Partai Demokrat (*Australian Democrat Party*). Jika dilihat dari sistem politik Australia, Partai Hijau merupakan salah satu partai kecil yang belum pernah mendudukkan anggotanya sebagai perdana menteri namun partai ini memiliki senator perempuan pada tahun 2003. Di tingkat negara bagian khususnya New South Wales, Partai Hijau memiliki tiga orang wakil perempuan dan memiliki target 50% anggotanya menjadi perwakilan politik baik tingkat negara bagian maupun nasional. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh Partai Hijau adalah demokrasi akar-rumpun, keadilan sosial dan persamaan peluang, kearifan terhadap lingkungan, tidak menggunakan cara kekerasan, desentralisasi, ekonomi yang berbasis pada komunitas dan keadilan ekonomi, feminisme dan kesetaraan gender, penghormatan terhadap keberagaman, tanggung jawab personal dan global, berorientasi pada masa depan dan berkesinambungan.

Selain prinsip-prinsip yang telah diuraikan sebelumnya, Partai Hijau juga memegang komitmen sebagai wujud tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

We have inherited a social system based on male domination of politics and economics. We call for the replacement of cultural ethics of domination and control with more cooperative ways of interacting that respect differences of opinion and gender. Human values such as equity between the sexes, interpersonal responsibility and honesty must be

developed with moral conscience. We should remember that the process that determines our decisions and actions is just as important as achieving the outcome we want."

Sementara itu, keterwakilan perempuan untuk Partai Demokrat selain pada Majelis Rendah juga ada pada Senat. Dalam sejarah partai ini, Lyn Allison pernah menduduki jabatan sebagai wakil ketua Majelis Rendah pada tingkat federal. Sejarah juga mencatat nama pada tahun 1981, salah seorang dari Partai Demokrat yakni Elizabeth Kirby berhasil menduduki jabatan sebagai anggota Parlemen di negara bagian New South Wales. Keterwakilan perempuan dari Partai Demokrat dalam panggung politik kembali terulang pada tahun 1986. Pada saat itu ketua dari Partai Demokrat yakni Haines menjadi perempuan pertama yang memimpin partai politik di tingkat federal. Keaktifan anggota perempuan dari Partai Demokrat dalam kancah politik sempat mengalami penurunan pada tahun 2003 yang hanya bisa mendudukkan lima anggotanya dalam parlemen. Dalam jabatan sebagai Senat federal, partai ini hanya bisa mendudukkan dua orang anggotanya diantara tujuh anggota Majelis Tinggi.

Upaya lain terkait isu-isu perempuan adalah adanya Komisi Hak Asasi yang dikenal dengan *Gender Equality Blueprint* (GEB) sejak tahun 2010. Isi GEB menetapkan rekomendasi dalam lima bidang yakni: (1) Ensuring women's lifetime economic security. Pada bidang, perempuan Australia memiliki hak untuk meningkatkan potensi dan kemampuannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan harkat dan martabatnya. Pemenuhan kebutuhan dan harkat tersebut pada gilirannya dapat meningkatkan keamanan ekonominya sehingga tidak tergantung pada laki-laki. (2) Promoting women in leadership. Bidang ini memberikan kesempatan dan peluang kepada para perempuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin dalam jabatan di luar sektor domestik (rumah tangga). Perempuan berhak

untuk berkembang pada profesi di luar rumah. (3) *Prevention violence against women and sexual harassment* Bidang ini memberikan perlindungan kepada perempuan dalam melawan tindakan-tindakan yang bersentuhan dengan isu perempuan bersaga biologis dan psikologis seperti kekerasan dan pelecehan seksual. (4) *Strengthening national gender equality laws, agencies and monitoring* Bidang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memperkuat persamaan gender melalui perundang-undangan (hukum), agen dan monitoring (kontrol) terhadap segala kebijakan pemerintah yang terkait isu gender.

Kemampuan dan potensi perempuan yang terlibat aktif dalam politik dapat diidentifikasi melalui komisi yang ada dalam GEB. Hal ini termasuk juga kemampuan perempuan dalam memimpin dalam jabatan yang terkait dengan sektor publik sehingga tercapai kesetaraan kuota dengan kaum pria. Ukuran terhadap keberhasilan kepemimpinan perempuan dalam sektor publik dapat dilihat dari kemampuannya dalam menduduki jabatan publik dan pembuatan keputusan untuk publik. Antara lain pada bidang akademis, jasa pelayanan publik, keanggotaan dalam Parlemen dan Senat dalam hal hukum, olahraga dan industri. Jika diamati lebih lanjut, keterwakilan perempuan dalam sektor publik menurut *Equal Opportunity in the Workplace Agency* (EOWA) memiliki keuntungan tersendiri. EOWA merupakan suatu badan yang berada dalam struktur pemerintah. Bidang kerjanya adalah dengan melakukan survei untuk menangani masalah diskriminasi seks terhadap perempuan (lemahnya peran sosial perempuan - ketimpangan gender) dalam bidang pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan sektor publik.

Hasil yang diperoleh dari EOWA terkait masalah ketimpangan gender (peran sosial perempuan) menunjukkan masih minimnya peran perempuan dalam keterwakilannya di bidang perkantoran baik dalam lembaga pemerintah atau publik. Menurut EOWA ada beberapa keuntungan dengan adanya keterwakilan perempuan

dalam sektor publik yakni: (1) umumnya perempuan memiliki potensi yang tidak kalah dengan sejawatnya yang laki-laki namun kecenderungannya justru talenta dan bakat tersebut tidak ditunjukkan dan kurang percaya diri. (2) perempuan cenderung tidak terlalu berambisi untuk berebut dengan koleganya dalam pencarian kedudukan atau jabatan dalam kerja. (3) Perempuan dianggap sebagai investasi yang berharga. Hal ini diperkuat dengan Goldman Sachs seorang peneliti gender yang menjelaskan bahwa dengan mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan memiliki implikasi besar terhadap perekonomian negara, antara lain karena ketelitian dan kesabarannya sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara. (4) Masih banyak bidang yang melibatkan perempuan namun belum maksimal. Jika meningkatkan jumlah perempuan untuk berperan dalam sektor publik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi Australia. (5) Meningkatnya jumlah perempuan dalam sektor publik dapat mengurangi rasio ketergantungan dengan laki-laki, meningkatkan tingkat tabungan rumah tangga dan pajak yang diterima pemerintah.

Redistribusi Daerah Pemilihan Dalam Praktik Gerrymander

UU Pemilu Persemakmuran 1902, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan besar terjadi pada UU Pemilu pada 1983, di mana peran Komisi Pemilu Australia (*Australian Electoral Commission*) semakin mandiri. Tugas komisi ini melaksanakan UU Pemilu, mengubah cara di mana batas-batas daerah pemilihan akan didistribusikan, mengadakan pendaftaran bagi partai politik pada tingkat persemakmuran/federal, dan mencatat pengumpulan dana publik bagi partai politik, serta menjelaskan donasi masyarakat yang diberikan kepada partai secara terbuka.

Komisi Pemilu Australia tahun 1983 memiliki tiga orang anggota, ketua dijabat hakim dari Pengadilan Federal, bertugas penuh waktu, Komisaris Pemilu bekerja penuh, dan ketua tetap dijabat dalam struktur pegawai negeri Persemakmuran, bertugas penuh waktu. Tugas utamanya, memprakarsai redistribusi daerah-

daerah pemilihan di mana saja. Keseimbangan jumlah pemilih antar daerah pemilihan suatu negara bagian penting dalam daerah pemilihan yang menggunakan sistem *single-member seat*.

Masalah *maldistribution* dirasakan partai besar, terutama partai Buruh, sering dirugikan dengan ketidakseimbangan jumlah pemilih sulit mendapat kursi lebih banyak. Yang diuntungkan, partai kecil dan independen dalam meraih kursi. Menurut Partai Buruh *maldistribution* cenderung meningkatkan kecurangan dalam pemilu, salah satu kecurangan yang umum terjadi sehubungan dengan *maldistribution* jumlah pemilih adalah praktik *gerrymander*. Praktik *gerrymander* sering terjadi di daerah pemilihan yang *maldistribution* terutama di daerah pedesaan.

Secara harafiah, *gerrymander* adalah perbuatan (dalam hal ini pemarikan batas-batas daerah pemilihan) yang dengan sengaja dilakukan untuk menguntungkan partai-partai tertentu, dengan merugikan partai lainnya. Praktik *Gerrymander* terjadi dalam pemilu Majelis Tinggi Western Australia pada 1971, ada ketidakseimbangan antara suara pemilih bagi partai tertentu dengan jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai tertentu. Partai Buruh untuk memperoleh suara 46% hanya memperoleh 6 kursi, sementara Partai Liberal hanya dengan 27,3 suara bisa mendapat 9 kursi, sedangkan Partai Country malah hanya memperoleh 3,3% untuk mendapat 2 kursi, berarti mendapat setengah dari kursi yang diperoleh Partai Buruh. Secara keseluruhan, Partai Liberal dan Partai Country mendapat 11 kursi dengan dukungan 32,6%.

Postscript: Pemilu 3 Oktober 1998

Sejak federasi 1901, Pemilu 3 Oktober 1998, merupakan pemilu ke-43 dan pemilu pembubaran ganda (*double dissolution*) yang ke-7 dalam sejarah politik Australia. Pemilu ini terpaksa dilakukan sebelum habis masa jabatan pemerintah berkuasa, karena Rencana 10 butir PM Koalisi Liberal-Nasional John Howard ditolak 3 kali oleh Senat yang dikuasai Oposisi.

Sejak awal, Howard memang membuat kebijakan yang tidak populer, berlampak pada pemecatan pegawai negeri, memotong dan menghapus berbagai tunjangan sosial dan kesehatan (*medicare* dan kredit untuk mahasiswa). Dengan alasan mengurangi belanja anggaran, Howard melakukan privatisasi perusahaan telepon, menutup pelayanan bank klinik, serta sekolah di kota kecil. Semua ini membuat warga Australia tidak simpati. Masih ditambah lagi persoalan, Howard mendukung salah satu perusahaan perkapalan Australia, memecat 2000 anggota buruh pelabuhan. Namun, Pengadilan Tinggi memutuskan perusahaan tersebut harus mempekerjakan kembali buruhnya.

Terhadap isu rasisme, Howard diam. Justru menjadikan Pauline Hanson, dapat mendirikan partai rasis, Partai Satu Bangsa (*One Nation Party/ONP*), berhasil mendapat 23% suara dalam pemilu di negara bagian Queensland. Walau didera berbagai masalah di atas, hasil pemilu tetap menjadikan PM Howard berkuasa kembali, Partai Koalisi Liberal-Nasional meraih 79 kursi dari 148 kursi *HoR*, sedang Partai Buruh hanya 69 kursi *HoR*. Sementara *ONP* gagal memperoleh kursi di parlemen, ini menjadi kabar menggembirakan khususnya warga Asia di Australia. Dengan demikian, isu rasisme tak menjual sebagai *platform* partai. Kebijakan *ONP* di antaranya menurunkan imigran Asia menjadi nol persen, penghapusan kebijakan multi-kultural di Australia, dan memotong pembiayaan terhadap kaum Aborigin.

Dengan memegang prinsip multikultural dan liberal maka setiap kampanye partai yang mengandung isu rasis tidak akan mendapat simpati masyarakat. Partai juga harus paham betul dengan kondisi dan kebutuhan rakyat dari daerah yang diwakili. Sehingga ketika ada wakilnya yang terpilih sebagai anggota parlemen, janji-janji yang pernah disampaikan selama kampanye akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika janji tidak dilaksanakan, maka yang bersangkutan siap mundur sebab jika tidak mau mundur akan dipaksa mundur oleh parlemen.

BAB VIII

PARTAI BURUH

Pengantar

Dalam bagian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang salah satu partai besar yang berada di Australia. Partai Buruh merupakan partai tertua yang sampai sekarang tetap eksis bahkan pernah mendudukkan wakilnya sebagai Perdana Menteri Perempuan pertama dalam sepanjang sejarah. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan yang ingin diraih adalah keluwesan dan kedudukan politik. Partai Buruh sebagai partai tertua di Australia sejak berdiri hingga sekarang tidak pernah melakukan koalisi dengan partai mana pun.

Partai Buruh

Australian Labor Party (ALP), dikenal sebagai Partai Buruh, salah satu partai yang unik, sebab tidak pernah berkoalisi dengan siapa pun, baik saat memerintah maupun sebagai oposisi. Partai ini berani membuat perubahan-perubahan baru dalam sistem politik Australia. Bandingkan dengan Partai Liberal yang selalu berkoalisi dengan Partai Country (berganti nama jadi Partai Nasional) saat berkuasa maupun sebagai oposisi. Partai Buruh pernah menjadi oposisi relatif lama 23 tahun (1956-1972). Partai



Lambang Partai Buruh Australia

... bangki saat menang pemilu tahun 1972, dan 1983-1996, di bawah kepemimpinan PM Bob Hawke, dilanjutkan PM Paul Keating, Partai Buruh mengalami kesulitan besar setelah mengalami perpecahan tiga kali, 1916 terkait wajib militer dalam Perang Dunia I, tahun 1929 adanya tokoh yang membangkang terhadap Lembaran *Premiere Plan*, dan tahun 1955 terkait masalah komunisme.

Sebagai organisasi yang berhaluan sosialis demokratis, Partai Buruh mempunyai: (1) kewenangan untuk menyalurkan kembali kekuatan sosial politik dari anggotanya untuk lebih berpartisipasi dalam mengontrol lembaga dan kemitraannya guna mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga kepartaian terbesar di Australia. (2) Mendirikan dan mengembangkan perusahaan dalam sektor publik baik bidang sosial dan ekonomi berdasarkan pada potensi yang ada dari masyarakat pada level negara bagian dan federal. (3) Partai memiliki hak untuk melakukan kontrol sebagai lembaga yang demokratis terkait kepemilikan sumber daya alam Australia demi kebaikan seluruh masyarakat. (4) Partai berwenang untuk memelihara dan mendukung persaingan anti monopoli dalam bidang privat termasuk bisnis yang berskala kecil seperti peternakan. Pengelolaannya dengan garis pedoman dan obyektif berdasarkan pada petunjuk dan tujuan yang jelas. (5) Partai Buruh memberikan pengakuan terhadap hak pemilikan tanah yang bersifat individu. (6) Partai Buruh memberikan dukungan untuk menyemangati dan memotivasi para anggotanya untuk mendapatkan perlindungan dan memajukan organisasi. (7) Sebagai partai yang didominasi oleh kaum pekerja, Partai Buruh mengaplikasikan nilai-nilai demokratis dalam bidang industri dengan memberikan kesempatan kerja bagi seseorang untuk bekerja dengan rasa aman dan nyaman, mendapatkan tunjangan kesehatan dan sebagainya.

Sejarah Partai Buruh

Partai Buruh merupakan satu-satunya partai tertua di wilayah Australia yang sudah berdiri sejak akhir abad ke-19. Dalam perjalanannya, partai ini pernah menjadi koalisi selama 23 tahun yakni dari tahun 1949 hingga 1972. Menurut sejarah, Partai Buruh terbentuk karena adanya pemogokan secara massal yang dilakukan oleh kaum buruh. Organisasi kaum buruh mengalami perpecahan pada tahun 1916 karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya wajib militer. Perpecahan berikutnya terjadi pada tahun 1929 melalui kebijakan *Premiers Plan* dan pada tahun 1951 mengenai isu komunisme yang berkembang dalam partai. Partai ini selain mengalami masa kejatuhan akibat perpecahan, juga sempat berjaya pada masa kepemimpinan Ben Chifley pada tahun 1945 dan pada tahun 1983-1992 ketika era Bob Hawke. Sebagai partai tertua yang berhaluan sosialis demokrat, Partai Buruh memiliki tiga faksi dalam organisasinya. Faksi-faksi tersebut adalah sayap kanan yang cenderung konservatif, faksi tengah yang demokratis dan pragmatis dan faksi kiri yang cenderung sosialis. Saat parlemen federal berkembang, Partai Buruh merupakan kekuatan kecil dari tiga partai lainnya, partainya kaum liberal *Protectionist* dan *Free Trade* penyudara kaum konservatif. Partai Buruh dapat memegang kekuasaan mayoritas pada pemilu 1910. Partai ini dijuluki sebagai "makan sosialis", dianggap memberikan manfaat bagi kaum buruh.

Banyak tantangan dan hambatan dialami Partai Buruh PM Buruh William Morris Hughes, mengambil kebijakan mengenai wajib militer, untuk memelihara kontribusi pasukan Australia dalam PD I. Sayangnya, kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan partai, dan menyinggung unsur-unsur orang Irlandia di dalam partai. Kelompok pro wajib militer, dengan pelopor PM Hughes, dipecat dari partai dan bergabung dengan kelompok oposisi. Akhirnya, Hughes berhasil menjatuhkan Pemerintahan Buruh, lalu membentuk pemerintahan baru dengan bendera Partai Nasionalis.

sada 1917, dan berkuasa hingga 1922. Sementara Partai Buruh menjadi oposisi sampai 1929.

Tahun 1929 menang pemilu, perpecahan terjadi lagi, Partai Buruh dibawah PM James H Scullin. Lewat kebijakannya bernama *Revenue Plan*, mengharuskan negara bagian mengurangi anggaran belanja untuk menyeimbangkan budget. Kelompok pembangkang IA Lyons didukung PM New South Wales Jack Lang, tidak mau melaksanakan kebijakan tersebut. Scullin tidak mengurangi belanja negara, malah menunda cicilan pembayaran kredit dan bunga dari Pemerintah Inggris. Akhirnya Lyons bergabung dengan oposisi non-Buruh, memimpin partai baru bernama *United Australia Party*. Pemerintahan Schullin pun jatuh, kalah dalam pemilu 19 Desember 1931. Lyons melalui UAP berhasil memimpin pemerintahan dua periode (1931-1934 dan 1934-1937).

Tahun 1941, Partai Buruh di bawah John Curtin membangun koalisi. Curtin memanfaatkan tuntutan rakyat menghenjaki Australia ikut dalam peperangan, akhirnya menang pemilu 1943. Partai ini berhasil memperluas kekuasaan federal dan melakukan nasionalisasi kekuasaan. Bisa dikatakan, periode 1941-1949 sebagai masa kejayaan Partai Buruh di bawah pimpinan Curtin, dilanjutkan Joseph Benedict Chifley sejak 1945. Partai Buruh pun dianggap Partai Liberal sebagai pemecah belah, terlalu memaksa, dan bersifat sosialis. Partai Liberal sebagai oposisi terus menekan, sehingga pada pemilu 1949 Partai Buruh kalah. Masa jaya Partai Buruh dilanjutkan pada Pemerintahan Buruh Bob Hawke tahun 1983-1992 dengan landasan bagi "negara kesejahteraan" dengan membentuk *Commonwealth Employment Service*, dilanjutkan Keating sampai 1996.

Pada kampanye pemilu 1949, Partai Buruh melemah. Kebijakan negara tidak didukung, kebijakan nasionalisasi perbankan mendapat tantangan dari dunia usaha. Pihak oposisi mempermasalahkan program kesejahteraan sosial, perluasan distribusi pasukan

Australia pada masa perang, dan mengahklai masalah keberadaa unsur-unsur komunis di Partai Buruh. Partai Buruh pun kalah dalam pemilu, dan menjadi oposisi selama 23 tahun (1949-1972).

Terkait bahaya komunis yang ditontarkan koalisi Liberal-Country, membuat banyak elemen antikomunis keluar dari Partai Buruh. Elemen anti komunis, kelompok industrialis dan beragama Katolik dalam Partai Buruh, lalu mendirikan *Democratic Labor Party (DLP)*. DLP menempatkan Partai Buruh di luar kekuasaan, menyatakan Partai Buruh dan kebijakannya sangat membantu berkembangnya komunisme. Pemimpin Partai Buruh Dr. HV Evatt sejak tahun 1951 tak bisa mengangkat citra partai. Penggantinya, Arthur Calwell, tetap kalah dalam pemilu, titik terendah dan kekalahannya pada pemilu 1966. Partai Buruh, setelah oposisi selama 23 tahun, dapat menang pemilu lagi pada 1972 di bawah Whitlam. Pemerintahan PM Whitlam melaksanakan berbagai kebijakan reformasi, namun ditentang keras oposisi LP-NP, dengan tuntutan pembubaran Parlemen dan Senat (*double dissolution*). Gubernur jenderal Sir John Kerr akhirnya memecat Whitlam dari jabatan PM, dan hal ini sebagai pertanda terjadinya krisis konstitusional di Australia.

Tahun 1975-1983, Partai Buruh menjadi oposisi. Bill Hayden, pemimpin partai, berusaha bangkit. Hayden merumuskan agar citra pemerintahan yang bertanggung jawab secara ekonomi sejalan dengan perubahan ekonomi dunia. Struktur partai bersifat nasional lebih diperluas. Pimpinan Partai Buruh beralih ke Bob Hawke. Pemilu 1983 dimenangkan Partai Buruh di bawah Hawke. Partai ini berkuasa relatif panjang selama 23 tahun (jaman keemasan). 1985-1992 di bawah Hawke, dan 1992-1996 di bawah Paul Keating. Pemimpin Partai Liberal mengeskplotasi masalah wewenang ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Paul Keating dalam pemilu 1996 pun kalah. Pimpinan Partai Buruh beralih ke Kim Beazley, dan tetap disegani oleh lawan politiknya.

Ideologi dan Kebijakan

Ideologi Partai Buruh ada dalam Mukadimah tujuan partai, dirumuskan pada Konferensi Nasional 1981. Partai Buruh mengambil ideologi "Sosialisme Demokratis" (*Democratic Socialism*), tertulis sebagai berikut:

Partai Buruh Australia adalah partai Sosialis Demokratis, yang mempunyai tujuan mengadakan sosialisasi demokratis terhadap bidang-bidang perindustrian, produksi, distribusi dan pertukaran, sampai suatu tingkat yang diperlukan untuk menghapuskan segala bentuk penindasan dan kekuatan-kekuatan anti sosial lainnya dalam bidang tersebut.

Pada Konferensi Nasional 1921, menghasilkan tiga keputusan penting, selanjutnya digunakan sebagai ideologi Partai Buruh.

- a. Pertama, perlunya sosialisasi bidang-bidang perindustrian, produksi, distribusi dan pertukaran.
- b. Kedua, mengadopsi Deklarasi Blackburn, "sampai pada tingkat yang diperlukan, menghapus eksploitasi dan kekuatan-kekuatan antisosial lainnya dalam bidang-bidang tersebut."
- c. Ketiga, pemilu harus diperjuangkan, tidak atas dasar tujuan, melainkan melalui metode-metode yang dipakai untuk melaksanakannya berdasarkan kebijakan partai yang terperinci.

Keputusan ini ditentang kelompok Sosialis kiri, dipandang mengubah status partai dari seekor "macan sosialis" menjadi seekor "sapi suci". Dalam perjalanan selama 23 tahun (1950-1972), kebijakan partai yang bersifat sosialis banyak merugikan partai. Kekalahan terus mendera, Partai Buruh banyak sebagai oposisi. Partai Liberal selalu menyerang tentang berkembangnya sosialisme dan komunisme bila Partai Buruh memimpin pemerintahan.

Tahun 1970-an, perdebatan mengganti tujuan partai marak. kaum tengah ingin mengganti tujuan partai agar tak menakutkan

bagi pemilih, kaum Sosialis kiri, tujuan partai sesuai Debraana Blackburn. Puncaknya, Partai Buruh kalah pemilu pada 1977, gagasan untuk mengubah tujuan partai menguat.

Senator Gareth Evans menyatakan "esensi dari sosialisme demokratis tidaklah dijumpai pada setiap tujuan tertentu, melainkan pada nilai-nilainya, yaitu persamaan (*equality*), demokrasi (*democracy*), dan kebebasan (*liberty*). Evans mengusulkan agar Tujuan Partai digantikan dengan Pernyataan mengenai Tujuan Partai, yang direkomendasikan Konferensi Cabang Victoria 1978 kepada Konferensi Nasional, berbunyi:

"Tujuan fundamental Partai Buruh Australia adalah mewujudkan masyarakat yang didirikan di atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai sosialisme demokratis — sebuah masyarakat yang dibangun berdasarkan kebebasan, persamaan dan demokrasi, di mana setiap orang bebas berpartisipasi dalam membentuk dan mengawasi lembaga-lembaga dan hubungan-hubungan yang menentukan kehidupan mereka."

Pada masa awal, Partai Buruh bersifat sosialis, baik berkuasa maupun sebagai oposisi, menyumbang pembentukan "negara Kesejahteraan" bagi Australia. Masa berikutnya, tradisi kapitalis — umumnya diterapkan kaum liberal, lebih menonjol daripada sosialis. Setelah terpuruk selama 23 tahun, Partai Buruh di bawah Whitlam mencampurkan tradisi kapitalis dan sosialis dalam berbagai kebijakannya.

Sejak 1990 Partai Buruh menang pemilu, di bawah pimpinan Hawke dan wakilnya Paul Keating, kebijakan lebih pragmatis, seperti pasar bebas ataupun perdagangan bebas. Partai Buruh terlihat berkomitmen pada perekonomian kapitalis campuran (*mixed capitalist*), menekankan pembentukan perusahaan-perusahaan negara yang berkompetisi dengan sektor swasta, semata-mata untuk mengurangi tindakan eksploitasi kapitalis.

Dari berbagai kebijakan Partai Buruh, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Partai Buruh menonjolkan perekonomian campuran, tetapi tradisi sosialis tak ditinggalkan. Tujuan partai ini mencapai suatu masyarakat yang berkecukupan, menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya. Hal ini membawa Australia menjadi suatu negara kesejahteraan.
2. Partai Buruh sangat vokal mendukung reformasi sosial dan segala bentuk redistribusi pendapatan. Lebih mengedepankan program pembaharuan, dijuluki partai pembaharu.
3. Partai Buruh lebih nasionalistik menganjurkan yang lebih luas dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, memajukan proyek pembangunan nasional, lewat pembentukan perusahaan negara dengan sentralisasi kekuasaan pemerintah ke dalam yurisdiksi negara-negara bagian dan teritori.

Partai Buruh bukan partai sosialis revolusioner, dengan cara kekerasan untuk menggulingkan tatanan sosial yang ada. Buktinya, Gareth Evans menolak demonstrasi yang dilakukan kelompok buruh dan kelompok Aborigin, pada bulan Juli 1996. Proses penolakan tersebut dilakukan dengan cara merusak bangunan parlemen. Sebagai partai pembaharu, Partai Buruh menganjurkan sentralisasi kekuasaan pemerintah secara lebih besar dalam masalah negara bagian melalui kemampuan keuangan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Whitlam, menggunakan pasal 96 Konstitusi, bantuan hibah pemerintah untuk maksud khusus pada bidang kekuasaan negara bagian yaitu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan perkotaan. Kebijakan ini mengubah hubungan kekuasaan yang diatur dalam sistem federasi. Kebijakan reformasi ini berbuah pemecatan Whitlam sebagai PM oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr, dan mengakibatkan krisis konstitusi pada Oktober 1975.

Hawk juga melakukakan sentralisasi kebijakan berhasil menekan Pemerintah Negara Bagian Tasmania untuk menghentikan pembangunan Bendungan Franklin. Hawk juga melanjutkan program Medicare – penggantian kembali program Medicare selama Pemerintahan Whitlam – sebagai upaya untuk meluaskan kekuasaan pemerintah nasional terhadap masalah negara bagian.

Struktur Organisasi

Sebagai sebuah partai besar yang berhasil mendudukkan anggota-anggotanya sebagai anggota dan pimpinan parlemen, Partai Buruh memiliki struktur organisasi yang menyebar ke seluruh wilayah Australia, dari tingkat pusat hingga daerah. Tingkat dari struktur organisasi yang berada dalam lingkup negara bagian dikenal dengan Konferensi Nasional. Sebagai sebuah lembaga, Konferensi Nasional memiliki badan yang bergerak untuk mengedalikan dan mengkoordinir tugas Konferensi Nasional dalam kesehariannya yang dikenal dengan Badan Eksekutif Nasional dan Sekretaris Nasional. Struktur organisasi Partai Buruh adalah sebagai berikut: (1) *National Conference* (Konferensi Nasional) merupakan badan tertinggi yang bertugas untuk mengatur kewenangan partai. Setiap keputusan yang diambil oleh badan ini selanjutnya mengikat bagi semua anggota partai baik tingkat federal maupun negara bagian. (2) *National Executive* (Eksekutif Nasional) merupakan badan yang posisinya lebih rendah dibandingkan dengan Konferensi Nasional yang memiliki kewenangan secara administratif utama dalam partai. Dalam kesehariannya badan ini berkuasa penuh dan hanya tunduk terhadap Konferensi Nasional. (3) *Federal Parliament* (Parlemen Federal) merupakan suatu badan yang menduduki posisi dominan ketiga. Badan ini memiliki kewenangan dan berkuasa dalam setiap rapat atau caucus. Badan ini memiliki pengaruh besar dalam proses pembuatan keputusan partai yang mengikat semua anggota partai. (4) *Australian Young Labor* (Kepemudaan Partai Buruh Australia) merupakan lembaga yang menampung pemuda-pemuda Australia yang memiliki

keperhatian dan minat terhadap perjuangan dan nasib para buruh. Lembaga ini tugasnya turut membantu dalam proses pembuatan kebijakan partai. (5) *The National Labor Women's Network* (Jaringan Nasional Perempuan Partai Buruh) merupakan lembaga yang memiliki fungsi hampir sama dengan organisasi kepemudaan yang telah disebutkan sebelumnya. (6) *The National Indigenous Labor Network* (Jaringan Nasional Keturunan Aborigin Partai Buruh) sebagai sebuah lembaga dalam naungan Partai Buruh untuk keturunan Aborigin. Lembaga ini dimaksudkan sebagai tempat kelompok Aborigin untuk menyampaikan suara dan memenuhi kepentingan politiknya dalam parlemen. Tujuannya adalah (1) untuk menarik dan menudukung masyarakat Aborigin dalam berpolitik, (2) meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam tingkat lokal, negara bagian dan nasional, (3) memberikan identifikasi, pelatihan dan dukungan dari calon Aborigin untuk berpolitik praktis, (4) meningkatkan kesadaran akan masalah adat dalam Partai Buruh, (5) meningkatkan komitmen partai untuk memberikan kesempatan terhadap representasi dari masyarakat adat, (6) mendorong dan memotivasi masyarakat adat untuk menempati jabatan publik baik dalam partai maupun pemerintahan.

Struktur Partai Buruh terdiri atas dua tingkatan, tingkat nasional dan negara bagian. Struktur nasionalnya terlihat di mana karakteristik partai sentralistis, lebih besar karakter nasionalnya. Otonomi yang dimiliki cabang partai di negara bagian berbeda satu sama lain. Sesuai struktur federalis Australia, cabang partai di negara-negara bagian hampir tidak mempunyai otonomi.

Konferensi Nasional (*National Conference*) sebagai badan tertinggi keputusan tertinggi dalam Partai Buruh. Hingga 1967, konferensi nasional 36 orang, terdiri 6 wakil dari setiap cabang partai di negara bagian, pada umumnya merupakan badan eksekutif partai di negara bagian. Anggota parlemen harus patuh pada ketetapan Konferensi Nasional. Tahun 1981, untuk pertama kalinya, prinsip federalisme yang mensyaratkan setiap negara bagian memiliki

wakil yang sama tanpa memperhitungkan populasinya dihilangkan. Perwakilan delegasi setiap negara bagian diatur berdasarkan sistem proporsional. Jumlah anggota Konferensi Nasional diperluas menjadi 99 orang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Konferensi Nasional memilih anggota Badan Eksekutif Nasional. Tugas badan ini, membatasi agenda untuk penyelenggaraan Konferensi Nasional, membentuk komite-komite tetap mengenai kebijakan partai, dalam hal tertentu dapat mencampuri urusan cabang-cabang partai negara bagian. Tahun 1970, pernah membubarkan Badan Eksekutif negara bagian Victoria.

Kebijakan Partai Buruh Terhadap Isu Gender

Partai Buruh bukan hanya sebagai salah satu kekuatan nasional negeri kanguru yang pernah mendudukkan anggota perempuannya sebagai perdana menteri (PM Julia Gillard). Sebagai partai yang sudah tidak muda lagi usianya, memiliki komitmen dan pandangan politik yang jelas mengenai isu gender. Kebijakan politiknya terkait gender adalah *The National Labor Women's Network* (Jaringan Nasional Perempuan Partai Buruh). Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1988 yang dipercaya untuk menggerakkan, memotivasi dan mendukung perempuan untuk terlibat secara politik dalam Partai Buruh. Selain itu, lembaga ini juga berperan untuk (1) mendukung perempuan anggota partai yang memiliki kemampuan, potensi dan peluang untuk menduduki jabatan publik. Peran selanjutnya dari lembaga ini adalah (2) memperluas jaringan komunikasi diantara para perempuan anggota partai agar lebih terintegrasi, loyal dan eksis dalam kancah politik baik tingkat lokal, negara bagian hingga nasional. (3) Perempuan-perempuan yang telah lama bergabung dalam partai memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun, mempromosikan dan memberikan pelatihan kepada para anggota baru dalam hal kepemimpinan, public speaking dan nasionalisme. (4) Semua anggota partai khususnya yang perempuan juga memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam hal

mendukung dan memperluas program politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. (5) Sebagai anggota dari partai besar yang memiliki peluang pemilu secara nasional, memiliki peran untuk mengatur pola hubungan dan komunikasi diantara anggota dari negara bagian dan wilayah melalui Konferensi Perempuan Buruh Nasional. (6) Anggota baik laki-laki maupun perempuan berperan untuk menjadi fasilitator dalam sosialisasi politik antara Partai Buruh dengan organisasi perempuan yang ada dalam masyarakat. (7) Mempersiapkan anggota untuk memiliki peran bukan hanya pada lingkup nasional tapi juga perwakilan negara dalam forum internasional.

Lembaga perempuan lainnya adalah Emily's List yang berdiri sejak tahun 1994. Lembaga ini terlihat sebagai basis politik pendukung perempuan dari latar belakang apapun (partai atau sipil) untuk masuk dalam politik praktis. Pada mulanya, lembaga ini merupakan perwakilan dari kelompok feminis untuk memajukan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan Australia ke dalam panggung politik. Emily's List juga menjadi implementasi dari teori keterwakilan substantif dari kelompok perempuan terkait representasinya yang kerap kali menjadi isu konfrontatif dalam politik Australia. Sebelum terbentuknya lembaga ini, Partai Buruh menerapkan kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik sebesar 35% yang diterapkan hingga tahun 2002. Rencana tersebut terhenti dengan munculnya Emily's List yang memberikan tawaran kuota keterwakilan perempuan sebanyak 45% di Majelis Rendah dan Senat baik nasional maupun tingkat negara bagian. Besarnya peluang bagi perempuan untuk aktif dalam politik praktis ini terkadang terhalang dengan besarnya jumlah dana kampanye. Selama ini secara umum penghasilan perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena di tengah-tengah karirnya terkadang lebih memilih keluarga dibanding berpolitik.

Sumber Dukungan

Dukungan terkuat Partai Buruh berasal dari kaum pekerja kasar (*low collar workers*) dan keluarganya. Untuk memenangkan pemilu, memerlukan dukungan dari karyawan kantor (*white collar workers*), kaum profesional, petani, dan para pengusaha kecil. Dukungan kalangan nonburuh berhasil berkat jargon politik yang bersifat nasional. Hingga 1960-an, Partai Buruh bergantung pada kekuatan serikat buruh. Namun, dana kampanye yang berasal dari afiliasi serikat buruh dan iuran anggota tak mencukupi untuk kampanye pemilu. Sejak 1970-an, Partai Buruh menggalang dana masyarakat (*public funding*) untuk kampanye pemilu.

Australia semakin maju, jumlah pekerja kasar (*manual workers*) menurun, orang Australia pun menganggap diri sebagai kelompok "kelas menengah", secara ekonomis kaum buruh juga masuk ke sini. Whitlam mengubah citra partai sebagai partai bagi golongan "menengah", dan berhasil membuat Whitlam sebagai PM dalam pemilu 1972, kemudian Bob Hawke menang dalam tiga pemilu Australia sejak 1983. Partai Buruh terus berbenah, dengan memberi kesempatan kepada profesional untuk duduk di parlemen dengan merekrut dosen dan pengacara. Akibatnya, kualifikasi akademik parlemen Partai Buruh semakin mirip dengan anggota parlemen dari Partai Liberal.

Dari semua partai, Partai Buruh satu-satunya partai yang membedakan anggotanya berdasarkan faksi. Faksi dalam ALP ada 3 kelompok yaitu kiri, kanan, dan tengah. Awalnya, faksi sosialis kiri mendominasi, tapi kemudian tak bisa menambah jumlah kelompok di parlemen. Faksi tengah kelompok terbesar dalam partai, faksi kanan merupakan minoritas. Hawke dan Paul Keating menggunakan pendekatan pragmatis, dan bisa menarik dukungan Terbuahi berturut-turut menang pemilu (1983, 1984, 1987, 1990, 1994). Faksi sosialis kiri (anggota bukan dari kaum pekerja, malah berlatar belakang profesional) menjadi frustrasi, menuduh partai telah "menjual" prinsip-prinsip sosialis demi kemenangan pemilu.

salah Partai Buruh tak lepas dari kepresariannya melakukan perubahan dan menarik dukungan dari kaum profesional dan pekerja kantoran yang sebelumnya sebagai pendukung kuat Partai Liberal. Walau kurang dukungan dari pedesaan, Partai Liberal tetap berhasil dalam meraih dukungan di kota besar metropolitan seperti Sydney dan Melbourne.

Labour Party Pledges Abolition Of Potato Regulator

The Australian Labor Party has pledged the abolition of Western Australia's potato regulator, the last of its kind in the country. It says the move will open the way to cheaper and more varieties of potatoes -the state's biggest vegetable crop. Opposition leader Mark McGowan said yesterday that the Potato Marketing Corporation, which controls domestic table potato production and sales in WA, was an antiquated system that restricted competition and consumer choice. The regulator was set up due to food shortages in the Great Depression and the Second World War. It controls the \$60 million industry in the state, licensing growers, overseeing tonnage and varieties that can be produced.

"The time has come to move on from outdated and outmoded and unnecessary bureaucracy," Mr McGowan said.

"It's an anachronism that reduces consumer choice and increases the cost of potatoes for ordinary families."

To back up its price claims, Labor's policy statement pointed to the six quarters to June last year where Perth prices were mostly higher than Melbourne, Brisbane and Hobart and consistently higher than Sydney, sometimes by more than 50%. It said for an average family eating 2 kg of potatoes a week could save about \$100 a year based on Sydney prices. The party also pointed out that of 66 potato varieties grown nationwide, only 13 of them were permitted to be grown in WA. Myalup potato grower Tony Galati said the reform was

overdue.

"It's about time someone jumped in the arena and could see some common sense," he said.

Vegetables WA chief Jim Turley slammed the policy as "absolutely abominable" and said Mr McGowan showed "total ignorance" of a successful system that ensured quality potatoes all year at reasonable prices for consumers and decent returns for growers. He said the low Eastern States prices were a "one-off" because of oversupply.

Source: au.news.yahoo.com

BAB IX

PARTAI LIBERAL-NASIONAL

Pengantar

Partai Liberal sebagai partai besar selain Partai Buruh. Dalam sistem pemerintahan Australia kedudukan antara Partai Liberal dengan Partai Buruh selalu berseberangan. Partai Liberal dapat dikatakan sebagai partai besar yang mempunyai kesetiaan dan toleransi besar terhadap partai lain. Sepanjang sejarahnya partai ini tidak pernah melakukan koalisi dengan partai lain selain Partai Nasional. Dengan koalisi tersebut kedua partai yang berbeda latar belakang ternyata mampu menyamakan persepsi dan pandangannya guna memajukan negara.

Partai Liberal

Partai Liberal telah memecahkan rekor memerintah terlama dalam sejarah Australia selama 23 tahun (1949-1972).

Keberhasilan Partai Liberal tersebut tidak terlepas dari koalisinya dengan Nasional (Country) Party, Partai Nasional. Keduanya menjadi penguasa Pemerintahan sejak tahun 1949. Partai Liberal terbentuk untuk menentang Partai Buruh, khususnya keterwakilan gerakan buruh dalam Parlemen Federal. Anggota Buruh masuk Parlemen pada 1890-an. Sejak itu pula, faksi parlemen yang menentang mereka membentuk koalisi nonburuh. Dari sinilah akhirnya tumbuh menjadi partai politik dengan berbagai nama, salah satunya sebagai *National Defence League*. Perhatian utama dari partai ini



Lambang Partai Liberal
Australia

yaitu liberalisme ekonomi yang mengusung kebebasan pasar dan menginginkan negara tidak ikut campur. Selain liberalisme ekonomi, fokus lainnya yaitu liberalisme-sosial yang menginginkan setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama.

Ketika partai belum modern, sekitar dekade pertama federal, ada dua partai nonburuh di dalam parlemen, yang merupakan cikal bakal dari Partai Liberal yang modern. Partai *Free Trade*, mewakili kaum konservatif dan Partai *Protectionist* memperjuangkan kaum liberal. Tahun 1909, tokoh kedua partai berusaha menemukan kepentingan bersama, dan pada akhirnya melakukan fusi. Hal ini didasari perkembangan gerakan buruh yang begitu pesat. Kemenangan mutlak Partai Buruh tahun 1910 semakin menggaikkan anggota parlemen Liberal untuk berfusi, dan jadilah Partai Liberal, yang terdiri dari dua faksi besar yaitu faksi Konservatif dan faksi Liberal. Dalam perkembangannya, faksi Konservatif lebih dominan, sehingga Partai Liberal disebut sebagai Partai Konservatif dengan ideologi Liberal.

Dalam perjalanannya, Partai Liberal pernah mengalami pergantian nama. Tahun 1917 berganti nama menjadi *National Party* (Partai Nasionalis). Hal ini dipicu masuknya PM Buruh William Hughes dan pengikutnya ke Partai Liberal. Hughes meninggalkan partai ini karena adanya isu wajib militer dalam PD I. Ketika Pemerintah Buruh berubah dengan membuat kebijakan pengurangan anggaran belanja negara bagian (*Premiers Plan*). Dampak dari kebijakan tersebut adalah sebagian anggota menjadi kecewa. Jack Lyons, dan pengikutnya, bergabung dengan Partai Nasionalis. Lyons merasa memiliki kepentingan yang sama dengan Partai Nasionalis. Partai Nasionalis berubah nama lagi menjadi *United Australia Party* (UAP). Lyons akhirnya bisa terpilih sebagai Perdana Menteri. PM Lyons memerintah hingga 1937, dilanjutkan PM Menzies hingga 1941. Ternyata, konflik demi konflik berjalan bukan hanya dengan *Country Party*, mitra koalisi, tapi juga masalah internal. Sampai akhirnya, PM Menzies digulingkan Arthur Fadden

memimpin Partai Country tahun 1941. Pada pemilu 1943, UAP semakin kritis, dan kalah dalam pemilu. Tahun 1944, Menzies kembali memimpin UAP, berjuang keras untuk kembali hanggar. Menzies mengumpulkan 18 kelompok nonburuh untuk suatu konvensi di Canberra, dilanjutkan pertemuan di Albury, dan lahirlah kesepakatan anggaran dasar bagi partai baru dinamakan Partai Liberal, partai kaum Liberal yang modern. Partai baru ini resmi terbentuk pada 28 Agustus 1945. Menzies kembali terpilih sebagai pemimpinnya, dan berjalan selama 25 tahun (1944-66).

Menzies mengemukakan tiga hal utama dalam pembentukan Partai Liberal modern, di antaranya:

Pertama, partai berstruktur federal dengan otonomi yang luas bagi organisasi cabang di negara bagian. Kedua, partai harus mempunyai basis masa dan keanggotaan yang luas dan besar, agar partai dapat melaksanakan segala kegiatan organisasi dari kontribusi iuran anggota. Ketiga, harus ada pemisahan yang tegas antara organisasi partai (massa) dengan sayap parlemen (anggota partai yang duduk di parlemen). Menzies bisa jaya memimpin, dan sering memenangkan pemilu sebab bisa menyebarkan rasa khawatir di kalangan pemilih dengan mengeksploitasi isu komunisme dan sosialisme di dalam Partai Buruh. Begitu Menzies pensiun, digantikan Harold Holt, John Gorton, William McMahon, William Bill Snedden, dan Malcolm Fraser. Kepemimpinan terus beralih ke Alexander Downer, hanya berlangsung kurang dari satu tahun. Dari Downer beralih ke John Howard sejak 1995.

Perlu diketahui bahwa pada masa pemerintahan Senator John Gorton muncul ide kontroversial. Idennya yang kontroversial, yaitu menghapuskan gagasan federalisme, yang justru membuatnya berpental pada 1971 dan digantikan William McMahon. Pemerintahan McMahon gagal mendapat kursi majelis rendah dalam pemilu 1972. McMahon kemudian digantikan Bill Snedden, yang hanya berlangsung 3 tahun saja. Snedden gagal mendapat

kursi dalam pemilu 1974, saat terjadi pembubaran majelis rendah dan senat (*double dissolution*). Fraser menang dalam pemilu 1977 dan 1980. Fraser berkonflik dengan tokoh partai Don Cherry yang membuat Don mengundurkan diri dengan pendukungnya, lalu mendirikan partai baru bernama *Australian Democrats* (AD). Fraser kembali konflik dengan Andrew Peacock, Kementerian Hubungan Industri, hingga membuat Peacock mundur dari kabinet. Sebagai pemimpin partai, Peacock tampil dalam pemilu *double dissolution* 1984, mengisi anggota HoR dan Senat, John Howard, wakilnya pun mulai merongrong kedudukannya. Akhirnya, Peacock mengundurkan diri sebagai ketua partai dan digantikan John Howard. Jelang pemilu 1987, Howard memecat Peacock dari menteri bayangan. Tapi, setelah pemilu, keduanya bersatu lagi. Howard jadi pemimpin partai, Peacock menjadi wakil ketua.

Dalam Partai Liberal-Nasional, isu gender yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan lebih dikembangkan dalam masa pemerintahan PM John Howard. Kebijakan John Howard untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak didasarkan pada sistem kuota namun dengan "memperluas" hubungan kekeluargaan yang tradisional. Partisipasi perempuan dalam politik pada masa Howard terlihat belum maksimal sebab lebih banyak yang menjadi obyek dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan kesehatan, hak perawatan anak, masalah, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan cuti melahirkan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik secara domestik (Kekerasan dalam rumah tangga-KDRT) serta pekerjaan domestik bagi perempuan-perempuan yang tidak bekerja secara formal di luar rumah. Kebijakan pemerintah dari Partai Liberal ini tidak banyak yang berpihak kepada kaum perempuan dan cenderung mengarah pada dominasi maskulin. Pemerintahan PM John Howard kurang responsif terhadap isu-isu gender hanya tetap memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan

persamaan hak dalam proses rekrutmen politik. Kebijakan ini dikenal dengan prinsip Equal Opportunity, kesempatan bagi semua anggota Partai Liberal untuk terlibat secara langsung dalam politik pemerintahan.

Ideologi dan Kebijakan

Berdasarkan pamflet partai bertitel "*What Liberals Stand For*", disebutkan:

- Kaum liberal percaya wakil yang terpilih bebas bertindak atas dasar keyakinan sendiri.
- Setiap orang memiliki hak untuk membangun kehidupannya sendiri dan memilih cara hidupnya sendiri.
- Mengakui perekonomian pasar bebas, sebagai faktor utama meraih kemajuan ekonomi

Tujuan Partai Liberal dalam anggaran dasar:

- Parlemen mengawasi eksekutif dan UU mengawasi semua.
- Independensi badan peradilan.
- Kebebasan berbicara, beragama, dan berserikat.
- Kebebasan warga negara untuk memilih cara hidup dan kehidupannya, menjadi subjek terhadap hak-hak orang lain.
- Melindungi rakyat dari eksploitasi.
- Mengutamakan dorongan kepada prakarsa individu dan perusahaan sebagai kekuatan dinamis bagi perkembangan.
- Mengembangkan seluas-luasnya sebuah semangat kebangsaan di Australia.

Struktur Organisasi

Partai Liberal mendudukkan dirinya sebagai partai yang otonom, bersifat nasional, memberikan desentralisasi kepada cabang-cabangnya, baik di tingkat negara bagian maupun pemerintahan lokal (*city dan town*). Struktur partai ini merupakan miniatur dari struktur Pemerintahan Federal Australia. Anggota dalam organisasi bertanggung jawab kepada partai, tidak berafiliasi

dengan kelompok eksternal, tidak ingin memuaskan kepentingan kelompok tertentu. Hierarki tertinggi dipegang *Federal Council* (Dewan Federal). Setiap negara bagian mengirim 11 delegasi, dengan satu dari organisasi wanita liberal.

Kekuasaan tertinggi Dewan Federal yaitu tanggungjawab keuangan. Pelaksana harian dari Dewan Federal yaitu *Federal Executive* atau Badan Eksekutif Federal, beranggota 13 orang, satu orang mewakili negara bagian, tiga pejabat senior partai, ketua komite wanita liberal dan ketua pemilih liberal, dan seorang pemimpin parlemen. Badan Eksekutif Negara Bagian memiliki kekuasaan penuh dalam praseleksi calon serikat negara bagian dari partai ini. Dalam Partai Liberal, organisasi tidak memiliki kekuasaan formal untuk memaksakan kebijakannya, ataupun mendisiplinkan anggota parlemen. Organisasi partai hanya dapat memberikan saran tetapi tidak dapat mengarahkan anggota parlemennya.

Sumber Dukungan

Sumber dukungan utama Partai Liberal yaitu kaum kapitalis kelas menengah dan atas. Misi partai ini memperjuangkan kepentingan kaum kapitalis, yang terdiri atas para pengusaha dan kaum industrialis lainnya.

Partai Nasional

Pada mulanya partai ini bernama *Country Party* pada tahun 1975, lalu berubah menjadi *The National Party of Australia* (Partai Nasional). Partai ini tergolong kecil, tetapi selalu berkoalisi dengan Partai Liberal (koalisi antiburuh), sejak tahun 1922.

Partai ini muncul bersamaan dengan kebangkitan kaum tani di pedesaan sejak tahun 1890-an. Organisasi tani muncul atas



Logo Partai Nasional Australia

anggapan pada kemunduran ekonomi Australia, yang secara langsung dirasakan kaum tani. Selain itu, perhatian pemerintah yang besar kepada masyarakat perkotaan daripada pedesaan juga turut andil dalam kebangkitan kaum petani untuk melakukan perjuangan. Petani ingin menempatkan wakilnya di parlemen federal. Tentu saja agar kepentingan dan perjuangan petani bisa terwujud. Kelogiman membentuk partai juga dipicu Partai Buruh yang telah menguasai pemerintahan federal pada 1910, dan berkuasa di Negara Bagian Western Australia pada 1911. Selain itu, munculnya Partai Nasional sebagai protes atas kelompok konservatif perkotaan yang tidak mengakomodasi kepentingan petani.

Dalam pemilu federal 1913, berbagai organisasi petani dari berbagai negara bagian sukses memasukkan anggotanya ke parlemen. Setahun berikutnya bisa membentuk *Country Party* (Partai Pedesaan) di Western Australia. Kemudian, anggota parlemen dari negara bagian lain membentuk pengelompokan organisasi dengan nama Partai *Country*. Ini baru langkah awal untuk lahirnya sebuah partai pedesaan. Melalui organisasi petani di berbagai negara bagian, akhirnya bisa menempatkan 11 dari 19 kursi pedesaan dalam parlemen federal. Atas dukungan Partai *Country*, dan organisasi petani lain khususnya *Australian Farmers' Federal Organization* (AFFO-Organisasi Petani Federal Australia) berhasil memajukan calonnya ke parlemen federal. Anggota parlemen memprakarsai pengelompokan yang lebih solid, sehingga lahirlah partai politik Partai *Country*, yang bersifat federal, tahun 1920. Partai ini meraih 14 kursi dalam pemilu *HoR* 1922.

Partai Liberal belum menjadi partai mayoritas saat berkuasa. Partai *Country* tentu saja menjadi daya tarik bagi Partai Buruh dan Partai Liberal. Earl Page, pimpinan Partai *Country*, siap berkoalisi dengan Partai Nasionalis, tentu dengan mengajukan persyaratan di antaranya:

- Pemimpin Partai Nasionalis Hughes harus diganti
- Partai *Country* harus diberi hak veto

Koalisi yang terjalin antara Partai Liberal dengan Partai Nasional sampai sekarang masih utuh. Melalui koalisi ini, kedua partai dapat memberikan harapan besar bukan hanya bagi kaum industriawan tapi juga para petani di pedesaan. Artinya perhatian partai bukan hanya diberikan bagi golongan pengusaha kaya di perkotaan tapi juga para petani dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya. Partai-partai lainnya yaitu Green Party, One Nation Party, dan Family Party merupakan partai-partai kecil yang turut meramaikan sistem kepartaian di Australia.

BAB X

PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI DAN HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK

Pengantar

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai latar belakang politik luar negeri dan pelaksanaannya di dalam masyarakat internasional. Hal ini sangat penting untuk dimengerti mengingat selama ini dengan keberhasilan politik dan ekonomi yang telah dicapai Australia menjadikan negara ini sering dijadikan sebagai tujuan para pengungsi dan pencari suaka. Dengan kondisi tersebut akan memengaruhi sepak terjang atau pola hubungan luar negeri Australia dengan negara-negara sekitarnya terutama di Asia Pasifik. Politik luar negeri akan selalu menjadi prioritas bagi suatu negara dalam melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain. Melalui politik luar negeri atau kebijakan luar negeri, kepentingan dan tujuan negara dapat diwujudkan. Kebijakan ini sekaligus juga berfungsi sebagai strategi atau rancangan tindakan yang dikeluarkan oleh para pembuat keputusan di suatu negara dalam menghadapi situasi tertentu yang berkaitan dengan negara-negara lain.

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara terhadap negara lain. Dalam menjalankan politik luar negeri, negara akan memisalkannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan nasional.

Menurut pendapat Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppy seperti dikutip oleh Jack C. Plano dan Roy Olin mendefinisikan bahwa politik/kebijakan luar negeri sebagai keputusan dan perilaku yang direncanakan oleh negara-negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam organisasi internasional. Plano juga menyatakan bahwa politik luar negeri merupakan strategi atau rencana (model) yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Keputusan tersebut dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional. Hal ini sependapat dengan Charles Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu serangkaian aktivitas yang diambil oleh suatu komunitas bangsa untuk mengubah sikap bangsa lain, dan untuk menyesuaikan aktivitas komunitas tersebut terhadap lingkungan internasional. Artinya bahwa kebijakan luar negeri menjadi sarana untuk memperluas relasi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk mencapai kepentingan nasional dari masing-masing negara.

George F. Kennan menambahkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri dimaksudkan untuk menjaga keamanan nasional dan mengejar kepentingan nasional di luar negeri. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh suatu negara sebagai inisiatif atau reaksi inisiatif yang dilakukan oleh negara lain. Kebijakan luar negeri mencakup proses dinamis dan penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Untuk meraih tujuan itu, para aktor politik pembuat kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya adalah historis, geografis, demografis, sistem

politik, cara pandang aktor politik terhadap sistem internasional, ideologi dan peran yang diinginkan negara dalam sistem internasional. Untuk faktor eksternalnya adalah lingkungan regional dan internasional termasuk perkembangan konstelasi politik ekonomi, keamanan internasional dan kebijakan negara atau kelompok negara lain terhadap negara yang bersangkutan. Dalam hal ini tentu saja politik luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia terhadap lingkungan eksternalnya baik negara-negara yang berbatasan secara langsung regional dan internasional dipengaruhi oleh:

Pertama, faktor *historical culture* yang akan dibahas dalam bagian ini sekaligus dikaitkan dengan demografis. Dari kedua faktor tersebut, perkembangan dan pembentukan politik luar negeri Australia tidak terpisahkan dengan Inggris dan Amerika Serikat (AS). Penemuan *Terra Incognita* (tanah kosong) oleh Kapten James Cook dan pengklaiman menjadi bagian Inggris terjadi ketika Inggris mengalami kesulitan dalam pengiriman narapidana. Saat ini bersamaan waktunya dengan proses AS menyatakan dirinya sebagai negara merdeka dari Inggris. Dengan pernyataan kemerdekaan itu maka mau tidak mau Inggris harus mencari lahan baru sebagai tempat pembuangan narapidana sebagai eksekusi dari revolusi industri. Armada pertama Inggris mendarat di pantai timur Australia yang kemudian diberi nama Sydney di bawah pimpinan Kapten Phillips. Pemberian nama tersebut sebagai penghormatan terhadap Lord Sydney pada tanggal 26 Januari 1788. Inilah koloni pertama kulit putih yang kemudian membangun pemukiman baru. Dari pembentukan koloni pertama kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya Federasi Australia 1 Januari 1901, Australia masih tetap menjadi bagian Inggris termasuk dalam arah politik luar negerinya yang dibuat dan diimplementasikan langsung dari London Baru pada tahun 1935. Australia diperbolehkan untuk membentuk kantor kecil urusan luar negeri namun belum bisa

membuka perwakilan diplomatik. Pembukaan perwakilan diplomatik di luar negeri baru dilaksanakan pada tahun 1940.

Historical culture tersebut turut memengaruhi budaya keamanan. Selama masih dalam proteksi Inggris, masyarakat Australia merasa "takut" berhadapan dengan negara-negara lain. Hal ini sering menimbulkan pandangan negatif terhadap Negara Kanguru sebagai *the frightened country*. Dalam segala hal yang menyangkut hubungan dengan luar negeri, Australia selalu berlindung di bawah payung Britania Raya. Bahkan seringkali Inggris bertindak di lingkup internasional dengan mengatasnamakan Australia. Kondisi demikian terus berlangsung hingga memasuki Perang Dunia II. Pada saat itu Inggris terbalik mulai meninggalkan Australia ketika Negara Kanguru ini dilibatkan langsung dalam peperangan besar. Ketika pasukan Jepang memasuki wilayah Pasifik yang ditandai dengan peluncuran bom di wilayah Darwin, Inggris sama sekali tidak membantu namun lebih mementingkan keselamatan negaranya. Dengan meletusnya Perang Pasifik, AS justru yang memberikan perlindungan keselamatan dan pertahanan kepada Australia. Sejak itu, Australia menjadi anggota paling junior dalam aliansi Barat dengan konsekuensi arah politik luar negerinya banyak dipengaruhi oleh Washington. Sama-sekarang arah dan gaya politik luar negerinya masih terpengaruh AS meskipun ketika Partai Buruh berkuasa berusaha untuk mengambil inisiatif sendiri sesuai dengan kepentingan nasionalnya namun tetap belum maksimal.

Kedua, adalah faktor geografis yakni sebagai negara besar yang penduduknya mayoritas orang kulit putih (*anglo celtic*) namun berada di selatan khatulistiwa. Berdasarkan letak geografis tersebut menunjukkan bahwa negara benua ini dikelilingi oleh benua Asia dengan orang-orang kulit berwarna. Kekhawatiran sebagai negara terisolasi yang ditinggalkan oleh "induk semangnya" (Inggris) dan berurusan dengan "saudaranya" (AS) semakin menjadikan negara ini tidak nyaman dengan wilayahnya. Sampai tahun 1900-40,

terkaitan dengan negara-negara Asia bukan dianggap sebagai ancaman namun ancaman. Deras ancaman dari utara sudah mulai terasa sejak tahun 1850-an dengan penemuan tambang emas dan perak. Penemuan tersebut mengundang masuknya orang-orang Asia terutama dari China sehingga muncul istilah "Yellow Peril" atau bahaya kuning. Bahaya kuning kemudian melebar ke Jepang ketika negara matahari terbit ini "mengirimkan" nelayan-nelayannya untuk mencari ikan dan tripang di wilayah Australia. Ketakutan pada Jepang semakin menjadi dengan keberhasilannya mengalahkan Manchuria dan Rusia dalam perang tahun 1904-1905. Hal ini semakin diperparah dengan invasi Jepang ke arah selatan menuju ke negara-negara Asia Tenggara. Power Jepang di mata internasional semakin meningkat ketika negara ini berhasil melumpuhkan kelautan AS di Pearl Harbour, Hawaii. Kemenangan Partai Komunis China melawan Partai Nasionalis hingga keluar sampai ke Taiwan menunjukkan bahwa orang China sama dengan Jepang, yakni sukar ditebak. Dari peran eksternal kedua negara besar Asia tersebut menjadikan persepsi negatif bagi Australia bukan hanya *Yellow Peril* tapi juga *Red Peril*. Dari sini melahirkan kebijakan baru Australia yakni semacam "Mencari Keamanan dari Asia". Ketakutan dan kekhawatiran terhadap Asia terus berlangsung hingga memasuki tahun 1983 dengan munculnya kebijakan baru yakni "Mencari Keamanan Dalam Asia".

Ketiga, yang memengaruhi kebijakan luar negeri adalah konstelasi politik, ekonomi, keamanan regional dan internasional yang sangat dinamis. Kesemua elemen tersebut saling kait-mengait dan saling memengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari uraian di atas mengenai cara pandangnya terhadap Asia dan lingkungan regional lain yang ada di sekitarnya. Banyak hal yang menjadikan Australia lebih menyadari akan pentingnya Asia bagi masa depannya. Misalnya sering dirugukannya Australia oleh AS dalam perdagangannya dengan Jepang yang terkait dengan perdagangan antara AS dengan Jepang soal *trade balance*. Sehingga dapat

dinyatakan bahwa secara budaya dan sejarah, Australia tidak dapat dipisahkan dengan AS dan Inggris namun secara geografis, ekonomi, dan pertahanan Australia memandang Asia sebagai bagian yang penting. Politik luar negeri Australia ditetapkan melalui upaya membandingkan perluasan komunis melalui cara mendominasi bantuan militer dan memperkuat pertahanannya melalui perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat, melaksanakan bantuan ekonomi terutama kepada negara-negara yang berada di sekitarnya yang tergabung dalam *Commonwealth of Nations*. Australia membantu membandingkan ekspansi Korea Utara melalui kekuatan militernya. Australia juga memberikan bantuan militer kepada Malaysia (sebagai sesama anggota *British Commonwealth of Nations*) dalam rangka membandingkan kekuatan komunis di Asia Tenggara.

Dalam perang Vietnam misalnya, militer Australia terlibat melalui "army advisers" untuk melatih tentara Vietnam Selatan dalam strategi perang di hutan-hutan. Pada tahun 1966 militer Australia ditingkatkan kontribusinya sebagai akibat diberlakukannya wajib militer. Hal ini dilakukan agar Australia mampu membandingkan agresivitas komunisme. Di sini terlihat bahwa periode tahun 1950-an sampai 1960-an Australia menganut konsep pertahanan yang disebut dengan *Forward Defence*, yakni membangun pertahanan dengan menempatkan pasukan di luar wilayah negaranya. Setelah itu, pada periode berikutnya urutan pertahanan Australia menganut konsep *Defence of Australia*. Konsep pertahanan ini menggunakan *self reliance* sebagai dasar utamanya. Di sini, militer Australia harus mampu melaksanakan operasi secara mandiri dan harus mampu menangkis serangan senjata misil dengan memanfaatkan geografi Australia. Kini Australia menerapkan *Regional Defence* dengan strategi varian kerja sama pengembangan pertahanan misil bersama Amerika Serikat. Australia telah mengembangkan beberapa konsep pertahanan tetapi pada dasarnya kedekatan dengan Amerika Serikat menjadi

dari segalaanya. Setelah melepaskan diri dari keterikatan dengan Inggris, Australia menyandarkan dirinya pada Amerika Serikat.

Keempat, berkaitan dengan tujuan yang ingin diraih dari politik luar negeri yakni kepentingan nasional. Dari sisi *political strategies*, politik luar negeri Australia mengandung makna politik, *security objectives*, dan ekonomis. Untuk bidang pertahanan keamanan (*security objectives*), kebijakan luar negeri bertujuan untuk menjaga keamanan Australia baik secara individual (*self reliance*) dalam kerangka aliansi militer di bawah komando AS dan Inggris. Selain itu, Australia juga membangun kerja sama keamanan dengan ASEAN dan Pasifik. Kebijakan luar negeri Australia juga untuk mencapai *economic objectives*, berperan dalam diplomasi ekonomi multilateral di GATT/WTO, World Bank IMF, dan lainnya. Termasuk dalam hal ini memutar kebijakan investasi asing, dan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN, Jepang, China, Korea Selatan, Pasifik, dan sebagainya.

Gambaran sekilas politik luar negeri Australia tersebut diperkuat dengan pendapat Petrov yang menggambarkan tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia yaitu:

- (1) Tradisi Menzies (partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi realistik, pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Di sisi pandangan Menzies difokuskan pada kenyataan keterisolasian Australia dapat di atasi dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat.
- (2) Tradisi Evatt (partai Buruh) yang memperlihatkan gambaran nasionalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman organisasi internasional (dalam hal ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini adalah kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman terhadap identitas diri suatu bangsa.

(3) Tradisi Spender & Casey (Partai Liberal) menekankan pada pentingnya wilayah regional dan kerja sama aktif dengan Asia. Sampai saat ini, ketiga pilar tersebut masih relevan ditambahkan kajian terhadap perkembangan politik luar negeri Australia, meskipun penekanannya sangat ditentukan oleh kondisi dari partai manakah perdana menteri Australia berafiliasi.

Kepentingan dan Tujuan Nasional

Politik luar negeri atau kebijakan luar negeri sangat ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai suatu negara yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Tujuan tersebut adalah tujuan politik, keamanan, dan ekonomi. Lebih jelasnya tujuan dasar politik luar negeri dari negara Kanguru ini adalah menjaga integritas dalam lingkungan internasional yang saling bersaling. Integritas suatu negara bukan hanya dilihat dari kemampuannya untuk melindungi aset-asetnya yang penting seperti wilayah, SDA, SDM dalam batas negara. Lebih dari itu, eksistensi negara juga dilihat dari kemampuannya dalam memelihara stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara turun-temurun. Tujuan utama dari politik luar negeri suatu negara adalah kelangsungan hidup dan untuk mencapai itu, keamanan negara menjadi sesuatu yang mutlak. Ada dua sikap yang memiliki nilai penting dan berpengaruh terhadap etos nasional Australia. Sikap kelompok nilai yang pertama adalah campuran antara nilai budaya, etika, agama, dan etnis yang menentukan sikap dan moralitas masyarakat. Sedangkan kelompok nilai yang kedua adalah campuran antara nilai sosial, politik dan ekonomi yang dipelihara oleh masyarakat dalam aturan administrasi.

Jadi jelaslah bahwa tujuan politik, keamanan, dan ekonomi adalah pencapaian "Kepentingan Nasional". Ada empat prioritas kepentingan nasional Australia yakni:

1. Memelihara keamanan yang positif (situasi aman dan damai) dan lingkungan strategis dalam kawasan.

3. Mendukung terciptanya keamanan global.
4. Kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan dengan memobilisasi pengaruh politik untuk menunjang ekonomi dengan membuka pasar internasional, memperluas kesempatan ekonomi bagi sektor industri, menciptakan persepsi positif bahwa Australia sebagai tempat menarik untuk berinvestasi dengan pemerintah sebagai mitra ideal.
5. Menjadi warga dunia yang baik dengan Australia berperan sebagai subjek yang positif dan konstruktif seperti penanganan pengungsi, terorisme, perdagangan obat terlarang, dan masalah kesehatan dunia.

politik Luar Negeri Partai-Partai Besar

Sebenarnya politik luar negeri dari partai-partai besar tidak ada bedanya. Setiap perdana menteri yang menjabat paham betul bahwa dengan latar belakang sejarah maka mau tidak mau politik luar negeri Australia tetap dipengaruhi oleh AS dan Inggris. Maka tak banyak yang berbeda pada masa pemerintahan Partai Buruh di bawah Bob Hawke dan Paul Keating, 1983-96, maupun saat Partai Kaula Liberal Nasional pimpinan John Howard. Waktu Julia Gillard sebagai Perdana Menteri dari Partai Buruh pengaruh kedua negara tersebut masih terlihat.

Secara garis besar Partai Buruh menyuarakan kebijakan luar negeri sebagai berikut:

1. Demi kepentingan geopolitik dan geostrategis *"the defence of Australian sovereignty and political independence"*
2. Segi ekonomi *"in trying to secure a free and liberal international trading regime"*.
3. Australia menjadi *"a good international citizen"* atas isu lingkungan global, penjaga perdamaian, kontrol senjata, demokrasi, dan HAM, serta problem kesehatan internasional.

Sebaliknya koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional menitikberatkan kebijakan luar negerinya:

1. Memperbaiki hubungan dengan negara-negara kawasan.
2. Memperkuat hubungan dengan negara-negara aliansi terutama AS dan Inggris.
3. Meyakinkan kepada masyarakat internasional terutama negara-negara Asia Pasifik bahwa Australia merupakan tetangga yang baik.
4. Membangun hubungan multilateral guna menghadapi terorisme internasional.
5. Mempromosikan kebudayaan dan pendidikan.
6. Memperkuat perdagangan dan investasi.
7. Lebih efektif dan efisien dalam memberikan bantuan ke luar negeri.

Untuk memperkuat ekonomi internasional, strategi yang dilakukan oleh koalisi dirangkum dalam *The Coalition's Plan for Real Action on Foreign Affairs* yakni:

1. Memperbaiki dan memperkuat hubungan dengan negara-negara partner regional seperti Indonesia, India, Timor Leste, Jepang, dan China.
2. Bekerja sama dalam lingkup institusi regional dalam the Asia Pacific-Indian Ocean yang mencakup diplomatik, pembangunan, keamanan, dan perdagangan.
3. Mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan PBB.
4. Mendukung peningkatan bantuan luar negeri (Aus-aid) di lingkup Asia Pasifik.
5. Mempromosikan program-program pendidikan melalui beasiswa.
6. Berusaha membangun forum-forum dialog dengan pendekatan HAM seperti bidang keamanan, perempuan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

Pada pemerintahan John Howard misalnya, dalam Buku Politik Luar Negeri Australia 1997 memuat kepentingan nasional sebagai *"the security of the Australian nation and the jobs and standard of living of the Australian people"*. Semua negara memiliki kepentingan nasional sesuai letak geografis, luas wilayah, populasi, kekuatan militer, situasi ekonomi, dan lainnya. Dalam masa pemerintahan Howard, kebijakan luar negerinya adalah:

1. Melindungi teritorial dari serangan fisik dan memelihara kapasitas Australia dalam membuat kebijakan secara independen.
2. Membangun dan melanjutkan kompetensi perdagangan dan investasi untuk skala internasional dengan fokus Asia Pasifik.
3. Menghapuskan senjata pemusnah massal dan menahan konflik regional, peningkatan keamanan dalam menghadapi berbagai isu terutama terorisme internasional, pencari suaka politik, imigran gelap, narkoba, kejahatan transnasional, dan sebagainya.
4. Memelihara dan mempromosikan Australia sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi liberal yang direfleksikan dari Eropa dan sejarah yang unik.

Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Pembuatan kebijakan luar negeri Australia termasuk paling tertutup dan rahasia di dunia Barat. Di bawah Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia memiliki tenaga ahli dan spesialis mempunyai pengetahuan dalam membuat kebijakan untuk para menteri. Keputusannya diambil dengan cepat, tidak berlarut, seperti kasus hubungan Australia-Indonesia, masalah Timor Timur, partisipasi dalam sanksi terhadap Irak, perlunya ambil posisi dalam resolusi PBB. Pembuat dan pengambil keputusan politik luar negeri itu antara lain:

1. Eksekutif, dijamin konstitusi, seksi 61 meletakkan posisi kekuasaan eksekutif dalam pembuatan kebijakan luar negeri Australia dan seksi 109 menyatakan pemerintah federal memegang kekuasaan atas masalah/masalah eksternal daripada pemerintah negara bagian. Walau dalam seksi 51 dinyatakan memberikan kekuasaan pada parlemen federal dalam hubungan luar negeri, pertahanan dan perdagangan internasional, namun eksekutif tetap dominan atas parlemen federal. Contoh, Parlemen Australia tak punya suara dalam pembuatan keputusan seperti membawa negara ke dalam perang termasuk pernyataan secara formal atau tidak. Hal ini berbeda dengan parlemen AS, deklarasi perang Australia tak harus disetujui parlemen, bahkan parlemen Australia tidak punya kewenangan seperti senat AS untuk memveto pengangkatan duta besar dan menteri. Jika ada pergantian pemerintahan di Australia dari pemerintahan Buruh ke koalisi Liberal/*National Country*, politik luar negerinya tidak akan berubah, substansinya tetap sama.

2. Parlemen dan Partai Politik

Anggota partai yang berkuasa memiliki pengaruh yang lebih besar dalam memengaruhi pemimpinnya dalam kebijakan luar negeri dibanding anggota partai oposisi. Eksekutif sangat mendominasi saat PM Malcolm Fraser mengawali integrasi Timor Timur ke Indonesia ketika anggota parlemen sedang tidak berada di Canberra. Soal Timor-Timur, semua Perdana Menteri Australia, sebelum jajak pendapat Agustus 1999, memutuskan pengakuan kedaulatan Indonesia atas Timor Timur tanpa memperhatikan pandangan parlemen, masyarakat, dan media massa.

3. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan ini membuat pernyataan di media massa untuk opini publik, demonstrasi, dan lobi dengan

parlimenter) atau perdana menteri. Kelompok kepentingan yang berpengaruh yaitu Asosiasi Wartawan Australia dan organisasi veteran Australia (*Return Service League-RSL*). Dua organisasi ini sangat vital pada masa pemerintahan PM Howard dalam membuat keputusan politik luar negerinya.

6. Media Massa

Media massa bukan hanya sebagai *watchdog* bagi kebijakan domestik, tapi juga luar negeri Australia. Hal ini terlihat dalam membangun opini dalam politik luar negeri antara Australia-Indonesia, Australia-Malaysia, dan peristiwa internasional lainnya.

Kebijakan Pertahanan Australia

Kebijakan pertahanan didominasi eksekutif, dengan anggota utama PM, wakil PM, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Bendahara Negara (Menteri Keuangan). Yang menarik, Kebijakan Strategis Australia, *Perencanaan Strategis Australia* dan *Buku Putih Pertahanan Australia* walau dikeluarkan Departemen Pertahanan ternyata dibuat oleh ahli/pengamat militer sipil.

Doktrin strategis pertahanan Australia sebelum 1970-an, dikenal dengan *Forward Defence Strategy* (Kebijakan Strategi Pertahanan Jauh ke Depan). Australia membantu AS membendung Komunisme dari Utara, dengan membantu AS dalam Perang Korea, Perang Vietnam, termasuk konflik Indonesia dan Malaysia. Pertengahan 1970-an, doktrin strategis menjadi *Continental Defence* (pertahanan benua), mempertahankan diri wilayah Australia. Walau demikian, Australia tetap bergantung kepada AS. PM Harold Holt terkenal dengan istilah "*all the way with the LBJ* (Linda & Johnson)" dalam istilah Bob Hawke dikenal "*Friend Forever*". Sementara John Howard mengistilahkan Australia sebagai "*Deputy Sheriff*". Tentunya tak mengabaikan kerja sama dengan pertahanan negara-negara tetangga Asia dan Pasifik.

Kebijakan Menahan Diri (*Containment Policy*)

Setelah PD II, dunia kuasa perubahan besar bidang politik. Beberapa negara dikuasai komunis. Untuk merintangi lebih lanjut ekspansi komunisme, Truman *Doctrine* memprakarsai suatu *containment policy* (politik pengurangan atau penahanan). AS membangun kekuatan bersenjata sendiri dan memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada bangsa-bangsa yang terancam. Yunani dan Turki pertama kali yang dibantu, dan akhirnya keduanya tidak menjadi satelit Uni Soviet. Terkait dengan Australia, *containment policy* memposisikan negara yang terisolasi (Australia) untuk lebih memahami proses terjadinya kebangkitan negara-negara Asia dan Afrika. Apalagi kemenangan Mao Tse-Tung dengan komunisnya di China tahun 1949, lalu pecah perang Korea 1950, menandakan China siap untuk memperluas teritorinya melalui kekuatan militer atau cara persuasif.

Australia melihat sepak terjang China, yang akan mengambil alih Laos dan Vietnam Selatan, berpindah ke Thailand serta Kamboja, setelah menguasai India, Pakistan, Ceylon, Timur Tengah, dan Afrika. Hal ini digambarkan sebagai *Domino Theory*, the *'domino theory' of Communist expansion explains the Australian government's contributions of military aid in South East Asia*. Maka, Australia wajib membendung kekuatan China tersebut, dengan melakukan perjanjian pertahanan bersama Amerika Serikat. Memberikan bantuan ekonomi negara di sekitarnya dalam *Commonwealth of Nations*. Australia membendung ekspansi Korea Utara dengan kekuatan militer, juga memberi bantuan Malaysia (sesama anggota *British Commonwealth of Nations*) untuk membendung komunis di Asia Tenggara. Saat perang Vietnam, Australia mengirim *'army advisers'* untuk melatih tentara Vietnam Selatan. Tahun 1966 militer Australia ditingkatkan kontribusinya sejak diberlakukannya wajib militer, guna membendung agresivitas komunis. Tahun 1950-60, Australia menganut konsep pertahanan sebagai *Forward Defence*, membangun pertahanan dengan

...apakah pavukan di luar wilayah negaranya (Australia terlihat dalam perang Korea, Vietnam, dan Malaysia & Singapura) produksinya menganut konsep *Defence of Australia*, dengan *offence* sebagai dasar utama, militer Australia mampu melaksanakan operasi militer secara mandiri, menangkal ancaman potensial musuh dengan memanfaatkan geografi Australia. Sekarang menerapkan *Regional Defence*, kerja sama pengembangan pertahanan misil bersama Amerika Serikat. Bersama AS, dibentuk *Australia's Maritime Identification System (AMIS)*; konsep keamanan maritim regional AS yang diterjemahkan Australia sebagai penguatan strategi pertahanan maritimnya.

Hubungan Australia dengan Asia Pasifik Australia dan AS

Hubungan antara Australia dengan AS telah dimulai sejak PD II. Sejak meletusnya perang itu, pertahanan Inggris kurang memperhatikan kawasan Pasifik hingga Australia mencari payung pertahanan baru di bawah AS. Sesudah PD II, Australia bersama dengan Selandia Baru masuk dalam payung pertahanan Amerika Serikat melalui perjanjian ANZUS (Australia, New Zealand, and United States) di tahun 1951. Pakta ini mengingatkan bahwa dasar-dasar suatu hubungan merupakan salah satu aset nasional yang paling besar. *Phobia* "akan" ancaman dari utara, "*the yellow peril, the red peril*" - perlindungan (*protection*) dan kesetiaan pada negara pelindung (*loyalty to the protector*). Itulah alasan mengapa Australia melibatkan diri dalam aliansi dengan AS dan disebut sebagai anggota paling junior dari blok AS.

Dapat dikatakan bahwa Australia sampai sekarang menunjukkan kesetiiaannya terhadap pengaruh dan dominasi AS. Hal ini dapat dilihat ketika Australia secara tegas mendukung kebijakan AS sejak Perang Dunia II, hingga Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk 1991, dan perang di Irak serta Afghanistan. Pusat pertahanan Australia diperkuat dengan akses ke intelijen AS.

selain itu, bidang pendidikan, sengketa dan militer juga mendapat perhatian dari AS.

Pada dasarnya sebuah aliansi bukan hanya merupakan produk dari perhitungan rasional kepentingan nasional namun juga melibatkan nilai-nilai bersama, sistem kepercayaan, dan semangat kerja sama. Dengan adanya ketajalaran bersama dari semua anggota, aliansi akan nilai-nilai yang harus dijaga bersama tersebut akan mendukung kuat dan bertahannya aliansi. Ada beberapa persamaan antara Australia dengan AS yakni:

1. Kedua negara sama-sama menganut dan meyakini kebenaran dari paham demokrasi dan liberal sebagai sarana untuk memajukan negara.
2. Kedua negara secara mayoritas penduduknya meyakini keyakinan yang sama.
3. Australia dan AS berbagi penggunaan bahasa Inggris dan keduanya merupakan negara berukuran besar bekas Koloni Kerajaan Inggris.
4. Kepentingan umum dan pandangan yang sama terhadap berbagai isu-isu internasional.

Ikatan yang menghubungkan kedua negara mencakup seluruh spektrum hubungan internasional -dari sektor perdagangan, ekonomi, budaya, lingkungan politik dan kontak kerja sama pertahanan. Bahkan ada prediksi dari David Mosler yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan Australia akan menjadi negara bagian AS yang ke-51. Fenomena dan prediksi tersebut ada kemungkinan benarnya mengingat dalam sistem politik Australia, siapa pun yang memerintah menunjukkan arah politik luar negeri yang sama. Australia akan menempatkan posisinya sebagai aliansi terhadap AS dan Inggris yang terlihat dalam keikutsertaannya dalam berbagai peristiwa yang melibatkan AS. Pada saat ini, kerja sama kedua negara tersebut bisa dikatakan merupakan kerja sama yang menguntungkan karena keduanya sudah mendapatkan apa

yang dibutuhkan, misalnya Australia memperoleh keuntungan berupa rasa aman dikarenakan Amerika Serikat menjamin pertahanan militer Australia melalui badan intelijen yang samaan tersebut kemudian dari Amerika sendiri mendapat aliansi yang selalu mendukung kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan seperti pada saat Amerika menegam terorisisme dan melakukan operasi ke Irak, Australia mendukungnya secara penuh. Kemudian perkembangan kerja sama kedua negara maju tersebut terlihat semakin kuat, antara lain adalah penempatan marinir Amerika Serikat di Australia yang semakin diperbanyak dan diperpanjang hingga 2017.

Selain dampak positif dari kerja sama tersebut juga terdapat dampak negatif yang harus diperhatikan oleh Australia. Karena letakannya, Australia sering disebut sebagai negara superpower di kawasan Pasifik sehingga Australia memanfaatkan predikat tersebut untuk berperan aktif menciptakan stabilitas kawasan regionalnya, mencegah terjadinya kejahatan dan aktivitas terorisisme. Wujud dari peran aktif Australia terhadap kawasan regionalnya juga bergabungnya Australia ke dalam Pacific Islands Forum yang memiliki fokus terhadap bidang perdagangan, ekonomi dan penegakan hukum pada tahun 2000. Namun, seiring berjalannya waktu hubungan Australia dan Amerika Serikat berjalan semakin harmonis mengakibatkan citra Australia sebagai negara superpower di Pasifik menjadi kurang mengakumulatif dikarenakan Australia terlalu mengintervensi kawasan Pasifik. Selain itu, hubungan Australia dan Amerika Serikat juga menjadi perhatian khusus bagi China. China menekan Australia untuk memulih lebih berpihak kepada Amerika Serikat atau tetap mempertahankan kerja sama di bidang ekonomi dengan China. Melihat sikap China yang terus khawatir terhadap hubungannya dengan Amerika Serikat juga mempertimbangkan bahwa peran China sebagai rekan dagang terbesar Australia dan Amerika sebagai sekutu strategis maka Australia memuat keputusan bahwa negara

kanguru ini akan menyeimbangkan hubungan antara sekony, strategis dan rekan dagang dengan diplomasi, konsistensi, dan pragmatisme. Keputusan tersebut merupakan politik luar negeri Australia yang diambil untuk menghadapi situasi saat ini.

Australia dan Indonesia

Diakui, Australia dekat dengan AS, tidak tergantung Inggris semata. Namun demikian, Australia tetap terikat dengan Asia, dan memantapkan sebagai bagian dari Asia Tenggara dan Pasifik. Australia mudah diserang dari Utara, maka pengembangan militer mengarah ke utara, tetangga paling dekat yaitu Indonesia. Australia pun menata hubungan baik dengan Indonesia, walau dalam perjalanan diwarnai ketidakharmonisan hubungannya dengan Indonesia. Dalam konsep Australia Putih, hubungan bertetangga dengan Indonesia sudah dimulai sejak Aborigin mengenal dan bergaul dengan Orang Bugis. Orang Bugis sudah dikenal sebagai pengusaha industri tripang di pantai utara Australia. Namun dengan kolonialisme Indonesia, menyebabkan kedua negara menjadi saling tidak mengenal. Orang-orang kulit putih Australia baru mengenal Indonesia sejak tahun 1945 sebelumnya hanya dikenal Dutch East Indies.

Ketika memasuki PD II, pasukan Australia pernah masuk ke Ambon dan beberapa pulau kecil lainnya di Maluku. Sejak itu Australia menunjukkan ketertarikan dan kedekatannya dengan Indonesia yang diwujudkan dengan dukungannya terhadap perjuangan Indonesia untuk merdeka. Antara lain dengan memberikan embargo bagi kapal-kapal Belanda di Sydney dan Brisbane, bersama India, Australia mendukung Indonesia agar bisa masuk menjadi anggota PBB. Sejak tahun 1955, Australia telah membuka kajian Indonesia di Universitas Sydney, Melbourne, dan Canberra meskipun masih dalam kaca mata kolonial dan perspektif oriental. Baru pada tahun 1970-an, banyak pakar Australia yang berkesempatan meneliti langsung Indonesia dengan hasil banyak buku keluaran Australia tentang Indonesia.

Hubungan kedua negara seringkali mengalami pasang surut. Peristiwa menonjol yang memengaruhi hubungan bilateral kedua negara adalah lepasnya Timor Timur. Kepentingan utama Australia terhadap Timor Timur (Tintim), untuk menghindari tidak melabarnya konflik di Tintim masa 1970-an yang menjadi ancaman bagi Australia. Ancaman tersebut berkaitan dengan politik internal sebelum bergabung dengan Indonesia yang dikendalikan oleh kaum kiri (komunis). Harapannya dengan terintegrasi dengan Indonesia akan menetralkan suasana. Setelah insiden tersebut, PM Paul Keating berhasil memperbaiki hubungan kembali dengan Indonesia. Pada saat itu, Keating menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terpenting bagi Australia. Hal ini disampaikan dalam *The Sydney Morning Herald* (Hasnan Habib tentang *Kerusuhan Timor Timur dan Implikasinya Terhadap Hubungan Indonesia-Australia* dalam *Dialog Panel 1999*) yakni:

*I never believe not said that Australia had a special relationship with Indonesia. It was not a concept I believed in. However I did say that no country was more important to Australia than Indonesia. Others might be equally important, but none is more so. Whatever strains in our relationship maybe, that will always remain true.**

Puncak keberhasilan Australia dalam mempererat hubungannya dengan Indonesia dituangkan dalam Peretujuan serta sama Keamanan Australia-Indonesia yang mengikat kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan. Peretujuan tersebut juga menandai arti pentingnya Indonesia bagi Australia yakni stabilitas yang stabil dan prediktabel serta mempunyai saluran-saluran untuk diselenggarakannya dialog terbuka dan terus terang yang meningkatkan rasa saling percaya. Perbaikan hubungan dengan Australia era PM Paul Keating ternyata akhirnya berujung kembali pada situasi yang terpuruk. Puncaknya, Indonesia berhadapan dengan pengiriman tentara *International Force in East Timor*. Tentara PBB dari Australia ini merupakan pasukan tempur

yang setiap waktu bisa melakukan tindakan paksaan terhadap TNI maupun kapal Timor Timur, hukumannya pasukan pemeliharaan perdamaian (*peace-keeping force*) selama dilaksanakannya perundingan mengenai status Timor Timur pada akhir tahun 1999. Bukan hanya itu, secara terang-terangan PM Australia, John Howard mengirimkan *advisory opinion* kepada presiden B.J Habibie. Presiden Habibie diminta untuk mengubah status otonomi luas terhadap Timor Timur, menjadi pemberian referendum dan jajak pendapat sebagai solusi mandiri bagi Timor Timur dalam menentukan nasibnya. Setelah memasuki milenium baru, hubungan kedua negara masih diwarnai ketegangan dan keharmonisan. Keretakan hubungan diawali ketika terjadi pengeboman kejadian 12 Oktober 2002 pada pukul 23.05 WITA dua bom meledak di Kecamatan Legian, Kuta Bali. Berikutnya adalah pada tanggal 9 September 2004 ketika terjadi ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB di kawasan Kuningan Jakarta. Kedua peristiwa tersebut menyebabkan Australia mengeluarkan kebijakan larangan warganya untuk mengadakan perjalanan ke Indonesia. Kebijakan tersebut dikenal dengan *travel warning* yang muncul karena alasan keamanan.

Pada tahun yang sama kembali terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Australia. Ketegangan tersebut berkenaan dengan ditemukannya ganyu seberat 4,2 kg di dalam *hongie-board* tas yang dibawa oleh seorang warga negara Australia. Tas tersebut dibawa oleh Schapelle Corby ketika mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Peristiwa tersebut meskipun berakhir dengan pembebasan terhadap Corby namun menimbulkan kekecewaan dari publik Indonesia mengingat ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Australia.

Ia berikutnya yang menyebabkan terjadinya keretakan hubungan kedua negara adalah penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia. Penyadapan tersebut dilakukan terhadap

pembicaraan yang dilakukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan ibu negara dan para pejabat negara. Operasi spionase yang dilakukan oleh intelijen Australia tersebut justru dibocorkan Edward Snowden, mantan analisis Badan Rencanan Nasional Amerika Serikat atau *National Security Agency (NSA)* yang membelot. Dari dokumen yang telah dibocorkan tersebut diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia telah dilakukan selama 13 (lima belas) hari pada bulan Agustus 2009.

Ketika terjadi spionase tersebut, Australia masih berada di bawah pemerintahan PM Kevin Rudd dari Partai Buruh. Pada waktu itu, Rudd memerintahkan kepada *Australian Signal Directorate (ASD)*, program dengan sandi *stateroom* itu meliputi intercept radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet. Dalam hal ini Snowden memberikan penjelasan kepada *Sydney Morning Herald*, 31 Oktober 2013 bahwasanya, *stateroom* yang digunakan untuk kegiatan spionase merupakan bagian dari program kemitraan spionase "lima mata" antara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Guna memperluas kegiatan penyadapan tersebut, pemerintah Australia juga memerintahkan kepada para walitunya yang ada di Indonesia agar memasang alat penyadap di kedutaan besar Australia di Jakarta. Perlu diketahui bahwa pada kurun waktu 2007-2011, Indonesia dengan Australia telah menyepakati sebuah perjanjian yang dikenal dengan *Lombok Treaty*. Perjanjian ini meliputi bidang pertahanan, penanggulangan bencana, terorisme, penyelundupan maanysia (*Human trafficking*), imigran gelap, pengembangan senjata pemusnah massal.

Dari serangkaian tindakan luar negeri yang dilakukan oleh Australia selalu memberikan dampak negatif yang berkepanjangan dalam tataran yang masih bisa dimaklumi kedua negara akan selalu memberikan keterangan atau kejelasan lanjutan sebagai wujud keinginan untuk memperbaiki hubungan luar negeri

Pada saat inilah muncul kembali arti pentingnya kepentingan nasional sebagai akar atau landasan terhadap pola perilaku yang mewarnai sepak terjang negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Seberapa penting kepentingan nasional menjadi tolak ukur seberapa cepat negara memperbaiki hubungannya dengan negara lain yang sedang mengalami ketegangan.

Dengan adanya peristiwa penyadapan tersebut, pemerintah memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia pada tanggal 19 November 2013. Seperti yang dijelaskan oleh Robert dan Habir bahwasanya sehari setelah pemanggilan pulang tersebut, Indonesia secara resmi menanggubkan kerja sama dengan Australia terkait militer dan hukum (*military and law enforcement cooperation*). Selain itu, Indonesia juga menghentikan latihan militer bersama. Selain itu dalam masyarakat Indonesia muncul karikatur yang bertujuan untuk menyindir perilaku eksternal yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Inilah karikatur sindiran itu:



Hubungan diplomatik tetap berjalan meski terdapat kekosongan jabatan duta besar sampai bulan Mei 2014. Normalisasi kembali dilakukan oleh PM Tony Abbott yang menyambangi mantan Presiden SBY ketika membuka MTQ di Batam. Peristiwa berikutnya yang menjadi titik balik normalisasi hubungan kedua negara adalah

sebelum mantan Wakil Presiden Budiono melakukan kunjungan secara resmi ke Australia pada bulan Agustus 2014. Di tengah masih dinginnya hubungan resmi kenegaraan yang terjadi di antara dua negara tersebut terjadi pergantian kekuasaan di Indonesia. Terpilihnya Presiden Joko Widodo yang dihadiri oleh PM Tony Abbott memberikan sinyal positif akan titik baik yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia.

Era kepresidenan Joko Widodo pada mulanya merupakan perbaikan hubungan kedua negara. Hanya saja upaya normalisasi hubungan tersebut kembali memanas dengan penjatihan hukuman mati yang diberikan oleh pemerintah Indonesia (Presiden Joko Widodo) kepada dua warga negara Australia. Hukuman mati kepada dua penyelundup narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menimbulkan protes keras yang diberikan oleh pemerintah Australia. Protes tersebut tidak menggagalkan keputusan presiden untuk tetap menjatuhkan hukuman mati sehingga kembali menambah retak hubungan kedua negara. Hal ini diikuti dengan penarikan duta besar Australia dari Jakarta untuk kembali ke Canberra selama kurang lebih satu bulan.

Dengan penempatan kembali duta besar Australia di Jakarta menjadi pertanda bahwa pemerintah kedua negara masih menginginkan terjalinnya hubungan luar negeri yang lebih damai. Bersamaan dengan itu, Australia memberikan tawaran peluang kerja sama bidang pendidikan dan kebudayaan. Peluang kerja sama tersebut adalah pembukaan Pusat Studi Indonesia di tiga universitas besar yakni Universitas Monash, Australia National University, dan Universitas Melbourne. Untuk bidang kebudayaan, pemerintah Australia kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mengisi acara yang diselenggarakan di kota-kota besar.

Dalam masyarakat Australia terdapat dua komponen utama yakni kelompok inti dan pendatang. Kelompok pertama masih kental dengan tradisi Inggris dan Irlandia (Eropa) yang dalam

politik lebih mendukung kebijakan dari Partai Liberal-Nasional. Sedangkan kelompok kedua yang banyak terdiri dari kaum pendatang condong ke kebijakan Partai Buruh. Secara umum dapat dikatakan bahwa terjalinnya hubungan yang harmonis antara Australia dan Indonesia terjadi ketika masa pemerintahan Partai Buruh. Hal ini disebabkan karena partai tua ini menempatkan diri sebagai bagian dari Asia Pasifik. Sedangkan Partai Liberal lebih memosisikan diri dan sangat berkecenderungan ke Barat sehingga kurang menghargai negara-negara Asia. Kepentingan utama (*core interests*) Australia dengan Indonesia adalah persoalan sekuriti. Ketidakstabilan di Indonesia sedikit banyak akan memengaruhi kondisi politik Negara Kanguru ini. Kestabilan Indonesia dalam hal politik, sosial dan juga ekonomi menjadi sangat penting bagi Australia. Sederhananya Australia tidak menginginkan "kecipratan" imbas negatif dari negara tetangga. Australia merasa perlu mendekatkan diri ke Asia karena secara geografis negaranya lebih dekat ke Asia dari pada Eropa. Namun demikian, hubungan yang dilatarbelakangi semata-mata kepentingan keamanan regional tidak selamanya menguntungkan karena melahirkan pola hubungan antarnegara yang tidak seimbang dan hanya berdasarkan pada kebutuhan sepihak.

Australia dan China

Australia terletak pada ujung selatan dari dua rute laut dunia yang penting dan ramai yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan posisi tersebut maka negara ini sangat memperhatikan agar jalur perdagangan internasional yang melintasi kedua lautan itu berjalan lancar dan aman. Sebab, Australia sangat tergantung pada perdagangan luar negerinya. Namun jika dilihat dari besarnya sebenarnya Australia tidak strategis jika berdiri sendiri tanpa aliansi dari kekuatan besar lainnya karena lokasinya yang jauh menjorok ke selatan. Sehingga keamanan kawasan atau keamanan regional merupakan kunci utama dalam mempertahankan kelancaran perdagangan luar negerinya.

Untuk itu, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah dengan menerapkan kebijakan bertetangga baik dengan negara-negara sekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu diplomasi yang efektif untuk membangun serangkaian hubungan di segala bidang dan suatu jaring saling ketergantungan dengan negara-negara kawasan. Ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik regional. Dalam pandangan Australia, negara-negara yang ada di sekitarnya banyak mengandung teka-teki. Terutama sekali sejak berakhirnya Perang Dingin yang telah mengubah konstelasi keseimbangan kekuatan dua negara besar di kawasan tersebut. Bahaya kuning atau yang akrab disebut dengan "yellow peril" dari Negara Tirai Bambu sebenarnya hanya merupakan persepsi yang diherikan oleh Australia terhadap China. Konsep ini bukanlah sebuah ancaman yang bersifat rasial, melainkan bersifat struktural. Sebagai contoh dalam bidang lingkungan, badai pasir yang melanda Asia Timur Laut berkaitan erat dengan rusaknya lingkungan di bagian timur China. Jika China adalah negara yang demokratis, maka perlindungan terhadap lingkungan secara serius dapat dilakukan dan badai pasir dapat dikontrol keadaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara nondemokratis seperti China tidak dapat menangani permasalahan dalam negerinya dengan baik dan menjadi ancaman untuk negara-negara di sekitarnya, termasuk Australia yang berbatasan satu kawasan dengannya.

Secara kesejarahan China sudah berinteraksi dengan Australia jauh sebelum pencapaian kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1901. Orang-orang China di Australia tidak sepenuhnya dapat bergerak bebas. Ada pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi hal ini berkaitan erat dengan paham yang dianut oleh China dan dampak paham tersebut yang dianggap dapat mendominasi wilayah Australia. Sejarah menunjukkan pada tanggal 7 Mei 1901, atau tepat dengan kedatangan putri dan pangeran Inggris pascakemerdekaan Australia, orang-orang China yang berada di Australia mengadakan penyambutan yang sangat besar di Melbourne. Warga China

memasang bendera-bendera, lentera, dan berbagai dekorasi lainnya. Komunitas ini mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengadakan acara penyambutan kedatangan keluarga kerajaan Inggris di Melbourne. Di depan tempat perayaan tersebut, terpasang dua buah menara yang bertuliskan "Welcome by the Chinese Citizens". Kata "Chinese Citizen" menunjukkan bahwa orang-orang China yang berada di Australia menyadari bahwa status kewarganegaraan menjadi aspek penting dalam kehidupannya sebagai penduduk di Australia. Kewarganegaraan tidak didefinisikan oleh pemerintah Australia, hingga akhirnya pada tahun 1948 muncul *Nationality and Citizenship Act* yang kemudian diubah menjadi *Australian Citizenship Act*. Pada masa kolonialisasi, setiap negara bagian mengatur kebijakannya masing-masing. Sehingga sebagian besar orang China di Australia mendapatkan kewarganegaraan setempat. Namun, sejak menjadi sebuah federasi, naturalisasi diatur dalam *Naturalisation Act* yang muncul pada tahun 1903. Keberadaan undang-undang ini membuat pergerakan orang-orang yang berasal dari Asia, Afrika, dan Pulau-pulau Pasifik (kecuali New Zealand) untuk mendapatkan status kewarganegaraan Australia. Orang-orang China sempat dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan bangsa kulit putih di Australia.

Setidaknya ada empat motif tindakan dari federasi Australia. Keempat motif tersebut antara lain: 1) menghapuskan divisi-divisi yang memisahkan koloni-koloni; 2) pembentukan peraturan migrasi bersama yang dapat membatasi masuknya imigran non-Eropa; 3) penerapan hambatan tarif/pajak untuk melindungi pekerja-pekerja Australia dan pengusaha-pengusaha dari persaingan internasional; dan 4) pembentukan sebuah kondisi di mana rakyat dapat menikmati hasil dari kehidupan politik yang demokratis. Banyak faktor global yang memengaruhi hubungan ini, termasuk munculnya Perang Dingin, Perang Korea, Perang Vietnam, dan runtuhnya Uni Soviet sehingga keadaan ini memengaruhi

keadaan politik internal Australia dan China sendiri. Hubungan bilateral Australia dengan China selalu memiliki keunggulan politik yang tajam dalam mendekati milenium baru dan pertimbangan ekonomi perdagangan antara kedua negara. Dengan terpilihnya PM Gough Whitlam, dari partai buruh pada tahun 1972 memberikan pengakuan eksplisit terhadap *One China Policy* dan meskipun pemerintah ini relatif singkat, hubungan bilateral dengan China merupakan pencapaian terbesar dalam pengembangan Australia dalam urusan internasional, terutama di Asia Pasifik.

Pemerintah Fraser melanjutkan arah kebijakan ini dengan China, yang diperkuat lebih jauh lagi selama Hawke dan tahun Keating (1983-1996). Pemerintahan Howard telah melanjutkan kebijakan ini dan telah memilih untuk menempatkan pertimbangan ekonomi dan perdagangan di atas ideologi. Sementara dalam pertemuan bilateral antara Julia Gillard dan presiden China Hu Jintao pada tahun 2011, Gillard menegaskan kembali bahwa Australia akan tetap melanjutkan dukungan terhadap *One China Policy* dan memberikan pandangan hubungan dengan China sebagai salah satu hubungan paling penting bagi Australia serta menekankan pentingnya pengembangan hubungan bilateral antara kedua negara.

Pada tahun 2009, merupakan masa terbesar perkembangan hubungan perdagangan antara Australia-China di mana terjadi perdagangan dua arah senilai 85 miliar dollar, serta ekspor terbesar kedua belah pihak dan juga kerja sama dalam layanan pendidikan. Pertumbuhan perdagangan yang dilakukan kedua negara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pasar yang juga sesuai dengan kepentingan Australia-China. Seperti dalam hal mengatasi gangguan di Australia, melalui kerja sama ekonomi yang dilakukan Australia-China mampu mengurangi gangguan yang ada di Australia dan menciptakan ketahanan bagi masyarakat Australia. China juga mempromosikan peluang bisnis Australia di kawasan perdagangan regional China.

Hubungan perdagangan ini juga menguntungkan bagi China di mana Australia merupakan sumber utama penyedia beragam bahan baku energi dan makanan di China guna meningkatkan perkembangan di China. Dalam hubungan bilateral CEO Roundtable perkembangan di China. Dalam hubungan bilateral CEO Roundtable yang diadakan Australia dalam hubungannya dengan Forum Ekonomi dan Perdagangan, kedua negara berkomitmen untuk melakukan perjanjian dagang yang berkualitas dan saling menguntungkan. Kedekatan hubungan kedua negara tidak serta merta berjalan lancar. Australia sering mengalami kekhawatiran dalam membangun hubungan dengan China. Hal ini cukup terlihat mengingat negara tirai bambu masih bersikap keras terhadap Taiwan termasuk dalam gugusan kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur, persengketaan di Laut Cina Selatan serta permasalahan "tradisional" China dengan India.

Australia dan Asia Pasifik

Australia sebagai negara kekuatan menengah di Asia Pasifik juga sering melontarkan gagasan kerja sama multilateral lainnya di kawasan. Pada 1960-an Australia melontarkan gagasan *Pacific Economic Cooperation Conference (PECC)* dan pada akhir 1980-an Australia pula yang melontarkan gagasan pembentukan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* yang dibentuk pada 1989. Di dalam pidatonya kepada *Asia Society, Australia* pada tanggal 5 Juni 2008, Rudd menguraikan tentang berbagai tantangan regional dan global yang dihadapi oleh Australia dan juga negara-negara lain di kawasan, seperti perubahan iklim, krisis energi dan pangan dan munculnya kekuatan baru yaitu China dan India. Rudd melihat mustahil kebutuhan akan adanya institusi-institusi regional yang kuat dan efektif dalam rangka menghilangkan beberapa keretakan di dalam hubungan antarnegara yang terjadi saat ini sekaligus untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Gagasan PM Rudd tersebut menunjukkan adanya ambisi Rudd ingin agar Australia tercatat kembali sebagai negara pelontar gagasan kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan di Asia Pasifik.

di tersebut kembali ditekankan oleh KTT ASEAN ke-15 di Hua Hin, Thailand Oktober 2009 dan menjelang KTT APEC di Singapura November 2009. Komunitas Asia Pasifik diharapkan bukan hanya dapat mendorong kerja sama dan aksi dalam menghadapi isu-isu ekonomi, politik, dan keamanan, melainkan juga dapat mengembangkan apa yang disebutnya sebagai *genuine and comprehensive sense of community*. Diharapkan, komunitas tersebut menjadi arsitektur keamanan baru yang dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan terkait dengan ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dalam pandangan PM Rudd belum ada mekanisme regional yang mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Gagasan tersebut memang mirip dengan apa yang terjadi di Atlantik Utara ketika beberapa negara Eropa Barat membangun Komunitas Keamanan Pluralistik melalui *Treaty of Rome*, 1957. Dari awalnya hanya sebagai komunitas yang mengatur penjualan batu bara dan biji besi kemudian berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa, Masyarakat Eropa, Pasar Tunggal Eropa, dan kemudian menjadi Uni Eropa. Sebagai akibat perang atau konflik kepentingan yang datang silih berganti selama beberapa abad di Eropa, negara-negara di kawasan tersebut mulai *concern* terhadap penghentian perang dan menciptakan suatu *sense of community*. Hal ini dalam konsep Karl Deutsch disebut sebagai *dependable expectation of peaceful change* yang bermuara pada terciptanya *endurable peace, stability and prosperity in the region*.

Menurut *The Australian* mengutip pernyataan PM Rudd, kesepakatan perdagangan bebas akan tercakup dalam APU. Institusi regional akan memberikan ruang kerja sama bagi masalah-masalah global seperti terorisme dan keamanan energi jangka panjang. Menurut Rudd, aliansi yang akan diwujudkan tahun 2020 tersebut, akan menjadi wadah dialog, kerja sama dan aksi ekonomi dan politik guna menghadapi tantangan masa depan regional, yang berkaitan dengan isu-isu keamanan. Untuk itu, Kevin Rudd menginginkan Uni Asia Pasifik berbentuk serupa dengan aliansi

keamanan Uni Eropa. inisiatif tersebut juga akan ditopang lima negara pilar yaitu Amerika, Jepang, China, India, Indonesia, dan Australia.

Munculnya proposal tentang Komunitas Asia-Pasifik membawa beberapa implikasi mendasar untuk dipaparkan mendalam. Australia memiliki kepentingan di dalamnya, yang sebagai berikut:

1. Ide ini selaras dengan pilar-pilar politik luar negeri Australia yang telah ditetapkan di bawah administrasi Partai Buruh. Komunitas Asia Pasifik diharapkan dapat menjadi salah satu strategi penting untuk menciptakan keterlibatan secara komprehensif (*comprehensive engagement*) dengan negara-negara tetangga di Asia. Di samping itu, keterlibatan ini penting untuk meminimalkan kemungkinan munculnya persaingan dan konflik yang mengakibatkan ketidakstabilan regional dan tentunya juga keamanan nasional Australia.

Analisa selanjutnya yang bisa dilihat adalah tren yang terjadi di dunia internasional dengan pembentukan blok-blok kerja sama per regional, sebut saja UE, ASEAN yang berencana membentuk Komunitas ASEAN, ASEAN+3, NAFTA, Amerika Tengah, dan Amerika Latin juga sudah mencetuskan ide tersebut. Tren kerja sama regional akan merugikan negara-negara nonanggota. Dengan demikian, Australia yang tidak bergabung di regional mana pun merasa terancam apabila Australia tidak cepat ikut masuk ke dalam salah satu regional dan regional yang paling ingin untuk bisa Australia ikut bergabung adalah Asia Pasifik.

Secara geopolitik, Australia ingin lebih memainkan peran aktif di kawasan dan ikut menjadi pemimpin baru di kawasan. Saat ini sejumlah negara kuat di dunia sedang berlomba meraih supremasi di Samudra India karena perannya yang semakin penting sebagai jalur pengapalan

lahan bakar dari Timur Tengah ke Asia. Sehingga dengan demikian tidak mengherankan Australia menaruh ketertarikan dan berupaya menebarkan pengaruhnya apabila Komunitas Asia-Pasifik berhasil dibentuk.

2. Proposal tentang Komunitas Asia-Pasifik ini juga menunjukkan pengakuan Australia sebagai "active middle power" di dalam konstelasi struktur global saat ini. Seperti dikatakan oleh Duta Besar Richard Woolcott, ide tersebut akan terlihat tidak terlalu provokatif jika muncul dari negara seperti Australia daripada menjadi gagasan Amerika Serikat atau China. Gagasan tersebut juga menunjukkan indikasi yang sangat jelas bahwa Australia di bawah kepemimpinan yang baru betul-betul berupaya untuk berperan penting dalam pembentukan arsitektur regional untuk menciptakan stabilitas regional, demi menjamin keamanan nasional Australia. Selain itu, dalam rangka upaya menjadi kekuatan yang aktif dan signifikan di kawasan, tentunya penting untuk mengulang kembali kesuksesan negara tersebut yang ditunjukkan dengan berdirinya APEC pada tahun 1988 berdasarkan usul dari PM Bob Hawke.
3. Terkait dengan implikasi kedua, pandangan realis seperti Morgenthau melihat bahwa gagasan tersebut merupakan manifestasi dari adanya suatu kekhawatiran tentang potensi persaingan yang intensif di antara kekuatan-kekuatan di kawasan, yaitu Amerika Serikat, Jepang, China, dan India. Walaupun merupakan suatu hal yang mustahil untuk menghilangkan semua potensi konflik, institusi baru ini diharapkan dapat mengakomodasi, bahkan mengarahkan. Hal pertumbuhan China atau India, sebagai calon-calon kekuatan baru, yang masih dianggap belum jelas hingga saat ini.

Kekhawatiran besar Australia adalah munculnya China dan India sebagai dua kekuatan besar Asia akan menantang-adi daya Amerika Serikat dan tentunya mencemaskan negara-negara lebih kecil di Asia yang selama ini menganggap Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang ramah. Dengan demikian, Australia yang merupakan sekutu terdekat dengan Amerika Serikat berupaya melindungi hegemoni Amerika Serikat di dunia dengan berupaya memperlebar akses pengaruh Amerika Serikat di Asia dan Pasifik melalui ide pembentukan komunitas tersebut. Meski China menerapkan *economy-first diplomacy* terhadap Jepang khususnya dan kepada Taiwan serta negara-negara di kawasan, kekuatan ekonomi China yang memungkinkannya membangun kapabilitas pertahanan yang kuat pada 2020 memang amat mencemaskan negara-negara di kawasan Asia Timur Laut, Asia Tenggara, dan juga Australia. Australia melihat kemajuan modernisasi militer China sangat mengancam keamanan nasional Australia sehingga Australia berupaya sebisa mungkin untuk merangkul negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bekerja sama demi melindungi keamanan nasional Australia dengan cara pembentukan komunitas tersebut. Keuntungan jangka panjang apabila komunitas tersebut berhasil dibentuk adalah berkurangnya ancaman langsung dari negara-negara besar seperti China pada Australia.

Dalam arti positif China dan India akan bertindak sebagai dinamo-dinamo ekonomi baru yang memberikan keuntungan bagi kawasan Asia bahkan jika kebadiran ekonomi Amerika Serikat di kawasan semakin menurun. Australia yang sangat tidak diuntungkan secara geografis karena terkecilkan dari kerja sama regional akan bisa memanfaatkan Asia Pasifik sebagai region untuk mengintensifkan kerja-sama. Sebagai catatan, perdagangan di Asia Pasifik mencapai 50% dari perdagangan seluruh dunia. Australia yang merupakan negara yang mengandalkan perdagangan bagi pemasukan dalam negerinya melihat potensi besar yang berada di kawasan Asia Pasifik bagi ekonomi Australia. Dengan demikian,

apabila ide pembentukan komunitas Asia Pasifik berhasil direalisasikan, Australia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar secara ekonomi dengan mendapatkan akses pasar ke Asia dan Pasifik. Australia akan mendapatkan keuntungan dari booming kemajuan ekonomi India dan China. Australia akan dapat mudah masuk ke ASEAN, Asia Timur, serta Asia Selatan (khususnya India) dan Pasifik sekaligus.

Pada masa sekarang, Australia lebih memantapkan diri dan meningkatkan keterikatannya pada Asia. Dengan segala potensi yang dimilikinya, menjadikan Australia menunjukkan kekuatannya sebagai negara ideal untuk mitra perdagangan dan pendonor kemanusiaan. Tentu saja perwujudan dari tujuan tersebut tetap disesuaikan dengan komitmennya multilateralisme dan regionalisme melalui kerja sama internasional dalam konteks organisasi regional dan internasional. Hubungan dengan negara-negara Asia dan Pasifik merupakan prioritas kebijakan eksterior atau luar negeri Australia yang tidak akan pernah hilang. Perhatian utama Australia terhadap kawasan lebih meningkat pada isu-isu perdagangan bebas dan terorisme, integrasi dengan Asia dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Untuk itulah khususnya di kawasan Pasifik, Australia menempatkan dirinya sebagai *leader*. Hal ini sudah dimulai dengan terbentuknya *South Pacific Forum* (SPF) sebagai langkah awal Australia untuk menanamkan pengaruhnya. Keterlibatan Australia dalam SPF telah dimulai ketika Australia menjadi salah satu pengorganisasi *South Pacific Commission* (SPC) yang merupakan langkah awal dari terbentuknya SPF. SPF adalah forum tempat para pemimpin negara-negara Pasifik dapat bertemu dan menemukan solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di kawasan pasifik. Dukungan dan keterlibatan Australia untuk forum tersebut diperkuat dengan keberhasilan para pemimpin dalam SPF telah sukses membangun agenda pasifik yang komprehensif sesuai dengan potensi pembangunan. Melalui kerja sama dengan negara-

negara Pasifik, Australia telah berhasil menjadi inspirator dan motivator untuk pelestarian laut, hutan dan sumber alam lainnya, menstimulasi perdagangan, bantuan teknis untuk pembangunan negara-negara Pasifik termasuk bidang militer.

Keberhasilan lainnya dari keterlibatan Australia di Pasifik adalah dapat mendorong negara-negara besar lainnya seperti AS, Prancis, Inggris untuk menandatangani *South Pacific Free Zone Treaty*. Penandatanganan protokol tersebut membuahkan hasil yakni kawasan Pasifik terbebas dari usaha-usaha percobaan nuklir. Australia juga rajin memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Pasifik. Salah satu negara yang mendapat banyak bantuan dari Australia adalah Papua Nugini dengan lucuran dana bantuan dari Australia sebesar \$325 juta. Dengan bantuan Australia Samoa barat dapat mendirikan Unit Promosi Investasi (*Investment Promotion Unit*) dalam departemen perdagangan, bisnis dan industri. Australia juga membantu Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, kepulauan Samoa, dan Pulau Solomon untuk menjadi mandiri, baik dalam hal ekonomi, pembagian kekuasaan antara pusat dan provinsi untuk Selain untuk pengembangan dan pembangunan negara-negara Pasifik Australia juga terlibat dalam usaha pencegahan terhadap kejahatan transnasional, terorisme, perdagangan narkoba, *human trafficking*, imigran gelap, dan pencucian uang. Jelaslah bahwa dengan keberhasilan untuk menciptakan suasana damai, aman dan nyaman di kawasan regional baik langsung maupun tidak akan mendukung kepentingan dan tujuan nasional (semakin menguntungkan) Australia.

Secara jelas Australia menunjukkan bahwa politik luar negerinya mengalami perubahan dan sangat dinamis. Pergantian dari satu periode menuju periode berikutnya dipengaruhi dengan perubahan situasi yang terjadi di sekitarnya. Perkembangan dan perubahan situasi khususnya di kawasan regional yang diiringi dengan kemampuan dan kestabilan Australia dalam menjawabnya menunjang eksistensinya di tingkat kawasan dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Don, Brian Jinks, Jon Warhurst. 1989. *Australia: Political Institutions*. Pitman Publishing Pty Ltd, Victoria.
- Alfredson, Tanya dan Azeta Cungu. 2008. *Negotiation Theory and Practice: A Review of the Literature*. UN: Food and Agriculture Organization.
- Alfredson, Tanya dan Azeta Cungu. 2008. *Negotiation Theory and Practice: A Review of the Literature*. UN: Food and Agriculture Organization.
- Camilleri, J.A. 1997. *Australia Foreign Policy*. New South Wales: The Bookends.
- Geoff Thornton, et. al. 2005. *Geografi Australia* (terjem); Canberra: Lembaga Australia-Indonesia.
- Chappel, Louise, et. al. *The Politics of Human Right in Australia*. Cambridge University Press.
- Cooper, Andrew F, Hocking, Brian, and Maley, William (eds). 2008. *Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?*. Palgrave Macmillan, New York.
- Cooper, Andrew F, Hocking, Brian, and Maley, William (eds). 2008. *Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?*. Palgrave Macmillan, New York.
- Seny Program of House of Representatives*. 11 Oktober 2011.
- Department of External Affairs. 1997. *Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America (ANZUS)*. Australian Government Publishing Service, Canberra.
- Draft Australian Labor Party National Sekretariat*.

- Executive Summary of Coalition Election Policy (Liberal Party of Australia)*
- Firth, Stewart. 2005. *Australia in International Politics, An Introduction to Australia Foreign Policy, Second Edition*. Sydney: Allen and Unwin.
- Fitzgibbon, Jeff. 2003. *Australia's Foreign and Trade Policy White Paper, Department of Communication, Information Technology and The Arts*. Canberra.
- Habib, Hasnan. 1999. *Politik Luar Negeri Australia di Asia Pasifik*, dalam Makalah Diskusi Panel Pusat Studi Asia Pasifik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 26 Oktober 1999.
- Hamid, Zulkifli. 2002. *Sistem Politik Australia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harini, Veronica Setyasih. 2011. Penelitian: Intervensi Australia Semasa pemerintahan PM John Howard dalam Masalah Dalam Negeri Indonesia (Studi Kasus Isu Separatisme di Papua 2006-2007)
- Harini, Veronica Setyasih. 2012. Penelitian: Kebijakan Luar Negeri Australia Semasa Pemerintahan Pm John Howard Dalam Proses Kemerdekaan Timor Timur
- Harini, Veronica Setyasih. 2017. Penelitian: Festival Kebudayaan Canberra Sebagai Alat Diplomasi Pemerintah Indonesia Di Australia (2014-2015)
- Harrison, Sir, Moore W. 2000. *The Constitution of the Commonwealth of Australia*. University of Sydney Library
- Harjono, Ratih. 1992. *Suku Puthnyo Asia*. Jakarta: PT Gramedia
- Inganti dan Veronica Setyasih Harini. 2012. Penelitian: Analisis Gender Dalam *Australian Labor Party (ALP)* Terhadap Proses Pemilu PM Di Australia.
- Jennings, Dean. 1992. *The Politics of Australia*. Melbourne: Macmillan Education.

- Kendall, Timothy. 2007. *Within China's Orbit?: China Through The Eyes Of The Australian Parliament*. Parliamentary Library.
- Leppman, Elizabeth | 2006. *Australia and The Pacific*. Philadelphia: Chelsea House.
- Mc. Allister, I. 2011. *The Australian Voter: 50 Years of Change*. Sydney, University of New South Wales Press.
- Mediansky dan Pallreeman. 1988. *In Pursuit of National Interest, Australia Foreign Policy in the 1990's*. Sydney: Pergamon Press.
- Naskah Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework of Security Cooperation 13 November 2006.
- Naskah Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework of Security Cooperation 13 November 2006.
- Nimpono Adiarso dan Veronica Setyasih Harini. 2012. Penelitian: Implementasi *Lombok Treaty* Pasca Ratifikasi Oleh Indonesia Dan Australia Pada Tahun 2007-2011.
- Rizky Tio Pradika dan Veronica Setyasih Harini. 2013. Penelitian: Diplomasi Pemerintah Australia Terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Pemberian Grasi (Studi Kasus: Pemberian Grasi Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Terpidana Narkoba Schapelle Leigh Corby).
- Sibarö. 1989. *Sejarah Australia*. Jakarta: Depdikbud.
- Soter, Keith. 2007. *Global Thought Leader Real Insight & Authority Australia: Global Direction*.
- T. Tow. William dan Kin Wah Chin. 2009. *ASEAN, India, Australia: towards closer engagement in a new Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.

T. Tow, William dan Kin Wah Chiu, 2009, *ASEAN, India, Australia: towards closer engagement in a new Asia* Institute of Southeast Asian Studies

Thorston, Carl 1997 *Geografi Australia* (terjem). Lembaga Australia-Indonesia

Tranter, Bruce & Mark C. Western. 2003. Postmaterial Values and Age: The Case of Australia, *Australian Journal of Political Science*

Uropmabin, Fioriani dan Ludiro Madu. 2009. *Kebijakan Pertahanan Australia Di Era PM Kevin Rudd: Dinamika Faktor Internal dan Eksternal*, dalam *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2009.

Wibben, Annick. *Feminist International Relations: Old Debates and New Directions*. The Brown Journal of World Affairs, Winter/Spring 2004, vol x, issue 2. Rockefeller Humanities Fellow Human Security NCRW and CUNY Graduate Center.

Wibben, Annick. *Feminist International Relations: Old Debates and New Directions*. The Brown Journal of World Affairs, Winter/Spring 2004, vol x, issue 2. Rockefeller Humanities Fellow Human Security NCRW and CUNY Graduate Center.

Wibben, Annick. 2004. *Feminist International Relations: Old Debates and New Directions*. The Brown Journal of World Affairs, vol x, issue 2. Rockefeller Humanities Fellow Human Security NCRW and CUNY Graduate Center.

Williams, John, M dan Clement Macintyre. 2000. *Commewell's of Australia*. Sidney: University of Sidney Library

Yu Jie. 2006. "The Environmental Yellow Peril", dalam *China Rights Forum* No. 1

<http://inside.org.au/rudds-decisive-defeat/artikel> dari Norman Abjoreman teaches public policy in the Crawford School of

Economics and Government of the Australian National University

- <http://www.abc.net.au/pm/content/2005/s1323165.htm>
- <http://www.biography.com/people/john-howard-9345054>
- <http://www.biography.com/people/john-howard-9345054>
- <http://www.china.embassy.gov.au/bjng/speech140710.html>
- <http://www.dlihs.tas.gov.au/hospital/mersey-community-hospital>
- http://www.foreignmister.gov.au/speeches/2002/021017_la_ag_ausandchina.htm
- <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/mersey-community-hospital>
- <http://www.theaustralian.com.au/news/features/corby-a-hostage-to-hope/story-e6frg6z6-1226364977956>
- <http://www.theaustralian.com.au/news/features/corby-a-hostage-to-hope/story-e6frg6z6-1226364977956>
- www.alp.org.au. *National Platform and Constitution 2009 Chapter 11: New ways of governing for a stronger democracy*
Authorised by Karl Bitar, 5/9 Sydney Ave, Barton, ACT 2600 4
- www.austembjak.or.id/jaktindonesian/PD08_o1.html
- www.austembjak.or.id/jaktindonesian/PD08_o1.html

GLOSARIUM

Agnostisisme:

Suatu pandangan yang meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui Tuhan itu ada atau tidak dengan akal pikiran manusia yang terbatas.

Akulturasi:

Suatu proses sosial terbentuknya kebudayaan sebagai hasil dari pertemuan dua atau lebih kebudayaan tertentu dengan unsur dari suatu kebudayaan asing dan saling memengaruhi secara intensif.

Amandemen:

Istilah suatu perubahan dari dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbaikinya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, dan juga bisa karena sudah tidak sesuai lagi/ tidak relevan. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional).

Ateisme:

Suatu pandangan yang tidak memercayai keberadaan Tuhan.

Chauvinisme:

Suatu pandangan rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan atau menganggap tinggi bangsa sendiri dan cenderung merendahkan bangsa lain. Istilah ini berbeda dengan patriotisme atau nasionalisme, karena terkesan lebih lebih picik dan membenci.

Egalitarianisme:

Suatu pandangan yang meyakini bahwa pada hakikatnya semua manusia adalah sama dalam status, nilai atau moral.

secara fundamental (kesetaraan). Pandangan ini melihat bahwa setiap manusia harus diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama pada segala dimensi, seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya.

Egoisme:

Suatu pandangan yang menempatkan diri dalam sebuah situasi dengan mempertahankan tujuannya yang hanya menguntungkan diri sendiri serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain.

Food gathering:

Suatu cara yang digunakan sekelompok manusia di masa lalu dalam mengumpulkan makanan dengan cara berburu. Pada masa ini, manusia hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidup pada satu hari tersebut dengan berburu, tanpa melakukan produksi agar dapat menjamin keberlangsungan.

Humanisme:

Suatu pandangan yang meyakini bahwa alam merupakan jumlah total dari realitas. Materi-energi dan bukan pikiran yang merupakan bahan pembentuk alam semesta. Pandangan ini meyakini bahwa entitas supernatural sama sekali tidak ada. Ketidaknyataan supernatural ini pada tingkat manusia berarti bahwa manusia tidak memiliki jiwa supernatural dan akan abadi. Pada tingkat alam semesta sebagai keseluruhan, bahwa kosmos kita tidak memiliki Tuhan yang supernatural dan abadi. Dengan kata lain, humanisme mengajak manusia berpaling dari Tuhan yang menciptakan mereka, dan hanya mementingkan keberadaan dan identitas mereka sendiri.

Ireligius:

Artinya yang artinya tidak beragama.

Kolonialisme:

Artinya yang merujuk pada proses pengendalian kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas

negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut.

Komunisme:

Sebuah pandangan yang merujuk pada sebuah sistem ekonomi suatu negara yang menggunakan pendekatan pada perjuangan kelas dan kesejahteraan ekonomi secara merata. Komunisme pada awal kelahirannya adalah sebuah kritik terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19. Dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi.

Konvensi:

Istilah dalam merujuk pada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis.

Liberalisme:

Suatu pandangan yang memiliki inti pemahaman bahwa negara-negara mendapatkan keuntungan dari satu sama lain lewat kerja sama dan perang itu dianggap terlalu destruktif atau bisa dikatakan sebagai hal yang pada dasarnya sia-sia.

Mainland:

Suatu dataran yang sangat luas dan memiliki karakteristik tertentu di suatu daerah atau kepulauan yang paling luas di antara pulau-pulau sekitarnya.

Misplaced continent:

Istilah yang ditujukan untuk benua sekaligus negara Australia yang mayoritas penduduknya berkulit putih namun terletak di suatu tempat yang umumnya didiami oleh orang-orang kulit berwarna (cokelat). Australia terletak di geografi bumi Asia dan Pasifik. Kondisi budaya di Asia dan Pasifik sangat

berbeda dengan budaya penduduk Australia yang mengadopsi budaya Barat (Eropa)

Multilateralisme:

Istilah dalam hubungan internasional yang menunjukkan kerja sama antar beberapa negara. Kerja sama ini melibatkan negara-negara yang berbeda wilayah dan kawasan.

Nasionalisme:

Suatu pandangan yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Navigators:

Orang yang bertanggung jawab dalam sebuah pelayaran untuk navigasi kapal. Istilah ini merujuk pada masa pelayaran orang-orang Eropa dalam menemukan benua baru, salah satunya Australia.

Oriental:

Istilah yang merujuk pada peniruan atau penggambaran unsur-unsur budaya Timur di Barat oleh para penulis, desainer, dan seniman.

Pragmatisme:

Sebuah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori, semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya.

Rasisme:

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya. Suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.

Referendum:

Istilah dalam pengambilan keputusan tingkat negara secara resmi dengan cara jajak pendapat, yaitu pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan politik.

Regionalisme:

Suatu istilah dalam hubungan Internasional yang artinya kerja sama regional. Kerja sama ini terbentuk atas dasar ketergantungan bersama yang dihubungkan dengan kondisi geografis.

Sosialisme demokratis:

Sebuah paham politik yang sering disebut sebagai kiri atau kiri moderat yang muncul pada akhir abad ke-19 berasal dari gerakan sosialisme.

Terorisme:

Sebuah istilah yang ditujukan pada proses serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Aksi ini berbeda dengan perang, karena tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Terra nullus:

Istilah bahasa Latin yang berasal dari hukum Romawi, yang berarti "tanah yang tidak dimiliki siapa pun". Istilah ini digunakan pada hukum internasional untuk wilayah tanpa kepemilikan. Wilayah *terra nullus* dapat dikuasai oleh suatu negara melalui pendudukan.

Transnational:

Istilah yang ditujukan pada suatu proses yang melibatkan manusia-manusia antarnegara dan melewati batas-batas negara.

PROFIL PENULIS



VERONICA RINI atau yang bernama lengkap **VERONICA SETYASIH HARINI, S.I.P., M.Si.**, merupakan salah satu dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kebiasaannya menulis telah muncul semenjak kuliah dengan aktif mengirim artikel ke beberapa surat kabar daerah. Minat dan perhatiannya pada masalah sosial melalui karya tulis membuahkan hasil gemilang dengan prestasi yang diraihinya. Sejak tahun 2005, penulis telah mendapatkan penghargaan tingkat nasional PT. PLN (Persero) dalam bidang sosial humaniora dan dari Pustaka LP3ES Jakarta. Pada tahun 2006 berhasil meraih sebagai pemenang lomba terbaik ketiga penulis nasional dari Kementerian Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A. berkat tulisannya mengenai pengentasan buta aksara. Dua tahun kemudian penulis kembali meraih penghargaan sebagai juara kedua nasional menulis dalam tajuk mengentaskan buta aksara bagi masyarakat di Bantaran Sungai Bengawan Solo dari Kementerian Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo M.B.A. Satu tahun berikutnya

Lebih Dekat dengan Berita Konguru | 205

yakni 2009, penulis kembali meraih sebagai juara ketiga pada program peningkatan pelaksanaan fungsional bagi masyarakat Pacitan yang tinggal di pegunungan. Kememangan kali ini pun diberikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, Dr. Meutia Hatta.

Sejak masih menempuh studi sarjana dan pascasarjana dengan menjadi anak asuh dari almarhum Romo Y.B. Manguwijaya, penulis memiliki ketertarikan yang tinggi pada masalah sosial dan pendidikan. Selama menjadi dosen pada Yayasan Slamet Riyadi Surakarta, penulis yang alumnus Program Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini aktif pada berbagai kegiatan seminar, lokakarya dan *workshop* guna pengembangan diri. Di antaranya berhasil menyusun penelitian tingkat nasional tentang pertama, pemanfaatan bahan bacaan khususnya Majalah Pendidikan dan Keluarga GENTA sebagai sarana meningkatkan media pembelajaran bagi para guru di Kabupaten Sragen. Kedua, gagasan untuk diadakannya e-TKI sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya malpraktek dalam pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri. Hal ini cukup penting mengingat proses pengiriman tenaga kerja dari Indonesia terkadang masih berlangsung secara tidak legal, tanpa melalui jalur pemerintah. Penulis juga berusaha untuk mengurangi jumlah anak-anak jalanan dan perilaku menyimpangnya dengan memberikan pelatihan bahasa Inggris di daerah Tawangmangu, Karanganyar. Penulis juga berhasil membuat karya pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dalam rangka meningkatkan nasionalisme bagi generasi muda untuk lebih mencintai budaya sendiri dengan melestarikan kesenian ketoprak dan tari tradisional. Adapun setting dari program ini adalah remaja yang bertempat tinggal di Kelurahan Badiswari, satu-satunya wilayah dari Kota Surakarta atau Solo yang menyatu dengan Kraton Kasunanan.

Selanjutnya penulis yang sudah memiliki tiga hidayah kecil yakni Alfonsa Maria Setya Leksana, Barbara Rosalina Setya Leksana

dan Maria Magdalena Candraningtyas Setya Leksana ini mendukung program mendongeng bagi anak-anak Hal ini diwujudkan dengan karyanya dalam bentuk dongeng dengan judul *Kethek Ojeng* yang di dalamnya sarat akan pendidikan sejarah dan perjuangan untuk meraih kebahagiaan. Di sela-sela waktu senggangnya, penulis juga aktif memberikan bimbingan kepada para guru dalam kegiatan menulis baik karya ilmiah yang diterbitkan melalui jurnal ataupun karya tulis populer untuk dimuat di media massa. Selain bimbingan dan pendampingan kepada para guru, penulis juga membangun kedekatan dengan siswa-siswa Sekolah Kejuruan atau Vokasi yang memiliki bakat dan ketertarikan pada kegiatan tulis menulis. Saat ini penulis masih dipercaya sebagai editor pada beberapa jurnal yang diperuntukkan sebagai sarana meningkatkan profesionalisme bagi para guru.